



**KEDUTAAN BESAR
REPUBLIK INDONESIA
LONDON**

Laporan Kinerja Perwakilan Republik Indonesia

2024



**KEDUTAAN BESAR
REPUBLIK INDONESIA
LONDON**

KATA PENGANTAR

Sepanjang tahun 2024, KBRI London telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan negara akreditasi (Inggris dan Irlandia) di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Selain itu, KBRI London juga menjalankan diplomasi multilateral di organisasi internasional akreditasi, yaitu International Maritime Organization (IMO). Sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja, KBRI London telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2024 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja KBRI pada 2024 adalah sebesar 107,30% dari 25 Indikator Kinerja (IK) dan 6 Sub-IK. IK yang mencapai dan melampaui target sebanyak 22 IK, yang antara lain meliputi efektivitas diplomasi ekonomi, kepemimpinan pada forum multilateral, kasus WNI yang diselesaikan, kesepakatan bidang ekonomi, sosial dan budaya, kesepakatan di bidang politik, keamanan dan maritim, respon positif atas economic intelligence, posisi yang diterima pada forum multilateral, serta indeks pengelolaan BMN. Sementara IK lainnya hampir mencapai target dengan predikat capaian 'baik'.

Pencapaian target kinerja KBRI London tidak terlepas dari faktor-faktor penentu baik dari kondisi domestik negara-negara akreditasi maupun kondisi di tanah air. LKj 2024 diharapkan menjadi sarana pengendalian dan penunjang peningkatan kinerja KBRI London. Selain menjadi bahan evaluasi kinerja yang dilakukan KBRI London TA 2024, LKj ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan tugas selanjutnya.

Sebagai penutup, dokumen LKj KBRI London 2024 yang disusun secara obyektif, tidak hanya merupakan gambaran komprehensif berbagai target kinerja dan evaluasi namun juga sebagai refleksi akuntabilitas dari Rencana Strategis tahun 2020-2024. KBRI London terus berupaya meningkatkan kerja sama di berbagai bidang prioritas antara Indonesia dengan Inggris, Irlandia, dan International Maritime Organization serta memberikan pelayanan prima dan perlindungan maksimal bagi WNI yang berada dalam wilayah kerja KBRI London.



London, 10 Januari 2025

Duta Besar RI

Dr. Desra Perca

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
PENDAHULUAN	7
I.1. Latar Belakang.....	7
I.1.1. Tugas dan Fungsi	8
I.1.2. Struktur Organisasi.....	8
I.2. Aspek Strategis	9
I.2.1. Potensi/Peran Strategis	12
I.2.2. Tantangan Utama/ Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>).....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	16
II.1. Rencana Strategis	16
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan	17
AKUNTABILITAS KINERJA	21
III.1. Capaian Kinerja	21
S1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi Kawasan KBRI London yang Optimal.....	24
S2 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Organisasi Internasional	55
C1 Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI London yang Prima	67
Analisis IK C1.1 – Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan	68
Analisis IK C1.1 – Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan	73
C2 Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI London	90
B1 Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI London yang Kuat.....	100
Analisis IK B1.1 – Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London	100
Deskripsi IK	122
B2 Diplomasi Multilateral di Negara Akreditasi KBRI London yang Kuat.....	126
Analisis IK B2.1 – Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya	126
B3 Basis Data KBRI London yang Akurat	137
L1 Tata Kelola Organisasi KBRI London yang Baik	144
L2 Pengelolaan Aset KBRI London yang Optimal	147
L3 Pengelolaan Anggaran KBRI London yang Optimal dan Akuntabel	152

III.2. Realisasi Anggaran	155
III.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	156
Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja.....	156
Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	160
Sarana dan Prasarana yang Mendukung	161
PENUTUP	162
IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja	162
IV.2. Kendala dan Tantangan	162
IV.3. Proyeksi Ke Depan.....	163
LAMPIRAN	
I. Matriks Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) PK	
II. Matriks Informasi Kinerja	
III. Matriks Penjenjangan Kinerja	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja 2024 menekankan komitmen KBRI London untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, laporan ini mencerminkan pencapaian yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah 2024.

Perjanjian Kinerja KBRI London 2024 menerapkan Sistem Manajemen Kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC), yang mencakup 4 (empat) Perspektif, 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS), dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja (IK).

Capaian kinerja KBRI London untuk tahun 2024 adalah 107,30% ("Istimewa"), melampaui target di keempat perspektif: Stakeholder, Customer, Internal Business, dan Learning and Growth. Kinerja tahun 2024 ini relatif stabil sebagaimana tahun-tahun sebelumnya (2020: 96,67%; 2021: 107,54%, 2022: 106,84%; 2023: 106,22%).

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
Stakeholder Perspective	25%	109,87%
Customer Perspective	15%	107,00%
Internal Business Process Perspective	30%	107,00%
Learning and Growth Perspective	30%	105,61%
Nilai Capaian Kinerja Organisasi		107,30%

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Capaian Kinerja Organisasi	96,67% (Baik)	107,54% (Istimewa)	106,84% (Istimewa)	106,22% (Istimewa)	107,30% (Istimewa)

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, KBRI London telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam hubungan bilateral dengan Inggris dan Irlandia, serta dalam diplomasi multilateral khususnya di IMO.

Di bidang ekonomi, KBRI London telah memfasilitasi 8 kesepakatan dagang senilai total USD 245,87 juta, utamanya pada produk kayu, kertas dan besi baja, memperkuat posisi komoditas strategis Indonesia di pasar Inggris. Selain itu, penyelenggaraan CEO Roundtable Forum dan Indonesia Investment Forum (IIF) 2024 di Inggris mendapat sambutan positif, memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro dan politik Indonesia yang kondusif sebagai tujuan investasi. Selain itu, kunjungan wisatawan dari Inggris dan Irlandia pada 2024 mencapai 393.461 kunjungan, menunjukkan tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia pasca-pandemi.

Di bidang politik, tahun 2024 merupakan periode yang cukup intensif dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris. Kunjungan kerja dan pertemuan Presiden RI, Prabowo dengan Raja Charles III, PM Keir Starmer dan Deputy PM Angela Rayner mendorong lahirnya Kemitraan Strategis yang baru pada 2025. Kunjungan pejabat tinggi Inggris seperti

Menlu Inggris David Lammy dan Menteri Pembangunan Anneliese Dodds ke Jakarta membuka peluang kerja sama baru di bidang pembangunan dan mineral kritis dengan Indonesia. Untuk Irlandia, Menlu RI Retno Marsudi bertemu Menlu/Deputi PM Irlandia Micheál Martin di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, di New York. Keduanya menandatangani MoU Mekanisme Konsultasi Bilateral Indonesia - Irlandia pada 24 September 2024.

Di sisi multilateral, sepanjang tahun 2024, Indonesia sebagai anggota Dewan IMO terus berperan aktif dalam diskusi berbagai isu di forum IMO, khususnya pada isu-isu terkait seafarers dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor perkapalan. Kepemimpinan Indonesia tidak hanya terlihat dari partisipasi aktif Delegasi RI pada pertemuan-pertemuan IMO, International Mobile Satellite Organization (IMSO), dan International Coffee Organization (ICO), namun juga ditandai dengan diterimanya beberapa prakarsa Indonesia pada pertemuan IMO, IMSO, dan ICO. Indonesia juga kembali terpilih sebagai anggota Advisory Committee IMSO pada pertemuan Majelis IMSO ke-29.

Dari segi sosial dan budaya, KBRI London telah melaksanakan 19 kegiatan promosi sepanjang tahun 2024 di London dan Dublin. Diantaranya, 2 kegiatan promosi terpadu dan 2 resepsi diplomatik di London dan Dublin yang menarik ratusan peserta, termasuk pejabat pemerintah, korps diplomatik, dan kalangan bisnis. Acara ini berhasil meningkatkan citra positif Indonesia dalam diplomasi budaya, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan promosi pariwisata.

Dalam upaya perlindungan WNI, KBRI London telah menyelesaikan 32 kasus (24 kasus umum dan 8 kasus khusus). KBRI London juga mengawal proses penempatan PMI pekerja musiman sesuai hasil verifikasi job order yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Adapun terkait pelaksanaan program pasporisasi WNI OTT telah dihentikan pelaksanaannya sesuai amanat Permenkumham No. 19 tahun 2024, efektif 26 Agustus 2024.

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan 18 kali revisi pagu anggaran terkait penambahan pemindahan belanja pegawai tunjangan sewa rumah ke belanja barang fasilitas sewa rumah, rencana penarikan dana triwulanan, buka blokir kendaraan dinas, penambahan pagu fasilitas sewa rumah, pemenuhan belanja pegawai, self blocking anggaran belanja perjalanan dinas, dan pemotongan pagu anggaran perlindungan WNI.

KBRI London telah mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2024 dengan realisasi mencapai 99,84%

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris dan Irlandia berlangsung dengan baik dan stabil. Pemerintah Inggris melihat Indonesia sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan, serta memiliki kesamaan pandang dalam isu-isu global, termasuk di bidang lingkungan hidup, penanggulangan terorisme, pemerintahan terbuka/*open government*, SDGs, dialog lintas agama, proliferasi nuklir, dan G-20.

Perkembangan politik global dan dinamika politik internal menandai berakhirnya *Indonesia-UK Partnership Roadmap 2022-2024* (Roadmap Kemitraan). Pada kunjungan resmi Presiden RI ke Inggris pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto dan PM Keir Starmer sepakat memperbaharui kemitraan strategis. Hal ini guna memastikan berbagai bidang kerja sama yang telah berjalan dapat semakin kuat serta kontekstual dengan prioritas kebijakan dari kedua negara, sebagaimana tertuang dalam *Joint Statement on a New Strategic Partnership Between Indonesia and the UK*. Dokumen pernyataan bersama tersebut menjadi panduan terkini dari upaya peningkatan kerja sama bilateral di sektor-sektor prioritas bersama kedua negara.

Komitmen penguatan kerja sama Indonesia-Inggris menunjukkan sinyal positif pasca penyampaian *Joint Statement on a New Strategic Partnership Between Indonesia and the UK* oleh kedua kepala pemerintah pada 21 November 2024 di London. Pernyataan bersama tersebut menandakan babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Inggris, utamanya dalam mendukung prioritas kebijakan nasional pemerintah Indonesia dan Inggris yang baru. Kemitraan strategis ini juga disepakati dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang terdiri pada 3 bagian yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan SDM; (ii) pertahanan dan kebijakan luar negeri; dan (iii) transisi energi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun fokus bidang kemitraan strategis meliputi: pendidikan dan inovasi, energi transisi, pangan dan teknologi pertanian, kesehatan, serta industri pertahanan.

Inggris merupakan salah satu mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia di Eropa. Nilai perdagangan terus mencatatkan tren positif yang menggambarkan pulihnya perdagangan kedua negara pasca-pandemi. Nilai perdagangan Indonesia-Inggris menunjukkan tren yang cukup stabil dengan nilai perdagangan tercatat sebesar USD 2,37 miliar periode Januari-Oktober 2024, mengalami kenaikan sebanyak 2,67% tahun 2023 yang tercatat sebesar USD 2,31 miliar. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan bilateral dengan Inggris senilai USD 726 juta.

Dengan Irlandia, kerja sama terus meningkat sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 4 September 1984. Tahun 2024 merupakan juga tahun Peringatan 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Irlandia. Hal ini antara lain terlihat dari ditetapkannya Indonesia oleh Irlandia sebagai salah satu negara Asia yang menjadi prioritas pengembangan hubungan kerja sama bilateral, dan dengan dibukanya kedutaan Irlandia di Jakarta pada 2014. Irlandia juga memandang Indonesia sebagai mitra penting di kawasan dalam kaitannya dengan keinginan Pemerintah Irlandia untuk mengembangkan hubungan kerja sama yang lebih erat dengan ASEAN. Selain itu, Indonesia memandang Irlandia sebagai negara yang mempunyai peran penting di PBB, serta sebagai anggota Uni Eropa yang aktif dalam menyuarakan isu

HAM. Pada 24 September 2024, di sela pertemuan Sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri RI dan Menlu Irlandia menandatangani MoU Mekanisme Konsultasi Bilateral.

Dalam konteks kerja sama multilateral, peran Indonesia di IMO juga semakin penting seiring dengan prioritas pembangunan maritim oleh pemerintah, yang merupakan salah satu pilar utama kebijakan nasional serta terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori "C" periode 2024-2025 dan terpilihnya kembali BPK RI sebagai Auditor Eksternal IMO periode 2024-2017.

I.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/2004/01 tanggal 1 Juni 2004 yang telah diubah enam kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di London (KBRI London) adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO).

Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di London adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.1.2. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perwakilan RI di London sesuai Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/2004/01 tanggal 1 Juni 2004 yang telah diubah enam kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022, berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan negara akreditasi serta Indeks Perwakilan, struktur organisasi KBRI London terdiri dari:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan / Kepala Kanselerai
3. Fungsi Politik
4. Fungsi Ekonomi
5. Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya
6. Fungsi Protokol, Konsuler dan perlindungan WNI
7. Fungsi Multilateral
8. Atase Pertahanan
9. Perbinlu
10. Atase Perhubungan
11. Atase Perdagangan
12. Atase Pendidikan dan Kebudayaan
13. Pejabat Promosi Investasi IIPC London
14. Penata Kanselerai
15. Unit Komunikasi

Hingga akhir 2024, jumlah *home staff* KBRI London berjumlah 24 orang, terdiri dari Duta Besar LBBP, Wakil Kepala Perwakilan / Kepala Kanselerai, 1 Minister Counsellor, 4 Counsellor, 3 Sekretaris I, 1 Sekretaris II, 3 Sekretaris III, 1 Atase Pertahanan, 1 Asisten Atase Pertahanan,

1 Perbinlu, 1 1 Atase Perhubungan, 1 Atase Perdagangan, 1 Atase Pendidikan dan Kebudayaan, 1 Pejabat Promosi Investasi IIPC London, 1 Wakil Pejabat Promosi Investasi IIPC London, 2 Penata Kanselerai, 2 Petugas Komunikasi. Sementara itu, jumlah pegawai setempat pada akhir 2024 adalah 33 orang.

I.2. Aspek Strategis

INGGRIS



Tahun 2024 merupakan masa “*new normal*” di mana Inggris telah sepenuhnya lepas dari dampak pandemi Covid-19 dan aktivitas politik dan perekonomian berjalan sebagaimana sebelum pandemi, namun dampaknya antara lain inflasi dan biaya hidup yang melonjak tinggi

Di tahun 2024 merupakan “game changer” dalam dunia politik di Inggris yang menandai bergantinya pemerintahan dari Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun kepada Partai Buruh. Pada Pemilu 4 Juli, Partai Buruh di bawah pimpinan Sir Keir Starmer mendapatkan kemenangan telak dengan memperoleh 411 kursi atau naik 211 kursi dari Pemilu 2019, sementara Partai Konservatif di bawah pimpinan Rishi Sunak hanya memperoleh 121 kursi Westminster. Hasil ini menyebabkan tampuk pemerintahan berganti dari PM Rishi Sunak kepada PM Keir Starmer.

Perkembangan situasi politik, ekonomi, dan sosial pasca Pemilu mendorong adanya pergeseran fokus dari kebijakan luar negeri Inggris, terutama untuk menyelaraskan prioritas pemerintahan Partai Buruh yang menekankan pada pembenahan dan stabilitas ekonomi (disiplin fiskal, investasi sektor perumahan, perlindungan hak pekerja, pembangunan infrastruktur transportasi, komitmen energi bersih), kesehatan (perbaikan sistem National Health Service), pendidikan, dan keamanan nasional.

Kebijakan luar negeri Partai Buruh menekankan keinginan kuat mengatur kembali (reset) hubungan dengan Uni Eropa, memperkuat kemitraan dengan kawasan Afrika dan Global South, mendukung penanganan perubahan iklim, dan memastikan keamanan nasional. Terkait hubungan dengan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, Menlu Lammy tegaskan bahwa Asia Tenggara adalah kawasan yang penting bagi Inggris dilihat dari kepentingan Inggris yaitu pertumbuhan ekonomi, isu perubahan iklim dan keamanan. Bergabungnya Inggris ke dalam CPTPP pada 15 Desember 2024 semakin memperkuat upaya memperkuat hubungan perdagangan dengan kawasan Asia Tenggara di masa depan.

Di bidang ekonomi, Pemerintahan Inggris yang baru berupaya untuk keluar dari tekanan ekonomi berkelanjutan yang dihadapi Inggris.

Kondisi ini mendorong Pemerintahan PM Keir Starmer mengeluarkan kebijakan perpajakan yang cukup progresif untuk mendorong peningkatan pendapatan negara guna mendanai proyek pembangunan prioritas Inggris.

September 2024. Kedua negara juga berencana membuka perwakilan diplomatiknya, ditandai dengan Otoritas Palestina sendiri yang telah menunjuk Jillan Wahba Abdalmajid sebagai Dubes Palestina untuk Irlandia pada November 2024. Terkait konflik Ukraina-Rusia, Irlandia tegaskan komitmennya dukung Ukraina di mana Irlandia salah satu negara yang terbuka menerima pengungsi dan pencari suaka asal Ukraina. Irlandia juga sambut baik terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS dan siap perkuat hubungan bilateral memanfaatkan momentum 100 tahun hubungan diplomatik Irlandia-AS. Terkait konflik Timur Tengah, Irlandia harapkan transisi yang damai dan inklusif di Suriah dan dorong masa depan Suriah yang demokratis dan stabil. Terkait Lebanon, Irlandia sampaikan keprihatinan atas meluasnya ketegangan dan macam serangan Israel terhadap misi perdamaian PBB di Lebanon, di mana Irlandia menjadi salah satu kontributor misi penjaga perdamaian UNIFIL.

Secara umum, perekonomian Irlandia menunjukkan perkembangan stabil namun dengan beberapa sinyal yang patut diwaspadai di tahun 2024. Hal ini ditandai dengan inflasi yang rendah 1,4%, tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,8%, pendapatan negara surplus dari pajak korporasi senilai EUR 24 miliar, dan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 2,6% - (berdasarkan indikator MDD).

Di saat yang bersamaan, Irlandia juga dihadapkan pada kerentanan akibat fragmentasi politik global dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS). Dinamika politik global dan kebijakan Amerika Serikat dapat mempengaruhi keberlanjutan investasi perusahaan multinasional asal AS yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan Irlandia melalui pajak. Selain itu, Irlandia juga menghadapi keterbatasan infrastruktur yang kewalahan mengakomodir pertumbuhan ekonomi negara tersebut ke depan.

[REDACTED] Untuk mengatasi ini, Irlandia berupaya kuat untuk melakukan ekspansi ke luar wilayahnya sebagai bentuk diversifikasi pasar dan portofolio investasi.

Tantangan yang dihadapi Irlandia merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama yang lebih erat utamanya di bidang perdagangan dan investasi. Keinginan yang sama juga telah ditunjukkan Irlandia melalui sikap mereka yang mendukung penyelesaian *Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA). Selain itu, perusahaan Irlandia juga secara perlahan telah menunjukkan kesungguhan untuk berinvestasi di Indonesia. Setelah Kerry Group, di tahun 2024, Avia Solutions Group menjadi investor terkini Irlandia di Indonesia [REDACTED] yang menjadi bukti nyata realisasi arus FDI dari Irlandia ke Indonesia.



Pada tahun 2024, tema besar yang menjadi fokus IMO yaitu “*Navigating the future: safety first*” yang menekankan pentingnya keselamatan dalam semua aspek industri maritim sebagai prioritas utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa navigasi di laut dilakukan dengan aman, mengurangi risiko kecelakaan, dan melindungi nyawa. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peran strategis untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan dan revisi standar keselamatan maritim yang ada. Fokus pada keselamatan ini mencakup penguatan regulasi pencegahan kecelakaan, peningkatan kualitas konstruksi kapal, serta pelatihan dan sertifikasi pelaut yang lebih maju. Hal ini sejalan dengan kebutuhan global untuk

lebih mengintegrasikan teknologi canggih dalam sistem navigasi dan operasional kapal, yang kedepannya diharapkan akan mengurangi insiden dan meningkatkan efisiensi operasional.

I.2.1. Potensi/Peran Strategis

Tahun 2024 merupakan momen bersejarah bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Di tahun ini, Indonesia dan Inggris memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Di tengah dinamika global dan berbagai tantangan dalam negeri di negara akreditasi, KBRI London terus memastikan kerja sama di berbagai bidang prioritas dengan Inggris dan Irlandia tetap relevan dan berjalan dengan baik.

Salah satu fokus kerja sama dengan Inggris adalah kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk anti-terorisme, keamanan siber, keamanan maritim, dan kejahatan lintas negara, termasuk melalui pelatihan bersama dan saling kunjung delegasi. Indonesia juga terus mendorong peningkatan peran konkret Inggris sebagai mitra wicara ASEAN selaras dengan tiga pilar komunitas ASEAN.

Di bidang ekonomi, strategi tahun 2024 berfokus pada upaya mendukung pengembangan ekonomi nasional berbasis hilirisasi industri termasuk di dalamnya antara lain transisi energi, pendidikan tinggi, teknologi digital, dan kesehatan. Secara khusus, KBRI London juga berupaya memperkuat perannya sebagai koordinator dan fasilitator diplomasi ekonomi di negara akreditasi. KBRI London mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai institusi dan perusahaan Indonesia yang memiliki kerjasama dengan mitranya di Inggris dan Irlandia.

Melanjutkan pencapaian signifikan di tahun 2023, [REDACTED] KBRI London di tahun 2024 fokus pada pencapaian target dalam jangkauan untuk mendukung tindak lanjut Kemitraan Strategis RI – Inggris yang berakhir di tahun 2024.

Sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia dan Inggris di tahun 2024, KBRI London juga menjalankan strategi yang responsif. KBRI London secara periodik melakukan dialog aktif dengan para pemangku kepentingan dan memantau perkembangan situasi politik di Inggris dan Indonesia untuk memastikan keberlangsungan kerja sama berjalan efektif.

Hubungan bilateral Indonesia dengan Irlandia juga memiliki nilai strategis yang dapat dikapitalisasi lebih lanjut di tahun 2024. Hal ini mengingat pada tahun 2024, Indonesia dan Irlandia juga merayakan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Irlandia dengan visi *Global Ireland 2025* yang menempatkan Asia Pasifik sebagai salah satu prioritas. Modalitas lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah melalui aktivasi mekanisme konsultasi bilateral tingkat pasca penandatanganan MSP Mekanisme Konsultasi Bilateral pada September 2024 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara.

Kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan Irlandia dalam bidang teknologi informasi, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan perlu untuk terus dieksplorasi lebih mendalam. Irlandia selain sebagai pusat teknologi informasi di Eropa juga merupakan negara penghasil *startup* teknologi dan *fintech* yang memiliki minat untuk melakukan ekspansi ke Asia Tenggara melalui Indonesia. Irlandia dengan karakteristiknya yang terbuka dan posisi strategisnya di Uni Eropa serta hub bagi perusahaan modal ventura di kawasan Atlantik, membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama di sektor jasa teknologi informasi, pengembangan SDM, dan investasi.

Di sisi kerja sama ekonomi, terdapat ruang yang luas untuk peningkatan perdagangan dan mendorong adanya kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa. Hal ini merupakan peluang

untuk menjadikan Irlandia sebagai akses alternatif dan pendukung Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa serta menyeimbangkan neraca perdagangan.

Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Irlandia sepanjang 2024 yang terdiri dari Peluncuran Logo dengan tema “*Our Peoples, Our Connection, Our Future*” dalam format *IG Live* Dubes RI - Dubes Irlandia di Jakarta, Mei 2024; Penampilan bersama Dubes RI - *National Concert Hall Gamelan Orchestra* di Dublin, Mei 2024; penyelenggaraan *Indonesia - Ireland Financial Services and Investment Partnership Roundtable* (21 Oktober 2024); Resepsi Diplomatik pada 21 Oktober 2024 bertempat di *National Concert Hall* Dublin; dan Diskusi panel di *Royal College of Surgeons in Ireland* Dublin (22 Oktober 2024).

Pada Resepsi Diplomatik yang dihadiri oleh *Guest of Honour (GoH)* Mr. Charles Flanagan TD (*Chair of the Committee on Foreign Affairs and Defence, House of the Oireachtas* dan mantan Menlu Irlandia 2014-2017, saat Irlandia membuka Kedubesnya di Indonesia) menampilkan berbagai aspek budaya Indonesia, antara lain penampilan *NCH Gamelan Orchestra* yang dipimpin Peter Moran berkolaborasi dengan 2 (dua) orang Abdi Dalem Keraton Yogyakarta memanfaatkan kunjungan kerja mereka ke Dublin dalam rangka peringatan 10 tahun penyerahan gamelan sumbangan Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada NCH, menandai upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama di antara kedua negara, membuka jalan bagi lebih banyak kolaborasi di masa depan.

Perwakilan Irlandia sampaikan antara lain: mengakui saling pemahaman dan kerja sama kedua negara jauh meningkat dibandingkan tahun 1984 saat pembukaan hubungan diplomatik, kedua negara dan bangsa lebih terkoneksi meski secara geografis terpisah jauh, kerja sama pendidikan, budaya dan pariwisata perlu semakin ditingkatkan untuk terus hasilkan agen persahabatan, kesamaan nilai menggerakkan upaya bersama kedua negara di berbagai forum multilateral khususnya pada bidang perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan dan pendidikan, serta MoU Konsultasi Bilateral kiranya jadi momentum penguatan hubungan bilateral ke depan.

Dengan pendekatan yang adaptif dan proaktif, KBRI London berkomitmen untuk terus memajukan kepentingan Indonesia, khususnya selama tahun penting perayaan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia - Inggris dan 40 tahun hubungan bilateral Indonesia - Irlandia pada 2024.

Dari sisi kerja sama multilateral, keanggotaan Indonesia di Dewan IMO memiliki peran penting dalam pengembangan standar keamanan dan perlindungan lingkungan maritim internasional. Melalui partisipasi aktif, Indonesia mendukung implementasi konvensi seperti SOLAS dan MARPOL, yang tidak hanya memperkuat keselamatan perkapalan tetapi juga melindungi lingkungan laut. Kerja sama ini juga meningkatkan efisiensi operasional industri perkapalan Indonesia, menurunkan biaya operasional dan meningkatkan daya saing global. Selain itu, keanggotaan di IMO memfasilitasi peningkatan kapasitas nasional, meliputi teknologi perkapalan yang lebih ramah lingkungan dan pelatihan sumber daya manusia, memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri perkapalan nasional.

I.2.2. Tantangan Utama/ Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Tahun 2024 merupakan periode transisi yang menandakan pergantian pemerintahan dari Partai Konservatif ke Partai Buruh. Pada tahun 2024, melalui proses pemilu yang relatif cepat, rakyat Inggris memberikan mandat kepada Partai Buruh pimpinan Keir Starmer untuk memimpin Inggris dalam empat tahun ke depan.

menyambut baik adanya perubahan pemerintahan. Keberadaan pemerintahan baru Inggris

Perubahan pemerintahan di pertengahan tahun 2024 juga mendorong adanya pergeseran paradigma dan fokus kebijakan luar negeri Inggris. Secara tersurat, perubahan ini dapat terlihat dari kebijakan Inggris dalam konflik Israel-Palestina yang memberhentikan sementara penjualan senjata produksi Inggris ke Israel. Hal ini juga terjadi dikarenakan tekanan yang besar dari publik domestik kepada pemerintah Inggris untuk dapat menghentikan genosida di Gaza. Di luar isu Israel-Palestina, pemerintahan Partai Buruh masih memegang pakem tradisi kebijakan luar negeri Inggris yang menitikberatkan pada pertahanan-keamanan, multilateralisme, dukungan pembangunan, dan penguatan keberadaan perusahaan Inggris.

Selain itu, pergeseran juga terjadi dalam kebijakan luar negeri Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik, utamanya Indonesia. Indonesia secara khusus mendapat perhatian dari Pemerintah Inggris sebagai salah satu negara yang menjadi fokus penguatan hubungan bilateral di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy menegaskan bahwa Indonesia merupakan pemain kunci dalam upaya bersama mengatasi berbagai tantangan global.

Perkembangan ekonomi Inggris tahun 2024 menunjukkan adanya optimisme di kalangan bisnis. Meski demikian, Pemerintahan PM Keir Starmer memerlukan waktu untuk dapat melihat dampak dari kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pada akhir tahun 2024. Secara umum, Inggris masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ditandai dengan rendahnya produktivitas, ketimpangan di daerah, inflasi tinggi, dan biaya mobilitas tinggi.

Di sisi kebijakan, KBRI London terus memantau pengaturan teknis dari implementasi regulasi *Forest Risk Commodities (FRC)* terhadap komoditas ekspor Indonesia yang terdampak. Setelah penerbitan *Environment Act* di tahun 2021, Pemerintah Inggris telah menetapkan daging sapi, kulit, coklat, kelapa sawit, kopi, jagung, karet dan kedelai sebagai komoditas rentan menyebabkan deforestasi, alih status, dan degradasi lahan. Kebijakan ini mengharuskan importir di Inggris dapat memastikan produk yang mereka datangkan dari luar negeri telah memenuhi uji tuntas (*due diligence*) di negara asal. Sejauh ini, penelaahan atas dampak dari implementasi FRC terus dilakukan oleh institusi di Indonesia bersama dengan KBRI London.

Selain itu, kebijakan Inggris yang menekankan pada penguatan investasi domestik dan penggalangan modal yang ditujukan untuk mengembangkan industri di dalam negeri akan menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai investasi Inggris di Indonesia.

Sebagai implikasinya, cukup banyak proyek investasi yang ditawarkan
Dalam banyak kesempatan kondisi ini menyebabkan

Terkait hubungan dengan Irlandia, Intensitas pertemuan pejabat tinggi dan saling kunjung pejabat kedua negara memang belum terlalu tinggi namun diharapkan penandatanganan MoU Mekanisme Konsultasi Bilateral oleh Menlu RI-Irlandia pada September 2024 di New York dapat menjadi momentum penguatan interaksi bilateral kedua negara, khususnya di tingkat pejabat tinggi. Selain itu momentum peringatan 40 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Irlandia pada 2024 juga dapat dimanfaatkan untuk penguatan kerja sama di berbagai bidang ke depannya.

Di saat yang bersamaan, pada tahun 2025 Irlandia akan membentuk pemerintahan baru dan menunjuk Perdana Menteri baru menyusul hasil Pemilu November 2024 yang dimenangkan

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 disusun oleh KBRI London sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri. Sesuai Rencana Strategis KBRI London tahun 2020-2024 dan guna mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, serta Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yakni “Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” maka ditetapkan visi Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris serta penjabaran visi dan 5 misi sebagai berikut:

Visi KBRI London

“Terlaksananya diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Misi KBRI London

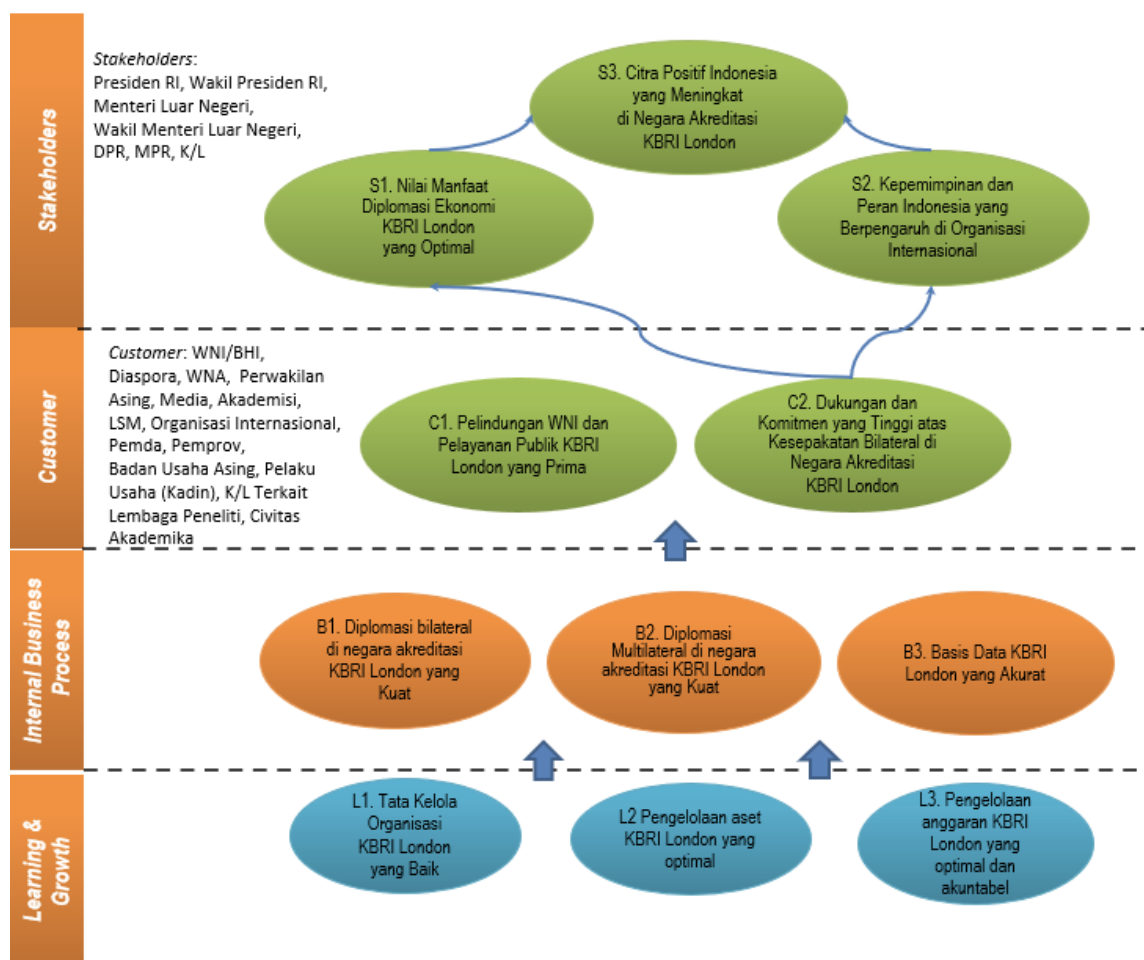
1. Meningkatkan peran KBRI London dalam memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak di negara akreditasi untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Memperkuat upaya perlindungan WNI dan BHI dan pelayanan publik di negara akreditasi guna memberikan rasa aman kepada seluruh WNI.
3. Memperkuat peran diplomasi KBRI London melalui sinergi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga integritas NKRI, serta meningkatkan citra positif Indonesia di negara akreditasi.
4. Memperkuat hubungan bilateral dengan negara akreditasi serta memajukan kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional.
5. Meningkatkan infrastruktur diplomasi KBRI London untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia.

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

Sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Luar Negeri, KBRI London telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai oleh segenap unsur Perwakilan yang menerima amanah/tanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dimaksud, KBRI London menetapkan Peta Strategis Tahun 2024 yang sesuai dengan mandat Pusat vide Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, yaitu melalui pendekatan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang terangkum dalam 4 (empat) Perspektif, 11 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja (IK). Keempat Perspektif dimaksud terdiri atas *Stakeholder Perspective* yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis; *Customer Perspective* yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis; *Internal Business Perspective* yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis serta *Learning and Growth Perspective* yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis.

Penetapan Kinerja Perwakilan RI London Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:



Nomor SS	Sasaran Strategis (SS)	Nomor IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Sub IKU	Target 2024
----------	------------------------	-----------	---	-------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI London yang Optimal	IK S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London	95%
		SUB IK 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London	8
		SUB IK 2	Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London	USD 1.400.000.000
		IK S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI London	93%
		SUB IK 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI London	7
		SUB IK 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI London	USD 300.000.000
		IK S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI London	92%
		SUB IK 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia	80%
		SUB IK 2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia	220.000 kunjungan
S.2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional	IK S.2.1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	90%

S.3	Citra positif Indonesia yang meningkat di negara akreditasi KBRI London	IK S.3.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI London	4,07 (skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI London yang prima	IK C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI London yang diselesaikan	92%
		IK C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI London	4 (Skala 4)
		IK C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI London	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI London	IK C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London	90%
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI London yang kuat	IK B.1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI London	7 Kesepakatan
		IK B.1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI London	6 Kesepakatan
		IK B.1.7	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi	5 Kunjungan
B.2	Diplomasi multilateral di negara akreditasi KBRI London yang kuat	IK B.2.1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	91%
		IK B.2.2	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	95%
B.3	Basis data KBRI London yang akurat	IK B.3.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI London yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%

		IK B.1.3	Nilai laporan data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI London	88
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
L.1	Tata kelola organisasi KBRI London yang baik	IK L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London	77,50 (BB)
L.2	Pengelolaan aset KBRI London yang optimal	IK L.2.1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI London	3,20 (Skala 4)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI London yang optimal dan akuntabel	IK L.3.1	Nilai IKPA KBRI London	93,49

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) KBRI London Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas KBRI London dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKj juga merupakan wujud dari capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana yang diterjemahkan dalam Peta Strategis KBRI London Tahun 2020 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja KBRI London tahun 2023 dilakukan melalui penghitungan realisasi Indikator Kinerja Utama (IK) berdasarkan target pada masing-masing perspektif dengan metode manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard*. Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, nilai capaian kinerja organisasi KBRI London untuk tahun 2024 mencapai 107,30% ("Istimewa"), Angka capaian kinerja tersebut merupakan akumulasi perhitungan capaian program kegiatan yang dikelompokkan dalam 4 Perspektif, yaitu (1) *Stakeholder Perspective* memberikan kontribusi capaian sebesar 109,87%; (2) *Customer Perspective* memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 107%; (3) *Internal Business Perspective* memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 107%; serta (4) *Learning and Growth Perspective* memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 105,61 %.

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Stakeholder Perspective</i>	25%	109,87%
<i>Customer Perspective</i>	15%	107,00%
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	107,00%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	105,61%
Nilai Capaian Kinerja Organisasi		107,30%

(1) *Stakeholder Perspective* memberikan kontribusi capaian sebesar 109,87%; (2) *Customer Perspective* memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 107%; (3) *Internal Business Perspective* memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 107%; serta (4) *Learning and Growth Perspective* memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 105,61%.

IK S.1.1

Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London

Capaian 110%**Realisasi 104,50%****Target 95%****SUB IK 1** Jumlah komitmen perdaganganCapaian **100%** | Realisasi **8** | Target **8****SUB IK 2** Nilai PerdaganganCapaian **115%** | Realisasi **\$1,61M** | Target **\$1,4M****IK S.1.2**

Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI London

Capaian 120%**Realisasi 120%****Target 93%****SUB IKU 1** Jumlah komitmen investasiCapaian **120%** | Realisasi **11** | Target **7****SUB IKU 2** Nilai investasiCapaian **120%** | Realisasi **\$ 626 jt** | Target **\$ 300 jt****IK S.1.3**

Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI London

Capaian 129,35%**Realisasi 119%****Target 92%****SUB IKU 1** Tingkat potensi kunjungan wisatawanCapaian **118,56%** | Realisasi **94,85%** | Target **80%****SUB IKU 2** Jumlah kunjungan wisatawanCapaian **120%** | Realisasi **393 ribu** | Target **220 ribu****IK S.2.1**

Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral

Capaian 105,56% | **Realisasi 95,45%** | **Target 92%****IK S.3.1**

Citra positif Indonesia yang meningkat di negara akreditasi KBRI London

Capaian 106,68% | **Realisasi 4,35/5** | **Target 4,07/5****IK C.1.1**

Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI London yang diselesaikan

Capaian 108,70% | **Realisasi 100%** | **Target 92%****IK C.1.2**

Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI London

Capaian 100% | **Realisasi 4/4** | **Target 4/4**

IK C.1.3

Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI London

Capaian 100% | Realisasi 4/4 | Target 4/4

IK C.2.1

Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London

Capaian 111,11% | Realisasi 100% | Target 90%

Internal Business Process

IK B.1.1

Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya

Capaian 120%

Realisasi 10

Target 7

IK B.1.2

Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim

Capaian 83,33%

Realisasi 5

Target 6

IK B.1.7

Intensitas saling kunjungan pejabat pemerintah Indonesia

Capaian 120%

Realisasi 10

Target 5

IK B.2.1

Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia

Capaian 109,89%

Realisasi 100%

Target 91%

IK B.2.2

Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral

Capaian 109,89%

Realisasi 100%

Target 95%

IK B.3.1

Persentase WNI di negara akreditasi KBRI London yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

Capaian 100%

Realisasi 100%

Target 100%

IK B.3.2

Nilai Laporan Data Economic Intelligence

Capaian 111,36% | Realisasi 98 | Target 88

Learning and Growth

IK L.1.1

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Capaian 102,58%

Realisasi 79,50 (BB)

Target 77,50 (BB)

IK L.2.1

Indeks Pengelolaan BMN KBRI London

Capaian 104,68%

Realisasi 3,35/4

Target 3,20/4

IK L.3.1

Nilai IKPA KBRI London

Capaian 106,52%

Realisasi 99,59

Target 93,49

S1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi Kawasan KBRI London yang Optimal

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan stakeholder sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Stakeholders Perspective terdiri dari 5 IK dan 6 Sub-IK, yaitu

1. IK S.1.1: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London
 - SUB IK 1: Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London
 - SUB IK 2: Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London
2. IK S.1.2: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI London
 - SUB IK 1: Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI London
 - SUB IK 2: Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI London
3. IK S.1.3: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI London
 - SUB IK 1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia
 - SUB IK 2: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia
4. IK S.2.1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral
5. IK S.3.1: Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI London

Analisis IK S1.1 – Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI London

Deskripsi IK

IK S1.1 sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IK ini secara

spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan.

IK ini memiliki 2 SUB IK, yakni:

1. SUB IK-1: Jumlah komitmen perdagangan, dengan bobot 70%

SUB IK ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis antara Indonesia dengan negara mitra yang memuat nilai perdagangan. Komitmen diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen perdagangan dihitung dari perolehan komitmen baru yang difasilitasi oleh KBRI London dari Januari-Desember tahun berjalan.

SUB IK-1 di bobotkan sebesar 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen perdagangan merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

2. SUB IK 2: Nilai perdagangan dengan negara mitra, dengan bobot 30%

SUB IK ini mengukur nilai perdagangan berupa ekspor yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan suatu negara akreditasi. Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi SUB IK 2 adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Sub IK 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian SUB IK dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Informasi Kinerja

Tabel III.S1.1.a
Capaian IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI London	Capaian SUB IK 1: Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London	8	70%
	Capaian SUB IK 2: Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London	USD 1.610.000.000	30%
Realisasi		104,50%	
Target		95%	
Capaian		110%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London adalah sebesar 104,50% dari target sebesar 95%, sehingga capaian IK sebesar 121% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IK S1.1 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IK 1 dan SUB IK 2. Pada tahun 2024, realisasi SUB IK 1 Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London adalah sebesar 8 dari target sebesar 8, sehingga memperoleh capaian IK sebesar 100%.

Perolehan komitmen perdagangan didominasi oleh sektor kertas, produk kehutanan, baja, dan pariwisata, dengan 4 komitmen dari total 8 komitmen yang berhasil disepakati dengan negara Akreditasi.

Realisasi SUB IK 2 Nilai perdagangan (total ekspor) dengan negara akreditasi KBRI London adalah sebesar USD 1.610.000.000 dari target sebesar USD 1.400.000.000 sehingga mencapai capaian sebesar 115%.

Tabel III.S1.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK		2020	2021	2022	2023	2024
S1.1	Target	N/A	N/A	90%	93%	95%
	Realisasi	N/A	N/A	116%	105,95%	104,50%
	Capaian	N/A	N/A	120%	113,93%	110%
SUB IK 1	Target	N/A	N/A	7	7	8
	Realisasi	N/A	N/A	9	13	8
	Capaian	N/A	N/A	120	120%	100%
SUB IK 2	Target	N/A	N/A	USD 2.270.000.000	USD 1.920.000.000	USD 1.400.000.000
	Realisasi	N/A	N/A	USD 2.450.000.000	USD 1.405.000.000	1.610.000.000
	Capaian	N/A	N/A	107,97%	73,18%	115%

IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London ini diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi dan ditajamkan kembali sehingga dapat mengukur proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh KBRI London. Untuk itu capaian IK di tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK di tahun 2022.

SUB IK 1 : Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IK 1 meningkat dari 7 komitmen pada periode sebelumnya menjadi 8 komitmen perdagangan di tahun 2024. Melalui sejumlah fasilitasi *business matching* serta partisipasi pada pameran internasional, KBRI London telah berhasil mendukung realisasi 8 komitmen perdagangan dengan negara akreditasi. Dari kesepakatan perdagangan dimaksud, telah diperoleh realisasi kinerja dalam jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London dengan capaian sebesar 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian SUB IK

Kinerja diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London menunjukkan efektivitas yang sangat baik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya koordinasi yang terjaga dengan baik antara *stakeholders* di dalam negeri dengan KBRI London dalam merealisasikan potensi bisnis yang ada antara Indonesia dengan Inggris.

Secara khusus, KBRI London juga mengupayakan peningkatan pendekatan kepada importir dan mitra perdagangan lainnya di Inggris dengan menggunakan momentum kehadiran pemerintah baru Inggris. Bekerjasama dengan Atase Perdagangan, KBRI London menangkap minat importir Inggris utamanya pada produk kayu dan olahan. Di luar produk kayu dan olahan, KBRI London juga telah mengupayakan komitmen perdagangan di sektor pariwisata antara *tour operator* Inggris dan Indonesia pada penyelenggaraan *Bali Beyond Travel Fair* (BBTF) 2024.

Selain itu, konsistensi partisipasi KBRI London dalam kegiatan pameran seperti *London Coffee Festival*, *Trade Expo Indonesia*, dan *Bali Beyond Travel Fair* (BBTF) Ikt mendorong keberhasilan pencapaian IK serta dalam menjaring sejumlah *buyer* produk komoditas utama Indonesia dan produk/jasa lainnya. Dalam hal ini, KBRI London memandang positif promosi komoditas ekspor potensial melalui partisipasi pameran berskala besar di Inggris dan Irlandia.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target jumlah komitmen perdagangan, antara lain:

- Pendekatan yang [REDACTED] usaha Indonesia terkadang mengurungkan niat dari mitra dan pembeli potensial di Inggris.
- Perubahan pajak dan aturan ekspor yang diterapkan pemerintah Indonesia terkadang terlambat diketahui oleh pelaku usaha di Inggris.
- [REDACTED] Hal ini utamanya disebabkan oleh hambatan pembiayaan perjalanan dan logistik bisnis dari Indonesia.
- Kurangnya *awareness* terkait komoditas Indonesia khususnya terkait sertifikasi kayu legal dan berkelanjutan (SVLK) dan FLEGT.
- Isu biaya logistik serta sertifikasi masih menjadi salah satu hambatan utama bagi importir Inggris.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih belum terpetakannya tindak lanjut peninjauan kerja sama yang dilakukan stakeholders di dalam negeri dengan mitranya di Inggris. Dalam kaitan dengan hal ini, identifikasi potensi komitmen perdagangan menjadi cukup penting untuk memaksimalkan peran KBRI London untuk mendukung realisasi kerja sama antara stakeholders di dalam negeri dengan mitra di Inggris.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh KBRI London adalah dengan melakukan pendekatan personal dan intensif kepada mitra potensial dari perusahaan, asosiasi, perbankan, dan perkumpulan bisnis di Inggris dan Irlandia. Selain itu, KBRI London juga terus memperkuat kolaborasi dengan kepentingan nasional yang berada di Inggris seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, serta BNI untuk memperkuat promosi dan identifikasi komitmen perdagangan yang terdapat di negara akreditasi.

Secara khusus, KBRI London juga terus menjaga hubungan baik dengan perusahaan dan pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan bisnis di Indonesia baik dalam bidang perdagangan maupun investasi. Dalam hal ini, KBRI London memanfaatkan pengalaman mereka untuk memperoleh masukan dan ikut mempromosikan perkembangan Indonesia kepada komunitas bisnis di negara akreditasi.

Upaya perbaikan yang mulai dilakukan KBRI London mendapatkan respon positif dari mitra di Inggris dan stakeholders di Indonesia dalam mendorong peningkatan komitmen perdagangan di negara akreditasi. Seiring dengan prioritas pemerintahan baru dan kebijakan ekonomi terkini Indonesia, KBRI London optimis dapat meningkatkan komitmen perdagangan dengan Inggris dan Irlandia melalui pelibatan peran dari para pemangku kepentingan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Realisasi IK jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi dicapai atas kerjasama KBRI London dengan Kantor Atase Perdagangan sebagai mitra utama. Hal ini juga didukung oleh mitra KBRI London lainnya seperti Bank Indonesia, BUMN, serta asosiasi bisnis komoditas dan lingkungan.

KBRI London bersama Atase Perdagangan juga berpartisipasi dalam kegiatan promosi tahunan yaitu *London Coffee Festival (LCF) 2024* yang diselenggarakan pada tanggal 11-14 April 2024 di *Truman Brewery*, London. Dalam kegiatan ini, PT. Pertamina dan Bank Indonesia London yang telah berhasil memfasilitasi promosi kopi UMKM Indonesia di Inggris serta 2 eksportir kopi Indonesia di Inggris dan Eropa yaitu Kopiteori, dan *homemade Indonesia*. Partisipasi KBRI London dalam LCF tahun 2024 telah menghasilkan potensi transaksi kopi Indonesia oleh Kopiteori dan homemade Indonesia kepada 10 pembeli potensial senilai USD 420,000.

Sebagai kegiatan rutin, KBRI London dan Atase Perdagangan juga terus aktif menghadirkan perusahaan buyers Inggris ke *Trade Expo Indonesia (TEI)* yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2024. Dari partisipasi KBRI London, terdapat 4 *buyer* Inggris yang berkunjung ke TEI 2024 yaitu Callington Ltd, Pacific Rim Wood, Firebird Precision Strip Ltd, Ecochoo. Penyelenggaraan TEI 2024 juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama perdagangan produk halal dengan menghadirkan 4 perwakilan lembaga sertifikasi halal di Inggris ke Indonesia. Pada kegiatan ini, telah dilaksanakan 3 penandatanganan MoU yaitu:

1. MoU Pembelian antara Callington Ltd dengan [REDACTED]
2. Kontrak pembelian antara Pacific Rim dengan [REDACTED]

3. Kontrak pembelian antara Pacific Rim dengan [REDACTED]
4. MoU Pembelian antara [REDACTED]
5. MoU Pembelian antara Echochoo dengan [REDACTED]

Selain itu, pada penyelenggaraan BBTF 2024, KBRI London juga telah mendorong adanya potensi komitmen perdagangan, yaitu:

1. Kesepakatan pembelian paket wisata antara Kuoni dengan Pramana Experience, Tana Dewa Resort, dan The Sira Luxury Collection [REDACTED]
2. Kesepakatan pembelian paket wisata antara THG Holidays dengan Tour East Indonesia, Ayodya Resort Bali, dan Wapa di Ume, [REDACTED]
3. Kesepakatan pembelian Freedom Destination antara Wapa di Ume dan Sudamala Resort, senilai USD 50 ribu.

Tabel Capaian Jumlah Kesepakatan Perdagangan KBRI London dengan Negara Akreditasi tahun 2023

No	Nama Kesepakatan	Nilai Transaksi	Keterangan Program
1	MoU Pembelian antara Callington Ltd dengan PT. Pindo Deli Pulp and Paper	[REDACTED]	Pembelian produk kertas
2	Kontrak pembelian antara Pacific Rim dengan PT. Kutai Timber	[REDACTED]	Pembelian produk kayu
3	Kontrak pembelian antara Pacific Rim dengan PT. Kayu Lapis Indonesia	[REDACTED]	Pembelian produk kayu
4	MoU Pembelian antara Firebird Precision Strip Ltd dengan BNM Stainless Steel	[REDACTED]	Pembelian produk baja
5	MoU Pembelian antara Echochoo dengan DSA Purworejo i	[REDACTED]	Pembelian produk kerajinan UKM Indonesia untuk industri wisata
6	Kesepakatan pembelian paket wisata antara Kuoni dengan Pramana Experience, Tana Dewa Resort, dan The Sira Luxury Collection	[REDACTED]	Paket wisata, pemasaran, dan penjualan
7	Kesepakatan pembelian paket wisata antara THG Holidays dengan Tour East Indonesia, Ayodya Resort Bali, dan Wapa di Ume	[REDACTED]	Paket wisata, pemasaran, dan penjualan
8	Kesepakatan pembelian Freedom Destination antara Wapa di Ume dan Sudamala Resort	[REDACTED]	Paket wisata, pemasaran, dan penjualan

Proyeksi Ke Depan

Proyeksi peningkatan komitmen perdagangan Indonesia dengan Inggris dan Irlandia memiliki peluang yang cukup terbuka. Hal ini juga sejalan dengan keinginan kuat dari pemerintah Indonesia yang menargetkan nilai ekspor sebesar USD 295,45 miliar di tahun 2025. Di saat yang bersamaan, pemerintah di negara akreditasi juga memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Secara khusus, Inggris menempatkan Indonesia sebagai salah satu fokus peningkatan perdagangan serta mitra penting di kawasan.

Perkembangan politik domestik yang terjadi di Inggris dan Irlandia memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan komitmen perdagangan Indonesia di dua negara tersebut. Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, pemerintahan baru Inggris memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Indonesia melalui berbagai pendekatan baru.

Salah satu pendekatan yang akan dikedepankan Inggris adalah dengan menggunakan rencana Indonesia untuk menjadi anggota *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP). Rencana masuknya Indonesia pada CPTPP telah menarik perhatian berbagai perusahaan dan sektor privat di Inggris. Selain itu, keberadaan kerangka penguatan kerjasama *Joint Economic and Trade Committee* (JETCO) akan terus ditindaklanjuti. Sementara dengan Irlandia, upaya menghadirkan komitmen perdagangan akan dilakukan dengan melibatkan Konsul Kehormatan Indonesia di Dublin dan *Irish-Indonesian Chambers of Commerce*.

Meski demikian, upaya peningkatan komitmen perdagangan dengan Inggris dan Irlandia sangat dipengaruhi perkembangan kebijakan Indonesia yang mendukung iklim usaha nasional. Kedua hal ini akan mempengaruhi daya saing produk Indonesia ke luar negeri dan mendukung minta pengusaha untuk melakukan ekspor. Selain itu, perkembangan perekonomian di Inggris dan Irlandia yang ditandai dengan [REDACTED] peningkatan komitmen perdagangan diperkirakan akan terjadi secara perlahan. Pada tahun 2025, KBRI London akan memperkuat *engagement* dan identifikasi sektor potensial di Inggris dan Irlandia untuk mempersiapkan kehadiran komitmen perdagangan konkret di tahun 2026.

Dokumentasi



Peresmian paviliun Indonesia di London Coffee Festival tahun 2024



Penandatanganan sejumlah MoU perdagangan Inggris-Indonesia pada Trade Expo Indonesia 9-12 Oktober 2024

SUB IK 2 : Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London

Neraca perdagangan Indonesia dengan Inggris dan Irlandia secara agregat menunjukkan perkembangan yang baik. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, total nilai perdagangan Indonesia dengan Inggris pada periode Januari-Oktober 2024 mencapai USD 2.37 miliar, naik 2.67% dari tahun 2023 senilai USD 2.31 miliar. Pada periode yang sama, nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai USD 201,9 juta mengalami penurunan 14.24% dari tahun 2023 senilai USD 235 juta. Pada tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Inggris dan Irlandia secara agregat mencapai USD 2,51 miliar, meningkat 20% dari tahun tahun sebelumnya yang mencapai USD 2.31 miliar.

Di tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke Inggris dan Irlandia menunjukkan tren fluktuatif serta corak yang berbeda antara satu negara dengan yang lain. Data Kementerian Perdagangan RI menunjukkan adanya peningkatan ekspor Indonesia ke Inggris mencapai USD 1.55 miliar dari tahun 2023 senilai USD 1.31 miliar. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Irlandia mengalami penurunan dari USD 94 juta di tahun 2023 menjadi USD 62.6 juta di tahun 2024. Agregat perdagangan Indonesia dengan Inggris dan Irlandia di tahun 2024 adalah sebesar USD 1.61 miliar.

Dengan demikian, setelah melihat data terkini dapat disimpulkan nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London telah memenuhi target baik ditinjau dari nilai perdagangan maupun ekspor.



NILAI PERDAGANGAN INDONESIA-INGGRIS
Periode Januari – Oktober 2024 (nilai Ribu US\$)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 19-23	Jan-Okt		Perub (%) 23/24
							2023	2024	
TOTAL PERDAGANGAN	2,400.1	2,239.8	2,567.8	2,698.7	2,690.2	4.23	2,317.4	2,379.3	2.67
MIGAS	1.4	14.2	1.7	1.7	1.9	-14.36	1.4	25.3	1,697.67
NON MIGAS	2,398.7	2,225.6	2,566.1	2,697.0	2,688.4	4.29	2,316.0	2,354.0	1.64
EKSPOR	1,351.5	1,283.4	1,477.1	1,658.9	1,521.7	5.06	1,311.0	1,553.0	18.46
MIGAS	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	17.8	0.4	2.2	455.47
NON MIGAS	1,351.1	1,283.1	1,476.7	1,658.4	1,521.0	5.06	1,310.6	1,550.7	18.33

IMPOR	1,048.6	956.4	1,090.7	1,039.8	1,168.5	3.05	1,006.4	826.3	-17.9
MIGAS	1	13.9	1.4	1.2	1.2	-19.45	1	23	2,198.91
NON MIGAS	1,047.6	942.5	1,089.3	1,038.6	1,167.4	3.18	1,005.4	803.3	-20.11
NERACA PERDAGANGAN	302.9	327	386.3	619.2	353.1	9.92	304.6	726.7	138.61
MIGAS	-0.7	-13.5	-1.1	-0.7	-0.5	29.13	-0.6	-20.8	-3,378.32
NON MIGAS	303.5	340.6	387.4	619.8	353.7	9.47	305.2	747.5	144.94



NILAI PERDAGANGAN INDONESIA-IRLANDIA
Periode Januari – Oktober 2024 (nilai Ribu US\$)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 19-23	Jan-Okt		Perub (%) 23/24
							2023	2024	
TOTAL PERDAGANGAN	220.7	209.7	231.5	261.3	280.4	7.24	235.5	201.9	-14.24
MIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	66.09
NON MIGAS	220.7	209.7	231.5	261.3	280.4	7.24	235.4	201.9	-14.25
EKSPOR	71.4	76.2	94.9	96.2	114.4	12.48	94	62.6	-33.39
MIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	15,770.45
NON MIGAS	71.4	76.2	94.9	96.2	114.4	12.48	94	62.6	-33.42
IMPOR	149.3	133.5	136.6	165.1	166	4.34	141.5	139.3	-1.52
MIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.42
NON MIGAS	149.3	133.5	136.6	165.1	166	4.33	141.5	139.3	-1.51
NERACA PERDAGANGAN	-78	-57.3	-41.7	-68.9	-51.7	6.19	-47.5	-76.7	-61.53
MIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	170.69
NON MIGAS	-78	-57.3	-41.7	-68.9	-51.6	6.2	-47.5	-76.8	-61.65

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian SUB IK

Target nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi dapat terpenuhi dikarenakan adanya kebutuhan terhadap produk kayu dan kertas dari Inggris yang mengakselerasi realisasi ekspor di tahun 2024. Hal lain yang ikut mendorong *repeat order* dari importir produk kayu dan kertas di Inggris adalah adanya pemenuhan standar produk Indonesia terutama lingkungan disertai harga yang kompetitif dan kualitas yang prima.

Selain itu, berkaca dari perkembangan politik-ekonomi di negara akreditasi, KBRI London menetapkan target nilai perdagangan yang realistis di tahun 2024. Dalam hal ini, terdapat indikasi kuat dari pelaku usaha dan perusahaan di negara akreditasi, terutama Inggris yang melakukan penundaan transaksi bisnis menunggu hasil perkembangan politik di dalam negeri.

Secara umum, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London sangat sensitif terhadap dinamika politik-ekonomi domestik. Kondisi politik yang terjadi di Inggris dan Irlandia selama 4 tahun ke belakang ditandai dengan lesunya permintaan konsumen domestik seiring meningkatnya krisis biaya hidup dan inflasi serta tingginya tekanan pada bisnis [REDACTED] sehingga menghambat aktivitas secara umum. Kondisi ini terefleksi ke dalam nilai perdagangan dengan Indonesia yang mengalami tren fluktuatif.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, antara lain:

- Perkembangan politik yang terjadi baik di Indonesia, Inggris, dan Irlandia terutama di tengah tahun politik-pelaksanaan politik.
- Secara khusus, interval transisi pemerintahan di Indonesia yang cukup panjang dari pengumuman hasil pemilihan hingga pelantikan Presiden RI, mendorong adanya aksi *wait and see* dari pelaku usaha di negara akreditasi.
- Belum terdapat perubahan signifikan dari kondisi sosial dan ekonomi di Inggris. Krisis biaya hidup dan penurunan daya beli masyarakat masih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan nilai perdagangan dengan Inggris dan Irlandia.
- Biaya logistik yang semakin tinggi akibat krisis geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur menjadikan ekspor Indonesia menjadi kurang kompetitif.
- Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah telah menambah beban bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi barang untuk tujuan ekspor.

Upaya Perbaikan

Setelah menelaah dinamika yang terdapat di Indonesia, Inggris, dan Irlandia serta tantangan dalam upaya meningkatkan perdagangan, upaya perbaikan yang akan menjadi bagian dari rencana di tahun 2024, antara lain:

- Melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah Inggris untuk mendapatkan perkembangan dari implementasi uji tuntas (*due diligence*) pasca penerapan regulasi FRC.
- Melakukan promosi produk dan jasa dari Indonesia dengan menysasar konsumen serta perusahaan yang lebih terarah.
- Melakukan sinergi dan saling dukung pelaksanaan kegiatan yang memiliki tujuan serta beririsan dengan pemangku kepentingan di Indonesia dan mitra dari Inggris.

Setelah menelaah dinamika yang terdapat di Indonesia, Inggris, dan Irlandia serta tantangan dalam upaya meningkatkan perdagangan, upaya perbaikan yang akan menjadi bagian dari rencana di tahun 2025, antara lain:

- Mendorong adanya *repeat order* dari importir produk-produk Indonesia di Inggris dan Irlandia secara lebih berkelanjutan.
- Melakukan promosi produk dan jasa dari Indonesia dengan menasar konsumen serta perusahaan secara terarah, salah satunya dengan mendekati toko-toko dan distributor produk oriental di Inggris.
- Melakukan sinergi dan saling dukung pelaksanaan kegiatan yang memiliki tujuan serta beririsan dengan pemangku kepentingan di Indonesia dan mitra dari Inggris.
- Melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah Inggris untuk mendapatkan perkembangan terkini dari implementasi uji tuntas (*due diligence*) pasca penerapan regulasi FRC.

Proyeksi Ke Depan

Proyeksi peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan Inggris dan Irlandia akan berada pada nilai yang tidak terlalu jauh dari yang telah dicapai pada tahun 2023 dan 2024. Dalam hal ini nilai perdagangan Indonesia, utamanya ekspor dengan negara akreditasi KBRI London akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Beberapa hal yang akan mewarnai kegiatan peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London, utamanya Inggris, yaitu:

- Proses konsolidasi politik di Indonesia yang berjalan dinamis akan mempengaruhi pandangan pelaku usaha di negara akreditasi KBRI London, terutama dari sisi penegakan hukum dan pelestarian lingkungan.
- Peningkatan biaya produksi dan logistik bagi pelaku usaha nasional akan mempengaruhi daya saing produk Indonesia di Inggris dan Irlandia.
- Inisiatif baru sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan PM Keir Starmer akan memberikan sinyal positif di tahun 2025.
- Perbaikan dan upaya menghadirkan *quick win* pada pemerintahan baru di Indonesia dan Inggris untuk mendukung daya saing industri diperkirakan akan meningkatkan nilai perdagangan kedua negara pada kuartal ketiga tahun 2025, meski tidak dalam jumlah yang fantastis.

Mempertimbangkan proyeksi berdasarkan dinamika politik dan ekonomi, nilai perdagangan (ekspor) Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London akan dihadapkan pada skenario moderat dengan persentase peningkatan yang terdapat pada rentang 0.83% dengan nilai sekitar USD 1.41 miliar selama tiga tahun ke depan.

Dokumentasi



Atase Perdagangan KBRI London berikan paparan terkait hubungan perdagangan Indonesia-Inggris pada kegiatan *Manchester Outreach*



Indonesia Pavilion Dalam London Coffee Festival 2024

Analisis IK S1.2 – Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI London

Deskripsi IK

IK ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang investasi agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. SUB IK ini secara spesifik mengukur *value* yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi.

IK ini memiliki 2 SUB IK, yakni:

1. SUB IK-1: Jumlah komitmen investasi, dengan bobot 70%

SUB IK ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis antara Indonesia dengan negara mitra yang memuat nilai investasi *inbound*. Komitmen diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung dari perolehan komitmen baru yang difasilitasi oleh KBRI London dari Januari - Desember tahun berjalan.

SUB IK-1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen investasi merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

2. SUB IK 2: Nilai investasi dengan negara mitra, dengan bobot 30%

SUB IK ini mengukur nilai investasi *inbound* yang terealisasi (dalam mata uang USD) untuk suatu negara akreditasi di suatu tahun. Pencapaian target IK ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dan intensif antara Perwakilan RI dengan entitas yang bernaung dalam Indonesia Incorporated (ITPC, IIPC) di negara tersebut. Realisasi SUB IK 2 adalah perolehan nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

Sub IK 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian SUB IK dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Informasi Kinerja

Tabel III.S1.2.a
Capaian IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI London	Capaian SUB IK 1: Jumlah komitmen investasi	11	70%
	Capaian SUB IK 2: Nilai investasi dengan negara mitra	USD 626.550.000	30%
Realisasi		120%	
Target		93%	
Capaian		120%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI London adalah sebesar 120% dari target sebesar 93%, sehingga capaian IK sebesar 122,58% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IK S1.2 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IK 1 dan SUB IK 2. Pada tahun 2024, realisasi SUB IK 1 Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI London adalah sebesar 11 dari target sebesar 7, sehingga capaian IK sebesar 129,35% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perolehan komitmen investasi didominasi oleh sektor migas, kesehatan, dan energi terbarukan, dengan 6 komitmen dari total 11 komitmen yang berhasil disepakati dengan negara akreditasi.

Tabel III.S1.2.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK		2020	2021	2022	2023	2024
S1.1	Target	N/A	N/A	86%	90%	93%
	Realisasi	N/A	N/A	120%	114%	120%
	Capaian	N/A	N/A	120%	120%	120%
SUB IK 1	Target	N/A	N/A	4	6	7
	Realisasi	N/A	N/A	10	8	11
	Capaian	N/A	N/A	120%	120%	120%
SUB IK 2	Target	N/A	N/A	USD235,52 juta	USD 300.000.000	USD 300.000.000
	Realisasi	N/A	N/A	USD508,13 juta	USD 300.003.100	USD 626.550.000
	Capaian	N/A	N/A	120%	100%	120%

IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan negara akreditasi KBRI London ini diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi dan ditajamkan kembali sehingga dapat mengukur proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh KBRI London. Untuk itu capaian IK di tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian IK di periode 2022-2023.

SUB IK 1 Jumlah komitmen investasi

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, target SUB IK 1 mengalami peningkatan target menjadi 7 dari 6 pada tahun 2023. Sedangkan untuk realisasi SUB IK 1 mengalami peningkatan menjadi 11 dari 8.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Kinerja diplomasi ekonomi untuk memenuhi target jumlah komitmen investasi dari Inggris dan Irlandia di tahun 2024 melampaui ekspektasi. Tantangan besar yang terjadi di tengah tahun politik di Indonesia dan negara akreditasi mendorong KBRI London untuk menetapkan target yang realistis namun tetap tanggap terhadap potensi adanya *final investment decision* dari kalangan investor. Dalam hal ini, pada semester pertama 2024, terdapat inisiatif kuat dari pemangku kepentingan di dalam negeri untuk dapat mendorong komitmen investasi dari luar negeri, termasuk di Inggris. Inisiatif yang dilakukan Pusat dengan fasilitasi KBRI London membawa dampak yang positif. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo Subianto di akhir tahun 2024 berhasil menambah elemen pendorong bagi perusahaan untuk menyampaikan komitmen investasi mereka di Indonesia.

Di saat yang bersamaan, di tahun 2024, KBRI London bersama dengan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) menyelenggarakan Indonesia Investment Forum (IIF) 2024 yang disambut sangat baik oleh pemangku kepentingan di Inggris. Selain itu, memanfaatkan kehadiran Presiden RI, KBRI London juga menyelenggarakan *CEO Roundtable Forum* yang diikuti oleh 18 pemimpin perusahaan, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi di Inggris. Penyelenggaraan *CEO Roundtable Forum* dan IIF berhasil meyakinkan perusahaan-perusahaan di negara akreditasi untuk melakukan investasi di Indonesia.

Elemen-elemen pendukung lain adalah mayoritas perusahaan-perusahaan di negara akreditasi umumnya telah memiliki bisnis dan sebelumnya telah melakukan studi terkait peluang investasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memahami seluk beluk dan percaya diri dapat meraih keuntungan di Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Selama tahun 2024, tantangan yang dihadapi dalam memenuhi target komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI London, antara lain:

- Dinamika politik-ekonomi yang kompleks telah memberikan gambaran proyeksi perkembangan ekonomi di Inggris dan Irlandia tidak menentu. Kondisi ini menjadi tantangan bagi KBRI London dalam membaca perkembangan yang berubah sangat cepat.
- Upaya mendorong komitmen investasi dari Inggris dan Irlandia memerlukan waktu tidak sebentar, sehingga memerlukan pendekatan ekstra kepada calon investor.
- Kompleksitas perizinan investasi di Indonesia membingungkan calon investor dari negara akreditasi. Beberapa calon investor yang telah melakukan kunjungan lapangan ke Indonesia menyampaikan perlu melakukan penelaahan kembali terkait rencana investasi mereka di Indonesia.

Upaya menghadirkan komitmen investasi dari negara akreditasi KBRI London membutuhkan waktu yang lama dan perencanaan jangka Panjang. Selain itu, dinamika politik di negara akreditasi, kesiapan pemilik proyek investasi, dan implementasi peraturan kemudahan usaha di Indonesia menjadi beberapa elemen kunci yang menjadi perhatian KBRI London selama tahun 2024.

Upaya Perbaikan

Setelah mempelajari tantangan dari pelaksanaan diplomasi ekonomi dalam mendorong kehadiran komitmen investasi dari negara akreditasi, upaya perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain:

- Menjaga hubungan baik dengan perusahaan di negara akreditasi yang telah melakukan investasi di Indonesia untuk mendorong adanya perluasan investasi dalam jangka panjang.
- Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh calon investor.
- Mengintensifkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dan negara akreditasi untuk mengidentifikasi potensi investasi di Inggris dan Irlandia.
- Mengikutsertakan partisipasi institusi di Indonesia dan negara akreditasi KBRI London dalam kegiatan promosi investasi, utamanya untuk menjelaskan kemudahan berinvestasi di Indonesia dari perspektif hukum, politik, ekonomi, dan perbankan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Pada tahun 2024, KBRI London telah mengidentifikasi 11 komitmen investasi, yaitu:

1. Investasi Avia Solutions Group pada [REDACTED]
2. Investasi British Petroleum pada proyek *Capture, Utilization, and Storage (CCUS)* [REDACTED]
3. Investasi King's College London pada pembukaan kampus di KEK Singhasari Malang, Jawa Timur.
4. Investasi Unilever pada proyek pembangunan fasilitas [REDACTED]
5. Investasi Bhumi Varta Technology (PMA) bidang [REDACTED] Banten.
6. Investasi Specwall UK dalam [REDACTED] Tengah.
7. Investasi PZ Cussons [REDACTED]
8. [REDACTED] nya di Indonesia melalui pendanaan [REDACTED]
9. Investasi Swire Pacific pada [REDACTED]
10. Investasi Diageo [REDACTED]
11. Investasi Ashmore (inisial) [REDACTED]

Proyeksi Ke Depan

Pada periode 2025-2026, proyeksi pemenuhan komitmen investasi ke depan akan diwarnai beberapa hal yaitu:

- Peningkatan minat perusahaan-perusahaan *existing* Inggris dan Irlandia untuk memperluas investasi mereka di Indonesia, meski tidak dalam jumlah yang signifikan.
- Sektor investasi di bidang energi baru terbarukan, mineral kritis, kesehatan, makanan, pariwisata, digital, logistik, dan IT diproyeksikan tetap menjadi sasaran dari investor dari Inggris dan Irlandia.
- Perusahaan dan investor potensial akan kembali mempelajari perkembangan politik-ekonomi yang terjadi di Indonesia sebelum memutuskan melakukan investasi.
- Kecenderungan kebijakan investasi yang inward looking dari negara akreditasi KBRI London, utamanya Inggris.

Selain itu, penurunan daya beli masyarakat, berkurangnya kelas menengah di Indonesia, serta dinamika geopolitik dunia diperkirakan akan mewarnai minat investor dari Inggris dan Irlandia. Meski menghadapi tantangan yang tidak mudah, berbagai upaya pendekatan yang telah dilakukan KBRI London diharapkan dapat membuahkan hasil di periode 2026-2027.

Dokumentasi



Pertemuan Dubes RI dengan CEO PZ Cussons



Business Roundtable di sela-sela Indonesia Investment Forum 2024



Pertemuan Menteri Investasi RI dan Inggris di Raffles OWO, London



Kegiatan Indonesia-Ireland Financial Services and Investment Partnership Roundtable

SUB IK 2 Nilai investasi dengan negara mitra

Di tahun 2024, KBRI London telah menetapkan target serupa dengan target tahun 2023 sebesar USD 300.000.000. Penetapan ini merupakan refleksi capaian nilai investasi dari Inggris dan Irlandia di tahun 2023 yang menghadapi tantangan kompleks pasca pandemi Covid-19. Selain itu, nilai investasi dari negara akreditasi KBRI London cenderung mengalami tren fluktuatif dalam kurun empat tahun terakhir.

Realisasi IK nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI London adalah sebesar USD 626.550.000 dari target sebesar USD 300.000.000. Dari realisasi tersebut, capaian IK terkait nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI London adalah sebesar 208.85% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Berdasarkan data Kementerian Investasi per kuartal III tahun 2024, Inggris menempati peringkat ke-11 dalam daftar negara asal realisasi investasi asing di Indonesia, sementara Irlandia menempati peringkat ke-36. Di kawasan Eropa, Inggris menempati posisi kedua asal investasi terbesar setelah Belanda.

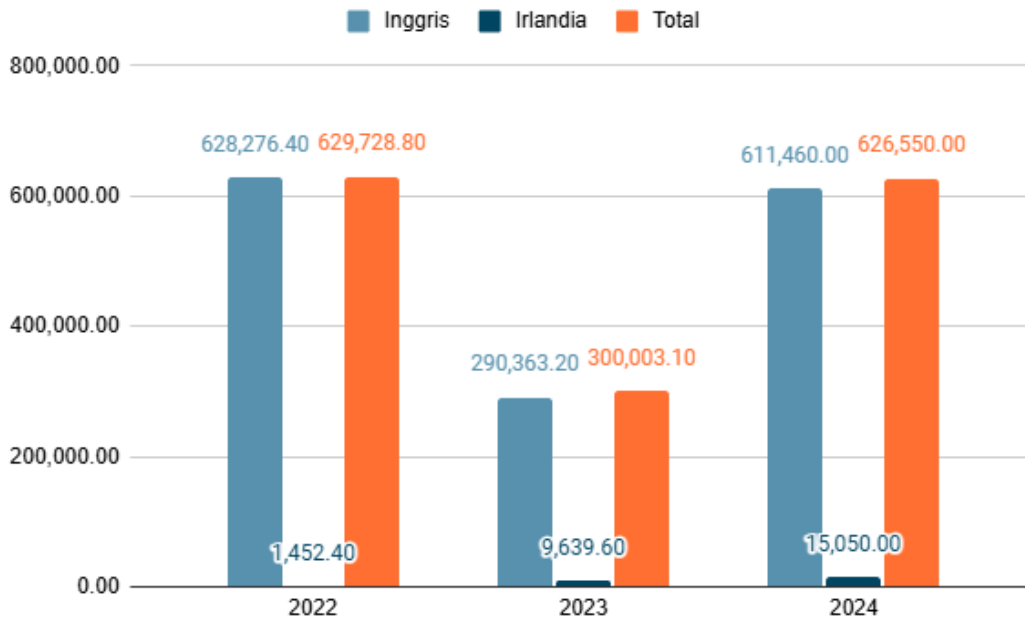
Nilai investasi Inggris pada periode Januari-September 2024 mencapai USD 611.5 juta meningkat pesat dari periode sebelumnya sebesar USD 290.3 juta. Dari pengamatan KBRI London, peningkatan investasi terjadi disebabkan adanya peningkatan nilai investasi di sektor pertambangan. Peningkatan investasi di sektor pertambangan di Indonesia juga disebabkan kebijakan hilirisasi dan penerapan insentif bagi produsen mobil listrik yang berinvestasi di Indonesia.

Nilai investasi Irlandia pada periode Januari-September 2024 mencapai USD 15.05 juta, naik 55.8% dari periode yang sama sebelumnya. Kenaikan yang cukup signifikan juga didorong oleh keberadaan investasi pengembangan bisnis transportasi udara yang dilakukan oleh *Avia Solutions Group* melalui BBN Airlines yang tercatat di tahun 2024. Irlandia merupakan pusat dari pengembangan bisnis transportasi udara terutama terkait pengadaan, pendanaan, dan leasing.

**Tabel Realisasi Investasi Negara Akreditasi KBRI London
Periode Januari - September tahun 2022 - 2024**

Negara	Realisasi Investasi (hingga kuartal III tahun 2024)					
	2022		2023		2024	
	Proyek	Nilai (US\$ Ribu)	Proyek	Nilai (US\$ Ribu)	Proyek	Nilai (US\$ Ribu)
Inggris	908	628,276.4	1,536	290,363.2	7,681	611,460
Irlandia	41	1,452.4	74	9,639.6	402	15,050
Total	949	629,728.8	1,610	300,003.1	8,083	626,550

**Grafik Realisasi Investasi Negara Akreditasi KBRI London
Periode Januari - September tahun 2022 – 2024**



Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian SUB IK

Secara umum, upaya memenuhi target nilai investasi dari Inggris dan Irlandia ke Indonesia telah berhasil dilaksanakan secara optimal serta telah memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan dalam memenuhi target nilai investasi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah adanya realisasi komitmen investasi dan pengembangan bisnis yang dilakukan perusahaan besar Inggris dan Irlandia ke Indonesia. Investasi perusahaan-perusahaan Inggris dan Irlandia telah memberikan dampak positif terhadap capaian nilai investasi KBRI London.

Faktor lain penyebab tercapainya target nilai investasi adalah kerja sama yang erat antara KBRI London dengan institusi di dalam negeri untuk mengawal proyek-proyek investasi Inggris di Indonesia. Tren ekonomi di kawasan Eropa yang menekankan pada aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan transisi energi juga menjadi faktor pendukung peningkatan nilai investasi dari Inggris dan Irlandia secara signifikan.

Kendala dan Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam memenuhi nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI London, antara lain:

- Proses transisi pemerintahan di negara akreditasi, terutama Inggris yang membutuhkan waktu untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat.
- Perkembangan politik dan penegakan hukum di Indonesia yang menjadi perhatian pelaku usaha serta investor di Inggris dan Irlandia.
- Kenyataan cukup rumitnya mekanisme dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia bagi calon investor, utamanya bagi perusahaan skala kecil dan menengah, namun memiliki modal untuk melakukan ekspansi

Upaya Perbaikan

Setelah mempelajari tantangan memenuhi target nilai investasi dari negara akreditasi, beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan, antara lain:

- Memperkuat kolaborasi promosi investasi dengan mitra pemerintah, asosiasi bisnis, dan perusahaan di negara akreditasi.
- Menindaklanjuti rencana investasi perusahaan Inggris dan Irlandia secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, utamanya di sektor migas, kesehatan, pendidikan, energi terbarukan, dan IT.
- Melakukan pendekatan terhadap perwakilan pemerintah di negara akreditasi untuk menyelaraskan prioritas antara Indonesia dengan Indonesia dan Inggris periode 2025-2026.
- Mempersiapkan briefing kepada investor potensial mengenai perkembangan kebijakan di bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan tema-tema lain terkait dengan investasi.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam upaya meningkatkan nilai investasi dengan Inggris dan Irlandia, KBRI London telah melaksanakan sejumlah kegiatan yaitu:

1. Penyelenggara *Business Outreach "Indonesia Your Gateway for Growth is South East Asia"* di Manchester, Maret 2024.
2. Penyelenggaraan *Business Outreach "Gateway to Southeast Asia-Unlocking Indonesia's Market Potential"* di Glasgow, Oktober 2024.
3. Penyelenggaraan *Indonesia-Ireland Financial Services and Investment Partnership Roundtable* di Dublin, Oktober 2024.
4. Penyelenggaraan Indonesia Investment Forum (IIF) 2024 di London, November 2024.
5. Penyelenggaraan *CEO Roundtable Forum di London*, November 2024.
6. Penyelenggaraan *Business Forum: Tech Opportunities in Indonesia* di London, April 2024.
7. Penyelenggaraan *Roundtable on Energy Transition in Indonesia* di London, Juni 2024.
8. Penyelenggaraan Kadin Fintech Dialogue bekerja sama dengan Kadin, Juni 2024.
9. Penyelenggaraan KEK Business Forum bekerja sama dengan Dewan KEK dan Kemenkopereekonomian RI, April 2024.

Proyeksi Ke Depan

Nilai investasi dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini diperkirakan terjadi setelah melihat tren fluktuatif dari nilai investasi Inggris ke Indonesia. Pada tahun 2024 telah terjadi kenaikan nilai investasi signifikan sebesar USD 611.46 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 386 juta. Kenaikan ini diperkirakan akan mengalami penurunan sebagaimana yang pernah terjadi pada periode 2022-2023. Selain itu, perkembangan kebijakan Amerika Serikat dalam Pemerintahan Donald Trump dan pertumbuhan ekonomi global yang stagnan menjadi tantangan riil bagi realisasi investasi dari Inggris dan Irlandia. Oleh karena itu, pada periode 2025-2027 nilai investasi Inggris dan Irlandia akan mencari titik equilibrium menuju pertumbuhan yang lebih stabil.

Selain itu, konsistensi kebijakan, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing di dalam negeri akan sangat diharapkan terwujud oleh investor. Pemenuhan target nilai investasi

di tahun 2025 diperkirakan akan dipengaruhi beberapa hal, yaitu:

- Konsistensi kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia di bidang energi, kesehatan, dan mineral kritis dalam memberikan kejelasan bagi investor, utamanya terkait kemudahan perizinan.
- Konsolidasi politik-ekonomi pemerintah Indonesia untuk mendukung kebijakan hilirisasi yang selaras dengan ketentuan hukum dan ramah terhadap investor.
- Kebijakan pemerintah baru Inggris dan Indonesia pasca pemilu di tahun 2024.
- Kapabilitas perusahaan Inggris dalam menghadapi kebijakan perpajakan terkini dan keluwesan untuk memanfaatkan inisiatif permodalan yang disiapkan Pemerintahan Keir Starmer.
- Tindak lanjut dan realisasi komitmen investasi antara Indonesia dengan mitranya di Inggris serta Irlandia.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, meski menghadapi tantangan yang sangat berat, namun KBRI London cukup optimis dapat mendukung realisasi investasi yang telah dirintis dari beberapa tahun sebelumnya.

Dokumentasi



Kegiatan CEO Roundtable di sela-sela kunjungan Presiden RI ke Inggris



Kegiatan *Manchester Outreach* di *Greater Manchester Chamber of Commerce*, Manchester



Kegiatan *Indonesia Investment Forum 2024*, di *Raffles OWO*, London

Analisis IK S1.3 – Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI London

Deskripsi IK

IK S1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI London sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

IK ini memiliki 2 SUB IK, yakni:

1. SUB IK-1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, dengan bobot 70%

Salah satu output diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemenlu adalah promosi pariwisata. IK ini mengukur efektivitas penyelenggaraan promosi tersebut dengan mengukur seberapa tinggi minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/berpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Kemenlu atau event promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Kemenlu turut menjadi peserta event.

SUB IK ini mengukur wisatawan mancanegara yang memiliki ekspektasi tinggi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Level ekspektasi diukur dengan suatu angka antara 1 - 5, dimana 5 adalah level yang menunjukkan responden sangat setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia, dan level 1 adalah level yang menunjukkan responden sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Ekspektasi tinggi ditunjukkan pada level 4 – 5.

SUB IK 1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

2. SUB IK 2: Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, dengan bobot 30%

SUB IK 2 menunjukkan jumlah total warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia.

SUB IK 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IK dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, Pemda, masyarakat dll) dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Informasi Kinerja

Tabel III.S1.3.a
Capaian IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Tingkat Efektivitas Diplomasi Pariwisata di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI London	Capaian SUB IK 1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia	94.85%	100%
	Capaian SUB IK 2: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia	393.461 kunjungan	0
Realisasi		119%	

Target	92%
Capaian	129.35%
Batas Toleransi	120%

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI London adalah sebesar 119% dari target sebesar 92%, sehingga capaian IK sebesar 129,35% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IK S1.3 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IK 1 dan SUB IK 2. Pada tahun 2024, realisasi SUB IK 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia adalah sebesar 94,85% dari target sebesar 80%, sehingga capaian IK sebesar 129,35% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi SUB IK 2 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia adalah sebesar 393.461 dari target sebesar 220.000 kunjungan, sehingga capaian IK sebesar 178,85 % dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Tabel III.S1.3.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK		2020	2021	2022	2023	2024
S1.1	Target	N/A	N/A	86%	90%	92%
	Realisasi	N/A	N/A	120%	115%	119%
	Capaian	N/A	N/A	120%	120%	129,35%
SUB IK 1	Target	N/A	N/A	75%	75%	80%
	Realisasi	N/A	N/A	96,57%	84,91%	94,85%
	Capaian	N/A	N/A	120%	113,21%	118,56%
SUB IK 2	Target	N/A	N/A	7500 wisatawan	120.000 wisatawan	220.000
	Realisasi	N/A	N/A	136.657 wisatawan	315.071 wisatawan	393.461 wisatawan
	Capaian	N/A	N/A	120%	120%	178,85%

SUB IK 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia

Jika dibandingkan dengan periode 2022-2023, target SUB IK 1 mengalami peningkatan target menjadi 220.000 wisatawan dari 120.000 wisatawan (2023) dan 7.500 wisatawan (2022). Peningkatan target ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2023 dan kebijakan pemulihan ekonomi melalui pariwisata yang diusung oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk realisasi SUB IK 1 mengalami peningkatan menjadi 393.461 wisatawan dari 315.071 pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh kebijakan normalisasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang melibatkan peserta dari luar negeri.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Lonjakan kunjungan wisatawan asal Inggris dan Irlandia ke antara lain disebabkan perkembangan positif yang terjadi di Indonesia. Pembukaan Bali dan pengembangan destinasi pariwisata merupakan perkembangan yang berdampak positif bagi pariwisata Indonesia. Selain itu, penerapan program *golden visa* bagi investor, pensiunan, dan digital nomad menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan asing, utamanya yang berasal dari Inggris.

Selain itu, dukungan yang optimal dari KBRI London melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan diaspora cukup efektif mendorong keinginan warga Inggris dan Irlandia berkunjung ke Indonesia. Kegiatan seperti Pesta Rakyat, *Indonesia Cultural Mosaic*, pengenalan kembali program *Indonesia Spice Up the World*, dukungan pada *Bali Beyond Travel Fair* (BBTF) Promosi Wastra Nasional, dan fasilitasi Konser *Trust Orchestra* secara tidak langsung berhasil meningkatkan minat warga Inggris dan Irlandia berkunjung ke Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Selama tahun 2024, beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam meningkatkan potensi kunjungan wisatawan dari negara akreditasi KBRI London, antara lain:

- Kebijakan perpajakan terkait pemanfaatan dana pelaku usaha di Indonesia yang saat ini dibatasi menyulitkan adanya promosi bersama dengan tour operator di luar negeri.
- Perkembangan Bali sebagai destinasi populer yang semakin padat dan memiliki keterbatasan infrastruktur perlahan dapat menurunkan citra Indonesia.
- Pengembangan destinasi prioritas dan super prioritas di luar Bali masih belum maksimal dalam menjaring wisatawan dari Inggris dan Irlandia.
- Kebijakan pariwisata Indonesia yang fokus pada wisatawan domestik memberikan sinyal yang membingungkan bagi perusahaan tour operator di negara akreditasi untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia.

Upaya Perbaikan

Setelah mempelajari tantangan dalam mencapai target tingkat potensi kunjungan wisatawan, beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan, antara lain:

- Memaksimalkan promosi pariwisata dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh KBRI London.
- Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dalam hal ini Kemenparekraf, ASITA, dan asosiasi perhotelan di dalam negeri.

- Meningkatkan pendekatan dan hubungan dengan pemangku kepentingan sektor pariwisata di negara akreditasi.
- Memperbaharui data mitra bidang pariwisata di negara akreditasi secara berkala.
- Meningkatkan sinergi dengan diaspora, masyarakat, dan mahasiswa Indonesia untuk mendukung promosi pariwisata di Inggris dan Irlandia.
- Perencanaan kegiatan travel expo di Indonesia yang terkadang berbenturan sering menurunkan minat pelaku usaha tour operator di negara akreditasi.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam upaya memenuhi target potensi kunjungan wisatawan dari Inggris dan Irlandia, KBRI London telah melaksanakan sejumlah kegiatan yaitu:

1. Lunch with Tour Operators, September 2024.
2. AIS Summer Picnic di London, Juli 2024.
3. Dukungan kehadiran bagi Tour Operator Inggris pada BBTF 2024, Juni 2024.
4. Pemutaran Film Sokola Rimba pada ASEAN Film Festival di London, May 2024.
5. Indonesia Cultural Exhibition MOSAIC di Oxford, May 2024.
6. Pesta Rakyat, Agustus 2024.
7. Penampilan Indonesian Angklung Ensemble Club.
8. Konser Trust Orchestra di London, Agustus 2024.
9. Resepsi Diplomatik di Inggris dan Irlandia, November 2024.

Proyeksi Ke Depan

Setelah mempelajari perkembangan industri pariwisata di Indonesia selama periode 2023-2024, kunjungan wisatawan asal Inggris dan Irlandia berpotensi untuk mengalami peningkatan. Adapun hal-hal yang diperkirakan mengemuka dalam mendukung kunjungan wisatawan ke Indonesia, yaitu:

- Penerapan kemudahan visa dan keberadaan visa yang memadukan wisata serta bisnis akan semakin mendorong peningkatan wisatawan ke Indonesia.
- Peluang besar bagi destinasi wisata di luar Bali untuk menarik wisatawan akan semakin bertambah.
- Fokus Indonesia pada wisata ramah lingkungan, warisan budaya, dan pariwisata mewah sejalan dengan tren global dan menarik wisatawan Inggris dan Irlandia.
- Pergeseran tren perjalanan wisata ke Indonesia yang semakin mengarah pada kualitas daripada kuantitas juga menjadi daya jual bagi wisatawan Inggris dan Irlandia.
- Kehadiran investasi perusahaan Inggris dan Irlandia di sektor pariwisata juga ikut membantu promosi Indonesia di negara akreditasi.

Di tahun 2024, KBRI London optimis dapat mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan dari Inggris dan Irlandia melalui koordinasi yang erat dan promosi secara lebih terarah.

Dokumentasi



Suasana Pesta Rakyat 2024



AIS Summer Picnic di London



Pemutaran film 'Sokola Rimba' pada ASEAN Film Festival 2024

SUB IK 2 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia

Di tahun 2024, KBRI London telah meningkatkan target SUB IK 2 dari 120.000 di tahun 2023 menjadi 220.000 wisatawan di tahun 2024. Dari sisi capaian, jumlah kunjungan wisatawan

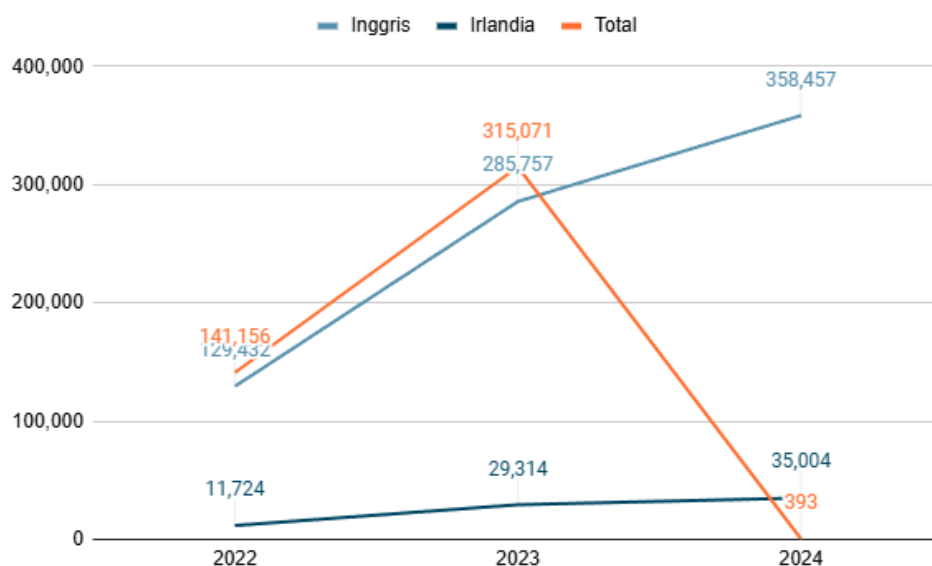
asal Inggris dan Irlandia mengalami peningkatan di tahun 2024 mencapai 393.461 dari sebelumnya 315.071 di tahun 2023. Peningkatan target dan realisasi ini terjadi setelah diberlakukannya normalisasi aktivitas sosial-ekonomi serta kebijakan *golden visa* di Indonesia.

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan Inggris mencapai 358,457 kunjungan, naik 79.7 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 285,757 dan 2022 sebesar 129,432 kunjungan. Peningkatan jumlah kunjungan juga terjadi pada wisatawan Irlandia yang mencapai 35,004 di tahun 2024 dari sebelumnya 29,314 kunjungan pada tahun 2023 dan 29,314 kunjungan di tahun 2022. Dengan ini, secara total jumlah kunjungan wisatawan dari negara KBRI London mencapai 393,461 kunjungan, meningkat sebesar 0,3% dari 315,071 pada tahun 2023.

Tabel jumlah kunjungan wisatawan negara akreditasi KBRI London periode Januari - Oktober tahun 2021-2023

Negara	Jumlah Kunjungan (Jan-Okt)			Perubahan Y-o-Y (23/24)
	2022	2023	2024	
Inggris	129,432	285,757	358,457	25.44%
Irlandia	11,724	29,314	35,004	19.4%
Total	141,156	315,071	393.461	24.8%

Grafik jumlah kunjungan wisatawan negara akreditasi KBRI London periode Januari - Oktober tahun 2022-2024



Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari negara akreditasi KBRI London ke Indonesia didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- Peningkatan hubungan perdagangan dan sosial-budaya dengan negara akreditasi, utamanya Inggris ikut mendorong adanya kelanjutan pada kegiatan wisata di Indonesia.
- Kemudahan pemegang paspor Inggris dan Irlandia untuk masuk ke Indonesia sejak diberlakukannya *visa on arrival* (VoA)
- Upaya promosi pariwisata Indonesia KBRI London melalui berbagai kegiatan promosi destinasi wisata dan kuliner seperti World Travel Market, London Coffee Festival, Pesta Rakyat KBRI London, *National Geographic Travel Fair* (NGTFF) dan kegiatan lainnya.

Kendala dan Tantangan

- Preferensi wisatawan Inggris dan Irlandia yang bergeser pada kegiatan wisata olahraga yang menyenangkan, perjalanan jarak dekat, serta wisata keluarga.
- Pemisahan portofolio pariwisata dan kreatif ekonomi pada akhir tahun 2024 menimbulkan pertanyaan kelanjutan prioritas pemerintah Indonesia.
- Dengan dihentikannya kerjasama dengan representatif *Visit Indonesia Tourism Office* (VITO) London pada tahun 2022, KBRI London tidak melakukan *tourism campaign* bersama VITO sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Upaya Perbaikan

- Memanfaatkan hubungan baik yang telah terjalin dengan perusahaan tur operator di negara akreditasi untuk dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia.
- Memperluas jangkauan promosi wisata Indonesia dengan memanfaatkan keikutsertaan KBRI London di berbagai kegiatan di tahun-tahun selanjutnya.
- Menjajaki kerja sama dengan maskapai untuk dapat berpartisipasi dalam mempromosikan destinasi wisata di Indonesia.
- Meningkatkan pemanfaatan database stakeholders bidang pariwisata di negara akreditasi, terutama dengan Irlandia yang masih perlu diperkuat di tahun 2025.

Analisis Program Pendukung Capaian

1. Keberhasilan kegiatan World Travel Market (WTM) 2023 dalam menjaring potensi transaksi wisata sebanyak 156.287 pax dengan potensi devisa sebesar IDR 4,62 triliun.
2. Selain itu, KBRI London juga mendorong partisipasi tour and travel operator Inggris untuk ikut serta pada Bali Beyond Travel 2023.
3. KBRI London juga berpartisipasi pada Indonesian Festival di Oxford untuk promosi pariwisata, budaya dan kuliner Indonesia.
4. Terkait dengan Program Pemerintah Indonesia Spice Up the World, KBRI London juga memfasilitasi kegiatan FGD dan *coaching clinic* program Indostar di London untuk mengenalkan program *kickstarter* bagi pebisnis kuliner Indonesia di Inggris.

Proyeksi Ke Depan

Melihat kenaikan eksponensial dari kunjungan wisatawan Inggris dan Irlandia ke Indonesia mencapai 123.2%, di tahun 2024-2025 terdapat potensi kenaikan wisatawan yang cukup stabil dari negara akreditasi KBRI London. Dengan penurunan inflasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Inggris di tahun 2024, diproyeksikan kemampuan masyarakat untuk melakukan kunjungan pariwisata di Inggris juga semakin meningkat. Namun, rencana pemilu di Indonesia dapat menimbulkan kehati-hatian kepada para calon wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia, sekiranya terdapat potensi kerusuhan antar pendukung politik.

Di tahun 2025, KBRI London akan melanjutkan promosi pariwisata kepada *tour agency* dan operator melalui Bali Beyond Travel Fair serta memfasilitasi promosi pariwisata melalui kegiatan promosi pariwisata lainnya di Inggris dan Irlandia. KBRI London juga akan terus mempromosikan kuliner dan pariwisata Indonesia melalui UMKM Indonesia di London dalam rangka mendukung Indonesia Spice Up the World.

Dokumentasi



Peresmian Paviliun Indonesia di World Travel Market 2024



Kegiatan tourism sector networking event

S2 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Organisasi Internasional

Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, capaian kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan hasil dari peran/kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional dan juga sebagai bagian dari solusi permasalahan global. IK S2 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Organisasi Internasional bertujuan untuk mengukur seberapa jauh Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan dan perannya dalam forum kerja sama multilateral.

Selama beberapa tahun terakhir, kinerja diplomasi Kemenlu telah berhasil memperlihatkan kepemimpinan dan perannya di forum kerja sama multilateral, di antaranya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, dan keberhasilan pencalonan Indonesia sebagai Anggota ECOSOC periode 2021-2023. Indonesia sebagai negara besar yang merupakan bagian dari G20 diharapkan dapat terus meningkatkan tren positif dalam menunjukkan kepemimpinan dan perannya di setiap forum kerja sama multilateral. Kepemimpinan dan peran Indonesia di antaranya terefleksikan melalui peran sebagai inisiator, mediator, dan fasilitator.

Analisis IK S2.1 – Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral

Deskripsi IK

Kepemimpinan pada forum kerja sama multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suatu jabatan strategis pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan OI, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi *focal point* OI tersebut, Kemenlu berperan dalam menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan dari instansi/*focal point*. Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemenlu tersebut tidak diakomodasi oleh instansi/*focal point*, Kemenlu tetap akan mengupayakan pemenang terhadap pencalonan dimaksud.

Formula perhitungan IK S2.1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah pertemuan yang dipimpin/diselenggarakan oleh Indonesia} + \text{Jumlah pencalonan yang berhasil})}{(\text{Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin/diselenggarakan oleh Indonesia} + \text{Jumlah pencalonan yang diusulkan})} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Tabel III.S2.1.a
Capaian IK S2.1 Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral	Jumlah pertemuan yang dipimpin/diselenggarakan oleh Indonesia + Jumlah pencalonan yang berhasil	21	100
	Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin/diselenggarakan oleh Indonesia + Jumlah pencalonan yang diusulkan	22	
Realisasi		95,45%	
Target		90%	
Capaian		106,06%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Sepanjang tahun 2024, Indonesia telah berperan aktif sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025 bersama 19 Anggota Kategori C lainnya, 10 Anggota Kategori B dan 10 Anggota Kategori A. Indonesia juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pada Sidang Dewan IMO ke-132 dan ke-133. Selain itu, Indonesia juga kembali terpilih sebagai anggota *Advisory Committee* IMSO pada IMSO Assembly ke-29. Dari kegiatan kepemimpinan Indonesia di IMO dan IMSO tersebut, telah diperoleh realisasi kinerja sebesar 95,45 % dari target 90%. Selain itu, kepemimpinan Indonesia juga tercermin dari penugasan salah satu WNI sebagai Senior Maritime Advisor di IMO. Sesuai dengan salah satu prioritas Kemlu untuk mendorong peran WNI di berbagai forum internasional, KBRI London senantiasa mendorong agar lebih banyak WNI yang memerankan peran strategis di berbagai organisasi internasional di Inggris, termasuk di IMO.

Indonesia pada keanggotaan Dewan IMO mewakili sejumlah kepentingan antara lain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara pantai (*coastal state*) Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai *choke point* penting pelayaran dunia, negara anggota ASEAN serta bagian dari kelompok [REDACTED]. Sebagai catatan Indonesia selalu menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C sejak tahun 1983.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memiliki hak suara untuk mengambil keputusan strategis dalam organisasi IMO.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.S2.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK S2.1 Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
-----------------	------	------	------	------	------

S2.1	Target	4	4	86%	88%	90%
	Realisasi	3,88	3,94	100%	100%	100%
	Capaian	97%	98,50%	116,20%	113,64%	106,06

Dalam periode 2023-2024, realisasi IK S2.1 Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral stabil pada angka 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Tercapainya persentase kepemimpinan Indonesia di berbagai forum multilateral didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- Peran aktif Indonesia dalam memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang konstruktif dan relevan dalam pertemuan-pertemuan IMO telah memperkuat posisi Indonesia sebagai yang dipercaya di forum IMO. Keterlibatan aktif ini tidak hanya membantu dalam membentuk kebijakan maritim global tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap peningkatan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan. Kepemimpinan Indonesia ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan yang dari negara-negara lain, yang pada akhirnya memilih Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2024-2025. Kepemimpinan ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi sektor maritim global.
- Diplomasi yang efektif dan strategis yang dijalankan oleh Delegasi RI. Melalui negosiasi dan diplomasi, Indonesia mampu membangun hubungan baik dan mendapatkan dukungan luas dari negara-negara anggota IMO lainnya. Strategi diplomasi ini meliputi pertukaran informasi yang intensif, kerja sama teknis, dan penggalangan dukungan dalam berbagai isu penting sektor perkapalan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas dan pengaruh Indonesia di forum IMO tetapi juga memperkuat kapasitas Delegasi RI untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan nasional dalam konteks global.

Kendala dan Tantangan

Kepemimpinan Indonesia dalam forum kerja sama multilateral menghadapi beberapa kendala dan tantangan.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Upaya Perbaikan

[REDACTED]

[REDACTED] Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait untuk memastikan konsistensi dan sinergi dalam menyampaikan posisi nasional yang kuat dan terpadu di berbagai forum multilateral.

Indonesia juga perlu melakukan pengembangan jaringan diplomasi yang lebih luas dan strategis, termasuk turut terlibat dalam pembahasan *like minded countries* untuk membantu mengamankan dukungan untuk prakarsa Indonesia ataupun pembahasan isu yang sejalan dengan posisi nasional Indonesia.

Analisis Program Pendukung Capaian

Indonesia sebagai Negara Anggota IMO dan juga saat ini menjadi Negara Anggota Dewan IMO untuk periode 2024-2025 perlu mengoptimalkan peran ini dan turut berkontribusi bagi pemajuan dan pengembangan sektor maritim dunia. Untuk memastikan terlaksananya peran ini dengan baik, maka Delegasi RI yang menghadiri sidang dan pertemuan di IMO perlu dibekali dengan pemahaman yang menyeluruh tentang organisasi IMO serta teknik negosiasi yang baik.

Untuk itu, KBRI London telah mengadakan Pelatihan Tata Cara Persidangan dan Teknik Negosiasi pada forum IMO. Pelatihan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan pejabat dan staf yang ditugaskan sebagai Delegasi Republik Indonesia pada sidang dan pertemuan-pertemuan IMO sehingga dapat menegosiasikan kepentingan Indonesia di forum internasional serta mendukung kepemimpinan dan peran aktif Indonesia di organisasi internasional.

Proyeksi Ke Depan

Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penting di mana Negara Anggota IMO akan menentukan *mid-term measures* pengurangan Emisi GRK dari sektor perkapalan pada pertemuan MEPC ke-83 yang akan diselenggarakan pada bulan April 2025. Indonesia dapat melakukan penelitian terkait dampak penerapan usulan-usulan upaya pengurangan Emisi GRK tersebut terhadap sektor perkapalan Indonesia termasuk dalam hal harga pangan atau produk lainnya. Dengan begitu, Indonesia dapat memainkan peran aktif untuk menyuarakan posisi negara-negara berkembang dalam penentuan upaya pengurangan Emisi GRK pada sektor perkapalan.

Selain itu, Indonesia akan kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2026-2027. [REDACTED]

[REDACTED]

Indonesia juga kembali dipercaya sebagai anggota *Advisory Committee* IMSO pada pertemuan Majelis IMSO ke-29. Dengan begitu, Indonesia kembali berkesempatan untuk berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan *Advisory Committee* IMSO di tahun 2025.

Dokumentasi



Indonesia bersama negara MIKTA lainnya menyelenggarakan Diskusi Panel terkait peluang kerja sama MIKTA dengan Negara Anggota IMO



Delegasi RI bersama Sekretaris Jenderal IMO pada Pertemuan *Technical Cooperation Committee* ke-74

Analisis IK S3.1 – Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI London

Deskripsi IK

Indeks Citra adalah Indeks yang mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional yang dilakukan secara periodik triwulan.

Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu TOURISM & SOCIO-CULTURE, ECONOMY, dan GOVERNANCE AND RULE OF LAW. Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengolahan data citra Indonesia di dunia internasional (<https://citraindonesia.kemlu.go.id>). Kuesioner disebar oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di negara akreditasi/wilayah kerja.

Penyebaran kuesioner dan pengumpulan data hasil jawaban responden dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama, berbasis *online survey* (kem.lu/3lg) di mana QR Code tautan survei disebar pada kegiatan-kegiatan promosi untuk diisi secara daring. Kedua, menggunakan kuesioner secara *hardcopy* berdasarkan file yang disiapkan Pusat, dibagikan pada kegiatan-kegiatan promosi yang diselenggarakan KBRI London. Kemudian hasil survey disampaikan kepada Pusat melalui portal kemlu untuk diverifikasi lebih lanjut.

Keterangan capaian indeks:

Interval	Kategori Indeks
4,21 – 5,00	Sangat Baik
3,41 – 4,20	Baik
2,61 – 3,40	Cukup
1,81 – 2,60	Kurang
1,00 – 1,80	Tidak Baik

Formula perhitungan IK S3.1 adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Citra Positif Indonesia} = \frac{\text{Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden}}{\text{Jumlah Total Responden}}$$

Informasi Kinerja

Tabel III.S3.1.a
Capaian IK S3.1 Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI London	Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden	4,35	100%

	Jumlah Total Responden	288
Realisasi		4,35
Target		4,07
Capaian		106,88%
Batas Toleransi		120%

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK S3.1 Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI London adalah sebesar 4,35 (skala 5) dari target sebesar 4,07 (skala 5), sehingga capaian IK sebesar 106,88% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu dengan realisasi 3,84 dari target 3,95.

Berdasarkan data Indeks Citra 2024, terdapat 288 responden dengan nilai rata-rata 4,35 dari skala 5 (capaian: Sangat Baik). Aspek citra Indonesia yang dinilai paling positif oleh masyarakat di Inggris dan Irlandia adalah pada *Tourism and Socio-Culture* (nilai 4,62 dari skala 5). Sementara itu, aspek citra yang belum meningkat signifikan adalah pada *Economy* (nilai 4,22 dari skala 5) dan *Governance and Rule of Law* (nilai 4,21 dari skala 5).

IK Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI London menggambarkan indeksasi persepsi Warga Negara Asing terhadap Indonesia. Adapun survey tidak secara langsung menilai kualitas program kerja atau upaya diplomasi KBRI London di negara akreditasi. Pertanyaan survey bersifat penilaian umum terhadap persepsi responden terhadap Indonesia. Adapun satu pertanyaan yang dapat ditafsirkan sebagai penilaian terhadap efektivitas kegiatan promosi Indonesia KBRI London adalah pertanyaan '*interest visit Indonesia after attend events of promotion materials*', yang mendapat jawaban '*strongly agree*' atau '*agree*' dari seluruh responden.

Perbandingan Kinerja

Selaras dengan *cascading* dari target Kementerian Luar Negeri, target IK S3.1 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan 4,07 (skala 5) dan terealisasi sebesar 4, (skala 5) dengan capaian IK sebesar 97,2%. Capaian IK tahun 2024 menunjukkan nilai Indeks Citra yang meningkat 9,04% dari tahun 2023 sebesar 3,84 (skala 5), sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel III.S3.1.b

Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK S3.1 Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
S3.1					
Target	4	3,85	3,90	3,95	4,07
Realisasi	4	4	3,67	3,84	4,35
Capaian	100%	103,90%	94,10%	97,22%	106,88%

Dalam periode 2021-2024 realisasi IK S3.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI London mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah responden survei citra positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI London mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebanyak 184 responden, yaitu 288 responden dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 104 responden.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Peningkatan nilai Indeks Citra pada tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan strategi komunikasi diplomasi digital KBRI London, serta gencarnya promosi seni Budaya serta kegiatan terkait lainnya yang dilakukan oleh KBRI London. Hasil Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI London diperoleh sebagai dampak dari pelaksanaan diplomasi publik melalui penguatan diplomasi digital, promosi Indonesia, serta pemberdayaan *friends of Indonesia* yang ada di negara akreditasi. Untuk meningkatkan animo pengisian survei pada kegiatan KBRI secara luring, KBRI London memberikan bentuk apresiasi berupa cinderamata khas Indonesia kepada setiap pengisi survei.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, KBRI London telah berhasil mencapai target IK yakni 4,35%. Demi peningkatan capaian IK di tahun 2024, KBRI London telah melakukan analisa dan penyusunan strategi dalam mencapai IK, antara lain:

- Memperkaya informasi *good news from Indonesia* dalam kampanye digital KBRI London di tahun 2025, khususnya capaian kerja sama bilateral Indonesia-Inggris dan Indonesia-Irlandia guna meningkatkan *awareness* publik yang berpengaruh pada penilaian topik *governance and rule of law*. Sepanjang tahun 2024, materi diplomasi publik dalam tema perayaan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Inggris dan 40 tahun Indonesia dan Irlandia telah terbukti meningkatkan nilai survei.
- Mendorong promosi produk Indonesia yang telah tersedia di Inggris kepada publik setempat melalui kegiatan KBRI London. Dalam pameran terpadu KBRI, antara lain 'Natgeo Traveller Food Festival 2024, pengunjung disuguhkan produk olahan tempe dan kecap manis, kedua produk yang dijual di toserba lokal. Strategi ini terbukti efektif dalam memperbaiki penilaian topik 'ekonomi', khususnya untuk pertanyaan 'Apakah produk Indonesia mudah ditemui di negaramu'. Pada tahun 2025, KBRI London akan memperkuat kolaborasi dengan UMKM Indonesia yang berbasis di Inggris untuk meningkatkan pengetahuan publik atas produk Indonesia.

Program yang Mendukung

Hasil Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI London diperoleh sebagai dampak dari pelaksanaan diplomasi publik melalui penguatan diplomasi digital, promosi seni dan budaya Indonesia, serta pemberdayaan masyarakat Indonesia dan diaspora yang ada di negara akreditasi.

Penguatan Diplomasi Digital

Sejalan dengan Permenlu No. 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, optimalisasi strategi komunikasi digital KBRI London difokuskan pada 4 (empat) akun media sosial resmi KBRI London yakni Instagram (@indonesiainlondon), X (ex Twitter) (@kbrilondon), Facebook (Indonesia in London), dan YouTube (KBRI London TV).

Strategi kampanye digital KBRI London dilaksanakan dengan landasan 2 pilar utama, yaitu:

- Diseminasi informasi mengenai isu-isu yang berkembang di Indonesia, Inggris, dan Irlandia, melalui konten yang menarik dan tepat sasaran sesuai target audiens di Negara Akreditasi.
- Memastikan produksi konten media sosial selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan kepentingan nasional.

Media sosial KBRI London diarahkan untuk mendukung pencapaian IK Indeks Citra Indonesia di Luar Negeri, sehingga substansi konten difokuskan ke dalam 4 (empat) pilar utama, yakni: (i) Promosi Pariwisata dan Seni Budaya, (iii) Diplomasi Ekonomi, (iv) Layanan konsuler dan perlindungan WNI, (v) Kerja sama bilateral dan multilateral.

Perencanaan dan penyusunan konten disesuaikan dengan demografi pengguna masing-masing kanal media sosial untuk memaksimalkan cakupan *engagement* dan *target audience*, yakni Instagram dan YouTube bagi generasi Z dan *millennials*, Facebook bagi kelompok diaspora Indonesia di Inggris dan target utama X adalah masyarakat lokal Inggris dan Irlandia.

Promosi Seni dan Budaya Indonesia

Dalam semangat perayaan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Inggris serta 40 tahun Indonesia dan Irlandia tahun ini, KBRI London kembali mendorong promosi Indonesia di wilayah akreditasi. Melalui berbagai program kerja, KBRI London menekankan Indonesia sebagai negara tujuan investasi, perdagangan, destinasi wisata dan kerjasama dalam berbagai bidang yang didukung oleh ekosistem politik dan ekonomi yang stabil. Upaya ini tentunya turut memperkuat hubungan pertalian masyarakat (*people to people relations*) yang menjadi sarana menjaring masukan warga setempat akan persepsi mengenai Indonesia melalui survei yang hasilnya akan menjadi bahan data dukung bagi IK Indeks Citra Indonesia di Luar Negeri.

Sepanjang tahun 2024, KBRI London telah menyelenggarakan 19 kegiatan promosi, diantaranya 2 promosi terpadu, baik dalam tema perayaan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Inggris serta 40 tahun Indonesia dan Irlandia, maupun *Experience Indonesia 2024*. Adapun beberapa highlight kegiatan promosi antara lain, keikutsertaan KBRI London pada London Coffee Festival, National Geographic Travellers (UK) Food Festival, Indonesia Investment Forum, Resepsi Diplomatik London dan Dublin. Sebanyak total hampir 3 ribu orang dari kalangan pejabat pemerintah Inggris dan Irlandia, korps diplomatik, *think tank*, akademisi, bisnis, dan diaspora Indonesia telah hadir mengikuti kegiatan dimaksud. Kegiatan dimaksud dinilai memberikan impresi, citra serta *awareness* positif atas Indonesia.

Selain itu, KBRI London juga senantiasa bekerja sama dengan kelompok organisasi diaspora Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai kota di negara akreditasi untuk penyelenggaraan kegiatan promosi Indonesia di wilayah akreditasi. Adapun sejumlah kegiatan sebagai berikut:

- Bersama Indonesian Society in Wales, KBRI London berhasil kembali mengadakan pameran seni, budaya dan kuliner Indonesia di Wales pada 29 Juni 2024, bertajuk '*Souful Indonesia: Archipelago of dance, song and spice*'. Kegiatan ini merupakan kegiatan promosi Indonesia pertama kali di wilayah Wales sejak pandemi COVID-19 dan mendapat dukungan penuh dari *local council* dan organisasi masyarakat setempat.
- Sepanjang tahun 2024, KBRI London bersama Anglo Indonesia Society (AIS), KBRI London mengadakan rangkaian kuliah umum tematik seputar Indonesia, *book club* karya penulis Indonesia, serta AIS *Summer Picnic*. Adapun salah satu *highlight* kegiatan tahun ini adalah pameran batik dan wastra nusantara dalam rangka Hari Batik

Nasional 2 Oktober 2024 berjudul '*Batik and Beyond: Indonesian Textiles in Everyday Spaces*' bertempat di Museum of Home, London. Pameran ini turut menggandeng sejumlah ahli sebagai kurator pameran dan narasumber dalam sesi diskusi publik.

Kendala dan Tantangan

Guna meningkatkan, kualitas dan kuantitas dari responden survei di tahun 2025, KBRI London telah mengidentifikasi sejumlah kendala dan tantangan dalam proses menjangkau survei, antara lain:

a) Teknis

- Responden mengalami kendala dalam akses laman survei. Waktu yang dibutuhkan untuk masuk lama terpantau cukup lama, sehingga responden kerap meninggalkan survei sebelum selesai.
- Akses laman survei kerap membutuhkan jaringan internet yang kencang/cepat, sehingga laman kerap tidak bisa diakses pada kegiatan pameran yang ramai pengunjung dan berlokasi di venue yang tidak ada *free wifi*.

b) Substansi Survei

- Responden merasa survei memakan waktu cukup lama. Bentuk pertanyaan survei dirasa responden cukup majemuk (pilihan ganda, isian, dan berbasis rating), sementara umumnya survei di Inggris cukup berupa *rating*, atau *yes/no questions* sehingga dapat dilengkapi dalam 1 menit atau kurang. Hal ini menyebabkan responden kerap
- Komponen isian survei yang terlalu panjang dengan topik yang tidak terlalu relevan dengan sejumlah responden, terutama isu *governance and rule of law*.
- Pada kolom *nationality* pada survei *online*, WN Inggris tercantum sebagai "*United Kingdom*". Dalam kaitan ini, WN Inggris pada umumnya lebih lazim menggunakan penyebutan resmi sebagai "*British*" (sesuai *British Nationality Act 1981*). Di sisi lain, di survei online terdapat pilihan *nationality* "*British Indian Ocean Territory*" dan "*British Virgin Island*", yang kerap menimbulkan kesalahan input dari para responden.

Upaya Perbaikan

- Petugas penjaga survei wajib membawa perangkat elektronik cadangan serta kuesioner survei luring untuk antisipasi kesulitan akses laman survei daring serta alat tulis.
- Guna menjangkau minat responden, selama tahun 2024 KBRI London membagikan souvenir khas Indonesia kepada tiap responden.
- Meningkatkan intensitas pelaksanaan survey, tidak hanya pada kegiatan KBRI London, namun juga menitikkan survei ini kepada rekan-rekan diaspora dan pelajar yang mengadakan kegiatan promosi di daerah mereka masing-masing.

Analisis Program Pendukung Capaian

Kedepannya, penyebaran survei diupayakan akan dilakukan dengan:

- Memperluas jenis program pendukung yang semula fokus pada kegiatan promosi seni, budaya dan pameran dagang.
- Memanfaatkan jejaring *friends of Indonesia*, termasuk alumni Darmasiswa, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, mitra setempat, korps diplomatik dan berbagai komunitas setempat untuk memperluas cakupan responden.

Dokumentasi



Resepsi Diplomatik London dan Dublin, Oktober 2024



Partisipasi Dalam National Geographic Traveller (UK) Food Festival 2024



Pameran *Batik and Beyond: Indonesian Textiles in Everyday Spaces*



Rangkaian Perayaan HUT RI ke-79



Kegiatan Promosi Seni, Budaya dan Kuliner Indonesia di Wales
Soulful Indonesia: Archipelago of dance, song and spice

C1 Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI London yang Prima

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. Pihak *stakeholders* dan pihak *customer* dapat dimungkinkan sama pada beberapa unit.

Stakeholders Perspective terdiri dari 4 IK yaitu:

1. IK C.1.1: Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI London yang diselesaikan
2. IK C.1.2: Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI London
3. IK C.1.3: Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI London

Analisis IK C1.1 – Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan

dengan memberikan pelayanan dan pelindungan yang berkualitas, responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang prima meliputi pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI yang diatur oleh UU No. 25 tahun 2009.

Untuk WNI yang berdomisili di luar negeri, pelindungan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pemberian pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam sasaran strategis pelindungan WNI di Luar Negeri dan pelayanan publik yang prima bertujuan memastikan pencapaian kinerja dalam upaya yang dilakukan oleh Kemenlu RI untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri sesuai dengan Hukum Internasional dan kualitas pelayanan publik terkait kekonsuleran dan pelindungan WNI.

Pelindungan terhadap WNI di Luar Negeri mencakup penyediaan bantuan informasi, hukum dan/atau sosial. Prinsip yang diterapkan dalam upaya pelindungan WNI sesuai Permenlu No 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri, yaitu:

1. Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI;
3. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.

Analisis IK C1.1 – Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan

Deskripsi IK

Kasus WNI di Luar Negeri mencakup kasus khusus dan kasus umum yang ditangani Perwakilan RI di Luar Negeri. Kasus Khusus termasuk *high profile case*, seperti hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidental dan/atau yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI. Kasus Umum antara lain kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, pencurian, pencucian uang, pemerkosaan dan pelanggaran hukum. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan ketentuan internasional.

Pembobotan Kasus WNI di Luar Negeri terdiri dari:

1. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan dengan bobot: 55 %
2. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan dengan bobot: 45 %

Pertimbangan pembobotan didasarkan pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus WNI di Luar Negeri

Kasus yang selesai adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional; hukum negara setempat; dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri.

Kasus yang ditangani adalah kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, ataupun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Penghitungan kasus WNI yang diselesaikan mencakup kasus yang ditangani dan diselesaikan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember), yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Formula perhitungan IK C1.1 adalah sebagai berikut:

$$((55\% \times (A/B) \times 100\%) + ((45\% \times (C/D) \times 100\%))$$

- A: Jumlah kasus khusus WNI yang diselesaikan
- B: Jumlah kasus khusus WNI yang ditangani
- C: Jumlah kasus umum WNI yang diselesaikan
- D: Jumlah kasus umum WNI yang ditangani

Jumlah kasus terdiri atas jumlah kasus di tahun berjalan dan sisa kasus tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai

Informasi Kinerja

Tabel III.C1.1.a
Capaian IK C1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan	Persentase kasus khusus yang diselesaikan (55%)	100%	33,33%
	Persentase kasus umum yang diselesaikan (45%)	100%	
Realisasi		100%	
Target		92%	
Capaian		108,70%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024 Fungsi Protokol dan Konsuler telah menangani sejumlah kasus WNI di negara akreditasi KBRI London yakni kategori khusus seperti kasus kecelakaan transportasi dan pembunuhan, dengan penyelesaian kasus khusus mencapai 100% (8 dari 8 kasus khusus); serta kasus umum seperti kasus pelecehan seksual, keimigrasian, pidana, ketenagakerjaan, hilang kontak, hingga WNI meninggal dunia. Persentase penyelesaian kasus umum mencapai 100% (24 dari 24 kasus umum).

Perbandingan Kinerja

Tabel III.C1.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK C1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
C1.1					
Target	85%	85%	80%	90%	92%
Realisasi	90%	97,7%	100%	99%	100%
Capaian	100%	115,04%	120%	110,04%	108,70

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK C1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan mengalami kenaikan dari 99% pada 2023 menjadi 100% pada 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian target IK pada tahun 2024 (100% dari target 92%), didukung oleh keterlibatan aktif Fungsi Protokol dan Konsuler dalam memantau dan respon cepat atas kasus-kasus yang masuk, serta didukung oleh langkah strategis sebagaimana dijabarkan pada bagian Analisis Program Pendukung Capaian di bawah ini.

Kendala dan Tantangan

Pada IK Persentase Kasus yang diselesaikan KBRI London, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain:

- Terhentinya proses penempatan PMI pekerja musiman akibat temuan dugaan *overcharging* pada tahap rekrutmen, turut mengakibatkan beberapa PMI melarikan diri akibat tidak adanya kepastian pekerjaan yang sama di tahun 2025;
- Belum adanya pembahasan bilateral perihal penempatan skema PMI pekerja musiman ke Inggris, utamanya mekanisme yang menitikberatkan pada kesejahteraan/ kepentingan PMI;
- Belum adanya perjanjian pertukaran informasi antara RI – Inggris (*Mandatory Consular Notification*), sehingga Pemerintah Inggris tidak memiliki kewajiban memberitahukan KBRI London sekiranya ada WNI yang membutuhkan pendampingan;
- Terbatasnya akses atas data pribadi (*data protection act*), sehingga informasi terkait WNI terkadang tidak dapat didapatkan dengan utuh.
- Terbatasnya pemahaman WNI terhadap aturan hukum di Inggris dan/atau Irlandia, khususnya terkait hak dan kewajiban terkait ketenagakerjaan.
- Kurangnya pemahaman antar budaya sehingga terjadi gegar budaya maupun kendala bahasa dalam interaksi WNI dengan warga setempat.
- Berakhirnya masa tugas *runner* KBRI London di Irlandia, sehingga upaya perlindungan belum optimal diberikan khususnya kepada para Anak Buah Kapal (ABK) di Irlandia.

Upaya Perbaikan

Adapun saran dan perbaikan ke depan guna terus mencapai target IK antara lain:

- Intensifikasi koordinasi dengan Pusat terkait upaya penempatan PMI Pekerja Musiman serta para ABK ke Inggris atau Irlandia;
- Intensifikasi upaya peninjauan *Mandatory Consular Notification* dengan pihak Inggris;
- Intensifikasi upaya sosialisasi dan diseminasi informasi kepada para WNI khususnya terkait hak dan kewajiban ketenagakerjaan;
- Identifikasi calon *runner* baru untuk mendukung tugas Konhor RI di Irlandia, terutama guna memberikan dukungan upaya perlindungan WNI;
- Peningkatan kapasitas staf Konsuler khususnya terkait pemahaman aspek hukum di Inggris.

Analisis Program Pendukung Capaian

Guna mendukung pencapaian penanganan kasus perlindungan WNI, KBRI London pada 2024 melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengawasan ketat terkait proses penempatan PMI pekerja musiman sesuai hasil verifikasi *job order* pada tahun 2023. KBRI London terus memonitor proses keberangkatan, penempatan hingga pemulangan para pekerja kembali ke Indonesia.

KBRI London juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang mengalami pemutusan kontrak kerja dengan memastikan seluruh hak ketenagakerjaannya dipenuhi oleh perusahaan penyalur.

KBRI London turut memberikan respon cepat atas informasi adanya dugaan praktik *overcharging* dengan berkoordinasi erat bersama Pusat, otoritas terkait di Inggris serta para perusahaan terkait.

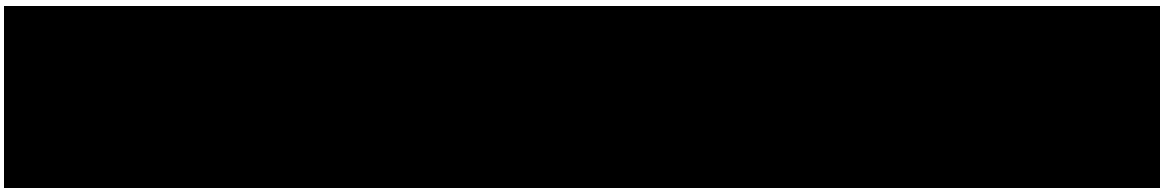
2. Pasporisasi WNI orang tidak terdokumentasi (WNI OTT) dilanjutkan hingga Agustus 2024. Program dilaksanakan sesuai konsultasi dengan Pusat dan secara terbatas melalui mekanisme *screening* yang selektif guna memastikan para WNI OTT benar-benar akan melanjutkan proses pengurusan izin tinggalnya yang sah di Inggris.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024, program pasporisasi tidak lagi dilanjutkan pelaksanaannya.

3. Penguatan koordinasi bersama mitra perlindungan hak ketenagakerjaan di Irlandia. KBRI London terus memperkuat kerja sama dengan organisasi pemerhati hak ketenagakerjaan Irlandia, yaitu *International Transport Workers' Federation (ITF)* serta *Unite the Union*.

Kerja sama diperkuat khususnya guna terus memonitor kondisi para ABK Indonesia yang bekerja di perairan Inggris dan Irlandia. Komunikasi erat juga selalu dijalin dalam menanggapi berbagai laporan terkait dugaan kasus maladministrasi rekrutmen ABK, ABK terlantar maupun ABK yang tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya.

- 4.



5. Pnggiatan program sosialisasi serta diseminasi informasi kepada para WNI berdomisili di Inggris maupun Irlandia. Sosialisasi diberikan secara khusus kepada para ABK di Irlandia terkait skema perubahan izin tinggal yang diadopsi pemerintah Irlandia serta pemaparan terkait hak dan kewajiban yang melekat kepada mereka selama bekerja di Irlandia.

Sosialisasi perlindungan WNI juga diberikan secara khusus kepada para PMI pekerja musiman yang ditempatkan di Inggris. Melalui kegiatan tersebut, para PMI diberikan pemaparan terkait aspek-aspek ketenagakerjaan di Inggris termasuk hak dan kewajiban sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. KBRI London secara khusus juga mengingatkan pentingnya mentaati perjanjian kerja serta melakukan perjalanan pulang ke Indonesia sesuai kontrak. Hal ini demi menjaga reputasi tenaga kerja Indonesia di Inggris.

Sepanjang 2024, KBRI London telah menyelesaikan 24 kasus umum dan 8 kasus khusus, dengan *highlight* antara lain:

1. Penanganan dan repatriasi [REDACTED]
2. Pemantauan kondisi WNI pada masa kerusuhan yang merebak di Inggris (Juli - Agustus 2024)
3. Penanganan WNI hilang kontak [REDACTED]
4. Pendampingan mahasiswa WNI [REDACTED]
5. Penanganan mahasiswa WNI [REDACTED]
6. Penanganan WNI meninggal dunia dan repatriasi [REDACTED]
7. Pemenuhan hak ketenagakerjaan [REDACTED]
8. Bantuan penanganan Mahasiswa WNI korban [REDACTED]
9. Bantuan pendampingan WNI sakit [REDACTED]
10. Bantuan penanganan WNI korban [REDACTED]

Proyeksi Ke Depan

Pada tahun 2025, kebijakan keimigrasian yang lebih ketat kemungkinan akan diadopsi oleh Pemerintah Inggris dengan fokus pada upaya pengendalian migrasi ilegal serta meningkatkan keamanan perbatasan. Salah satu langkah baru yang diterapkan adalah sistem *Electronic Travel Authorisation (ETA)* yang mewajibkan turis dari beberapa negara spesifik - termasuk AS, Kanada, beberapa negara Eropa - untuk mendapatkan otorisasi sebelum memasuki Inggris.

Pemerintah Inggris juga telah memperkenalkan undang-undang yang lebih keras untuk memberantas penyelundupan manusia. Aturan ini mencakup upaya untuk membongkar jaringan kriminal yang melakukan migrasi ilegal.

Peningkatan kriminalitas di Inggris juga terus menjadi perhatian, hal ini diperparah dengan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan yang baru di Inggris. Hal ini perlu menjadi perhatian khususnya terkait upaya perlindungan WNI yang berdomisili maupun melakukan kunjungan ke Inggris.

Skema peralihan format izin tinggal menjadi bentuk digital juga perlu untuk menjadi catatan, mengingat banyaknya pertanyaan dari WNI terkait hal ini. Pemerintah Inggris telah menunda pemberlakuan menyeluruh skema ini hingga Maret 2025.

Dokumentasi

dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang berkualitas, responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang prima meliputi pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI yang diatur oleh UU No. 25 tahun 2009.

Untuk WNI yang berdomisili di luar negeri, perlindungan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pemberian perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam sasaran strategis perlindungan WNI di Luar Negeri dan pelayanan publik yang prima bertujuan memastikan pencapaian kinerja dalam upaya yang dilakukan oleh Kemenlu RI untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri sesuai dengan Hukum Internasional dan kualitas pelayanan publik terkait kekonsuleran dan perlindungan WNI.

Pelindungan terhadap WNI di Luar Negeri mencakup penyediaan bantuan informasi, hukum dan/atau sosial. Prinsip yang diterapkan dalam upaya pelindungan WNI sesuai Permenlu No 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri, yaitu:

4. Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI;
6. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.

Analisis IK C1.1 – Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan

Deskripsi IK

Kasus WNI di Luar Negeri mencakup kasus khusus dan kasus umum yang ditangani Perwakilan RI di Luar Negeri. Kasus Khusus termasuk *high profile case*, seperti hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidental dan/atau yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI. Kasus Umum antara lain kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, pencurian, pencucian uang, pemerkosaan dan pelanggaran hukum. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan ketentuan internasional.

Pembobotan Kasus WNI di Luar Negeri terdiri dari:

1. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan dengan bobot: 55 %
2. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan dengan bobot: 45 %

Pertimbangan pembobotan didasarkan pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus WNI di Luar Negeri

Kasus yang selesai adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional; hukum negara setempat; dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri.

Kasus yang ditangani adalah kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, ataupun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

Penghitungan kasus WNI yang diselesaikan mencakup kasus yang ditangani dan diselesaikan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember), yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Formula perhitungan IK C1.1 adalah sebagai berikut:

$$((55\% \times (A/B) \times 100\%) + ((45\% \times (C/D) \times 100\%))$$

- A: Jumlah kasus khusus WNI yang diselesaikan
 B: Jumlah kasus khusus WNI yang ditangani
 C: Jumlah kasus umum WNI yang diselesaikan
 D: Jumlah kasus umum WNI yang ditangani

Jumlah kasus terdiri atas jumlah kasus di tahun berjalan dan sisa kasus tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai

Informasi Kinerja

Tabel III.C1.1.a
Capaian IK C1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan	Persentase kasus khusus yang diselesaikan (55%)	100%	33,33%
	Persentase kasus umum yang diselesaikan (45%)	100%	
Realisasi		100%	
Target		92%	
Capaian		108,70%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024 Fungsi Protokol dan Konsuler telah menangani sejumlah kasus WNI di negara akreditasi KBRI London yakni kategori khusus seperti kasus kecelakaan transportasi dan pembunuhan, dengan penyelesaian kasus khusus mencapai 100% (8 dari 8 kasus khusus); serta kasus umum seperti kasus pelecehan seksual, keimigrasian, pidana, ketenagakerjaan, hilang kontak, hingga WNI meninggal dunia. Persentase penyelesaian kasus umum mencapai 100% (24 dari 24 kasus umum).

Perbandingan Kinerja

Tabel III.C1.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK C1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
C1.1					
Target	85%	85%	80%	90%	92%
Realisasi	90%	97,7%	100%	99%	100%

Capaian	100%	115,04%	120%	110,04%	108,70
---------	------	---------	------	---------	--------

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK C1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Diselesaikan mengalami kenaikan dari 99% pada 2023 menjadi 100% pada 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian target IK pada tahun 2024 (100% dari target 92%), didukung oleh keterlibatan aktif Fungsi Protokol dan Konsuler dalam memantau dan respon cepat atas kasus-kasus yang masuk, serta didukung oleh langkah strategis sebagaimana dijabarkan pada bagian Analisis Program Pendukung Capaian di bawah ini.

Kendala dan Tantangan

Pada IK Persentase Kasus yang diselesaikan KBRI London, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain:

- Terhentinya proses penempatan PMI pekerja musiman akibat temuan dugaan *overcharging* pada tahap rekrutmen, turut mengakibatkan beberapa PMI melarikan diri akibat tidak adanya kepastian pekerjaan yang sama di tahun 2025;
- Belum adanya pembahasan bilateral perihal penempatan skema PMI pekerja musiman ke Inggris, utamanya mekanisme yang menitikberatkan pada kesejahteraan/ kepentingan PMI;
- Belum adanya perjanjian pertukaran informasi antara RI – Inggris (*Mandatory Consular Notification*), sehingga Pemerintah Inggris tidak memiliki kewajiban memberitahukan KBRI London sekiranya ada WNI yang membutuhkan pendampingan;
- Terbatasnya akses atas data pribadi (*data protection act*), sehingga informasi terkait WNI terkadang tidak dapat didapatkan dengan utuh.
- Terbatasnya pemahaman WNI terhadap aturan hukum di Inggris dan/atau Irlandia, khususnya terkait hak dan kewajiban terkait ketenagakerjaan.
- Kurangnya pemahaman antar budaya sehingga terjadi gegar budaya maupun kendala bahasa dalam interaksi WNI dengan warga setempat.
- Berakhirnya masa tugas *runner* KBRI London di Irlandia, sehingga upaya perlindungan belum optimal diberikan khususnya kepada para Anak Buah Kapal (ABK) di Irlandia.

Upaya Perbaikan

Adapun saran dan perbaikan ke depan guna terus mencapai target IK antara lain:

- Intensifikasi koordinasi dengan Pusat terkait upaya penempatan PMI Pekerja Musiman serta para ABK ke Inggris atau Irlandia;
- Intensifikasi upaya peninjauan *Mandatory Consular Notification* dengan pihak Inggris;

- Intensifikasi upaya sosialisasi dan diseminasi informasi kepada para WNI khususnya terkait hak dan kewajiban ketenagakerjaan;
- Identifikasi calon *runner* baru untuk mendukung tugas Konhor RI di Irlandia, terutama guna memberikan dukungan upaya perlindungan WNI;
- Peningkatan kapasitas staf Konsuler khususnya terkait pemahaman aspek hukum di Inggris.

Analisis Program Pendukung Capaian

Guna mendukung pencapaian penanganan kasus perlindungan WNI, KBRI London pada 2024 melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

6. Pengawasan ketat terkait proses penempatan PMI pekerja musiman sesuai hasil verifikasi *job order* pada tahun 2023. KBRI London terus memonitor proses keberangkatan, penempatan hingga pemulangan para pekerja kembali ke Indonesia.

KBRI London juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang mengalami pemutusan kontrak kerja dengan memastikan seluruh hak ketenagakerjaannya dipenuhi oleh perusahaan penyalur.

KBRI London turut memberikan respon cepat atas informasi adanya dugaan praktik *overcharging* dengan berkoordinasi erat bersama Pusat, otoritas terkait di Inggris serta para perusahaan terkait.

7. Pasporisasi WNI orang tidak terdokumentasi (WNI OTT) dilanjutkan hingga Agustus 2024. Program dilaksanakan sesuai konsultasi dengan Pusat dan secara terbatas melalui mekanisme *screening* yang selektif guna memastikan para WNI OTT benar-benar akan melanjutkan proses pengurusan izin tinggalnya yang sah di Inggris.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024, program pasporisasi tidak lagi dilanjutkan pelaksanaannya.

8. Penguatan koordinasi bersama mitra perlindungan hak ketenagakerjaan di Irlandia. KBRI London terus memperkuat kerja sama dengan organisasi pemerhati hak ketenagakerjaan Irlandia, yaitu *International Transport Workers' Federation (ITF)* serta *Unite the Union*.

Kerja sama diperkuat khususnya guna terus memonitor kondisi para ABK Indonesia yang bekerja di perairan Inggris dan Irlandia. Komunikasi erat juga selalu dijalin dalam menanggapi berbagai laporan terkait dugaan kasus maladministrasi rekrutmen ABK, ABK terlantar maupun ABK yang tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya.

9. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Met Police khususnya pada masa kerusuhan yang terjadi di Inggris pada Juli - Agustus 2024. KBRI London juga melakukan tinjauan ulang terhadap konsep rencana kontijensi yang telah dimiliki. Tinjauan ulang dilakukan dengan menitikberatkan pada upaya pembaharuan jalur koordinasi, serta skema evakuasi dari beberapa kota pusat konsentrasi WNI.

10. Penggiatan program sosialisasi serta diseminasi informasi kepada para WNI berdomisili di Inggris maupun Irlandia. Sosialisasi diberikan secara khusus kepada para ABK di Irlandia terkait skema perubahan izin tinggal yang diadopsi pemerintah Irlandia serta pemaparan terkait hak dan kewajiban yang melekat kepada mereka selama bekerja di Irlandia.

Sosialisasi perlindungan WNI juga diberikan secara khusus kepada para PMI pekerja musiman yang ditempatkan di Inggris. Melalui kegiatan tersebut, para PMI diberikan pemaparan terkait aspek-aspek ketenagakerjaan di Inggris termasuk hak dan kewajiban sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. KBRI London secara khusus juga mengingatkan pentingnya mentaati perjanjian kerja serta melakukan perjalanan pulang ke Indonesia sesuai kontrak. Hal ini demi menjaga reputasi tenaga kerja Indonesia di Inggris.

Sepanjang 2024, KBRI London telah menyelesaikan 24 kasus umum dan 8 kasus khusus, dengan *highlight* antara lain:

11. Penanganan dan repatriasi 5 (lima) ABK WNI korban tenggelamnya kapal FV Argos Georgia (3 ABK WNI selamat, 1 meninggal dunia - jenazah direpatriasi, 1 meninggal dunia - tidak ditemukan).
12. Pemantauan kondisi WNI pada masa kerusuhan yang merebak di Inggris (Juli - Agustus 2024)
13. Penanganan WNI hilang kontak a.n. AF dan CA.
14. Pendampingan mahasiswa WNI pengidap gangguan mental a.n. K.
15. Penanganan mahasiswa WNI disabilitas a.n. D & Y.
16. Penanganan WNI meninggal dunia dan repatriasi a.n. MEK dan SA.
17. Pemenuhan hak ketenagakerjaan 3 (tiga) PMI pekerja musiman putus kontrak.
18. Bantuan penanganan Mahasiswa WNI korban dugaan kekerasan seksual a.n. AV.
19. Bantuan pendampingan WNI sakit a.n. AF.
20. Bantuan penanganan WNI korban pembunuhan a.n. MB.

Proyeksi Ke Depan

Pada tahun 2025, kebijakan keimigrasian yang lebih ketat kemungkinan akan diadopsi oleh Pemerintah Inggris dengan fokus pada upaya pengendalian migrasi ilegal serta meningkatkan keamanan perbatasan. Salah satu langkah baru yang diterapkan adalah sistem *Electronic Travel Authorisation (ETA)* yang mewajibkan turis dari beberapa negara spesifik - termasuk AS, Kanada, beberapa negara Eropa - untuk mendapatkan otorisasi sebelum memasuki Inggris.

Pemerintah Inggris juga telah memperkenalkan undang-undang yang lebih keras untuk memberantas penyelundupan manusia. Aturan ini mencakup upaya untuk membongkar jaringan kriminal yang melakukan migrasi ilegal.

Peningkatan kriminalitas di Inggris juga terus menjadi perhatian, hal ini diperparah dengan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan yang baru di Inggris. Hal ini perlu menjadi perhatian khususnya terkait upaya perlindungan WNI yang berdomisili maupun melakukan kunjungan ke Inggris.

Skema peralihan format izin tinggal menjadi bentuk digital juga perlu untuk menjadi catatan, mengingat banyaknya pertanyaan dari WNI terkait hal ini. Pemerintah Inggris telah menunda pemberlakuan menyeluruh skema ini hingga Maret 2025.

Dokumentasi



1. Pendampingan WNI sakit an. AF
2. Pendampingan mahasiswa WNI a.n. K.
3. Sosialisasi upaya Pelindungan WNI kepada PMI pekerja musiman

Analisis IK C1.2 – Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI London

Deskripsi IKU

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah, selaku penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban untuk memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Salah satu pelayanan publik yang KBRI berikan adalah layanan kekonsuleran mencakup penerbitan dokumen keimigrasian (Paspor, Visa, SPLP), penerbitan surat keterangan, pencatatan administrasi kependudukan (kelahiran, kematian), dll. Dalam penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran dilakukan survei menggunakan kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden terhadap layanan kekonsuleran yang diberikan kepada masyarakat. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Survei dilakukan dengan minimal responden adalah 30 dan dengan responden sebagai berikut: Orang/Perusahaan, Staff/Pejabat Kementerian/Lembaga, Organisasi Internasional, Pemda dan Perwakilan Negara Asing.

Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan Kekonsuleran pada triwulan I,II dan III nilai persepsi tidak dilakukan rata-rata. Misal pada triwulan II didapatkan hasil survei adalah 3,75 sehingga pada tabel pelaporan realisasi dimuat adalah 3,75.

Nilai persepsi kepuasan pelayanan Kekonsuleran pada triwulan IV nilai persepsi dilakukan rata-rata dari triwulan I, II dan III dan IV. Misal pada triwulan I,II, III dan IV didapatkan hasil survei adalah 3,96; 4,00; 4,00 dan 4,00 sehingga nilai persepsi adalah rata-rata nilai persepsi 4,00 kemudian nilai persepsi kepuasan perlindungan WNI pada tabel pelaporan realisasi triwulan IV adalah 4.

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengambilan sampel Morgan dan Krejcie sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

Informasi Kinerja

Tabel III.C1.2.a
Capaian IK C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI London	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI London	4 (skala 4)	33,33%
Realisasi		4 (skala 4)	
Target		4 (skala 4)	
Capaian		100%	
Batas Toleransi		120 %	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI London adalah sebesar 4 (skala 4) dari target sebesar 4 (skala 4) sehingga capaian IK sebesar 99,5% dengan batas toleransi capaian sebesar 100%.

Seperti halnya tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2024, KBRI London telah melakukan survei pengukuran tingkat kepuasan pelayanan kekonsuleran melalui aplikasi survei pada tablet, serta melalui *platform Google Forms* yang diberikan secara online kepada WNI dan WNA yang melakukan permohonan jasa kekonsuleran KBRI London.

Perbandingan Kinerja

Target IK C1.2 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 4 (skala 4), dan terealisasi sebesar [4] (skala 4), dengan capaian IK sebesar 100%.

Tabel III.C1.2.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan
Kekonsuleran KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
C1.2 Target	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Realisasi	4 (skala 4)	3,79 (skala 4)	4 (skala 4)	3,98 (skala 4)	4 (skala 4)
Capaian	100%	94,75%	100%	99,50%	100%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI London mengalami kenaikan dari 3,98 pada tahun 2023 menjadi 4 (skala 4) pada tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh terpenuhinya ekspektasi para pengguna layanan atas kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KBRI London sepanjang tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

KBRI London mengamati bahwa tingkat kepuasan responden yang tinggi antara lain disebabkan oleh: (a) pengembangan aplikasi *online* e-Konsuler yang diluncurkan Menteri Luar Negeri pada 13 Juli 2017, dan terus diperbarui untuk selalu *user friendly* dan menjadikan pelayanan konsuler KBRI London semakin singkat, mudah, transparan serta akuntabel; (b) pelayanan warung konsuler/ jemput bola ke wilayah dengan konsentrasi WNI tinggi; (c) respon/tanggapan pertanyaan kekonsuleran melalui dua nomor *hotline* kekonsuleran serta *email* (consular@indonesianembassy.org.uk) yang cepat (*quick response*) dan informatif dan (d) SDM KBRI London yang ramah dalam melayani pemohon. Sementara itu, komentar/*review* bernilai rendah umumnya diakibatkan oleh keterbatasan beberapa pelanggan mengoperasikan aplikasi berbasis teknologi dan perubahan-perubahan kebijakan visa oleh Pemerintah Indonesia.

Secara terpisah, melalui pantauan pada Google *business review index*, tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kekonsuleran KBRI London per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 4.8 dari skala 5, berdasarkan 1.670 ulasan, lebih tinggi dari Kedutaan negara sahabat di London, seperti Jepang (4.3), Irlandia (3.6), Malaysia (3.9), AS (3.7), Jerman (3.7), RRT (2.5), Australia (3.7).

Kendala dan Tantangan

Beberapa hal yang menjadi kendala pada IK Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran antara lain:

- Dengan penerapan SIMKIM, layanan kekonsuleran bagi WNI berdomisili di beberapa *British Overseas Territories (BoT)* tidak dapat diberikan dengan optimal. KBRI London

tetap mengakomodir permohonan dari WNI pada wilayah dimaksud, dan meneruskannya kepada Perwakilan lain terdekat. Namun dengan adanya kewajiban perekaman biometrik, setiap pemohon wajib datang ke Perwakilan RI terdekat. Mayoritas pemohon dari wilayah dimaksud mengalami kendala karena kesulitan mendapat visa untuk hadir langsung ke Perwakilan RI terdekat.

- Sistem layanan keimigrasian terpusat di Kementerian teknis kerap kali mengalami kendala, sementara itu kontak dari Kementerian terkait juga tidak responsif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pengguna layanan.
- Keterbatasan kemampuan beberapa pelanggan dalam mengoperasikan aplikasi berbasis teknologi.
- Reliabilitas piranti maupun koneksi SIAK dan SIMKM kerap mengalami gangguan.
- Keterbatasan layanan keimigrasian a.l. Perwakilan RI tidak dapat melakukan ganti nama pada halaman depan paspor, seperti bila pemohon telah menikah dan menggunakan nama belakang asing, sehubungan dengan potensi permasalahan pada lalu lintas keimigrasian.

Upaya Perbaikan

Untuk pencapaian target IK di masa datang, saran dan perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian teknis guna mencari solusi skema penerbitan paspor bagi WNI domisili di BoT.
- Terus menggelar layanan jemput bola (Warung Konsuler) ke kota-kota pusat konsentrasi WNI di Inggris dan Irlandia.
- Meningkatkan koordinasi dengan Atase Imigrasi terdekat di Eropa (Den Haag dan/atau Berlin) terkait inquiry teknis dalam hal keimigrasian, serta K/L teknis terkait di Pusat.
- Meningkatkan kualitas layanan kekonsuleran melalui peningkatan kapasitas staf kekonsuleran khususnya terkait *troubleshooting* kendala teknis pada perangkat dan koneksi sistem.

Analisis Program Pendukung Capaian

KBRI London senantiasa memperbarui layanan kekonsuleran berbasis teknologi melalui panel e-Konsuler. Layanan konsuler online KBRI London terdiri dari 18 aplikasi layanan online yang terintegrasi dalam satu wadah (*One-stop service*). Aplikasi ini memungkinkan WNI dan WNA yang mengajukan permohonan layanan konsuler secara online untuk memantau tahapan proses pengerjaan aplikasi, mulai dari proses penerimaan berkas di loket layanan konsuler sampai proses penyelesaian pengerjaan dokumen termasuk penerimaan berkas via pos dan pengiriman kembali dokumen yang telah selesai diproses dengan mencantumkan *tracking number* di aplikasi tersebut.

Penerbitan dokumen keimigrasian dan kekonsuleran tahun 2024 terhitung stabil. Selama tahun 2024, KBRI London telah menerbitkan sebanyak 5.460 dokumen, meningkat dari pengeluaran dokumen tahun 2023 sebanyak 4.899 dokumen yang terdiri dari 2.609 dokumen keimigrasian, 2.291 penerbitan surat keterangan, 537 penerbitan legalisasi serta 23 penerbitan Nomor Induk Tunggal / Identitas Kependudukan Digital. KBRI London juga

melayani permohonan percepatan janji temu untuk kasus-kasus mendesak dan alasan kemanusiaan.

Pelaksanaan program Warung Konsuler dilakukan khususnya ke wilayah dengan konsentrasi WNI tinggi. Selama tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali layanan jemput bola kekonsuleran yaitu di Bristol (Maret), Dublin (Mei), Manchester (Mei), Edinburgh (Juni), Belfast (Oktober) serta York (Desember).

Melalui Warung Konsuler, telah dilayani 350 orang pemohon, baik penerbitan dokumen keimigrasian maupun konsultasi kekonsuleran. Dalam pelaksanaan program Warung Konsuler, KBRI London berupaya untuk turut menemui *counterpart* setempat, antara lain *International Transport Workers' Federation (ITF)*, *Unite the Union*, serta *Queen Victoria Seamen's Rest (QVSR) Seafarer's Centre*.

Adapun penerbitan paspor WNI di kawasan *British Overseas Territories (BOT)* dengan konsentrasi WNI di Cayman Islands, British Virgin Islands, Turks and Caicos Islands, dan Bermuda pada tahun 2024 masih dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada situasi normal, WNI di kawasan tersebut menerbitkan paspor dengan rekomendasi brafaks KBRI London kepada Perwakilan RI terdekat (umumnya melalui KBRI Caracas). Namun, sejak Agustus 2024, KBRI Caracas sudah menerapkan SIMKIM secara menyeluruh sehingga mewajibkan pemohon untuk melakukan rekam biometrik. Pada beberapa kasus khusus ditemukan beberapa pemohon yang tidak memiliki visa untuk datang langsung ke KBRI Caracas. Diperlukan solusi khusus bagi kasus-kasus tersebut melalui koordinasi dengan Pusat/Kementerian Imigrasi.

Proyeksi Ke Depan

Meskipun Pemerintah Inggris akan mengambil langkah-langkah guna mengurangi *illegal migration* pada 2025 dan selanjutnya, diperkirakan jumlah WNI di Inggris akan tetap meningkat sehubungan dengan masih terdapat peluang pekerjaan dan kebutuhan Inggris akan tenaga kerja terampil dari luar negeri. Selain itu, Inggris masih akan menjadi destinasi bagi WNI untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi lanjutan.

Sehubungan dengan itu, peningkatan layanan kekonsuleran, termasuk penambahan stok dokumen keimigrasian, peningkatan fasilitas dan aksesibilitas, serta penyiapan infrastruktur penerbitan paspor elektronik menjadi sangat penting.

Dokumentasi



1. Layanan Warung Konsuler, Edinburgh (Juni 2024)
2. Layanan Warung Konsuler, Bristol (Maret 2024)
3. Layanan Warung Konsuler, Belfast (Oktober 2024)
4. Konsultasi kekonsuleran pada Layanan Warung Konsuler, Manchester (Mei 2024)

Analisis IK C1.3 – Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI London

Deskripsi IK

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah, selaku penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban untuk memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelayanan publik yang diberikan dalam lingkup Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London mencakup pelayanan di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kekonsuleran. KBRI London memberikan pelayanan publik baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di wilayah akreditasi, yaitu Inggris dan Irlandia.

Dalam penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran dilakukan survei menggunakan kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden terhadap pelayanan kekonsuleran yang diberikan kepada masyarakat. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Survei dilakukan dengan minimal responden adalah 30 dan dengan responden sebagai berikut: Orang/Perusahaan, Staff/Pejabat Kementerian/Lembaga, Organisasi Internasional, Pemda dan Perwakilan Negara Asing.

Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan Kekonsuleran pada triwulan I,II dan III nilai persepsi tidak dilakukan rata-rata. Misal pada triwulan II didapatkan hasil survei adalah 3,75 sehingga pada tabel pelaporan realisasi dimuat adalah 3,75.

Nilai persepsi kepuasan pelayanan Kekonsuleran pada triwulan IV nilai persepsi dilakukan rata-rata dari triwulan I, II dan III dan IV. Misal pada triwulan I,II, III dan IV didapatkan hasil survei adalah 4,00; 4,00; 4,00 dan 4,00 sehingga nilai persepsi adalah rata-rata nilai persepsi 4,00 kemudian nilai persepsi kepuasan perlindungan WNI pada tabel pelaporan realisasi triwulan IV adalah 4.

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengambilan sampel Morgan dan Krejcie sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

Informasi Kinerja

Tabel III.C1.3.a
Capaian IK C1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI London	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI London	4 (skala 4)	33,33%
Realisasi		4 (skala 4)	
Target		4 (skala 4)	
Capaian		100%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK C1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI London adalah sebesar 4 (skala 4) dari target sebesar 4 (skala 4), sehingga capaian IK sebesar 100% dengan batas toleransi capaian sebesar 100%

Seperti halnya tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2024, KBRI London telah melakukan survei pengukuran tingkat kepuasan pelayanan pelindungan WNI melalui aplikasi survei pada tablet, serta melalui *platform* Google Forms yang diberikan secara *online* kepada WNI yang melakukan permohonan jasa kekonsuleran KBRI London.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.C1.3.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK C1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan
Pelindungan WNI KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
C1.3 Target	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Realisasi	4 (skala 4)	3,87 (skala 4)	4 (skala 4)	3,96 (skala 4)	4 (skala 4)
Capaian	100%	96,75%	100%	99,00%	100%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK C1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Perlindungan KBRI London mengalami kenaikan dari 3,96 (skala 4) pada tahun 2023 menjadi 4 (skala 4) pada tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian target IK Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI KBRI London pada tahun 2024 didukung oleh pelibatan aktif Fungsi Protokol dan Konsuler dalam memantau dan respon cepat atas kasus-kasus yang masuk, serta didukung oleh langkah strategis sebagaimana dijabarkan pada bagian Analisis Program Pendukung Capaian di bawah ini.

Kendala dan Tantangan

Penanganan kasus perlindungan WNI tetap terlaksana dengan optimal di tengah kebutuhan alokasi sumber daya manusia untuk penugasan lainnya terkait layanan kekonsuleran dan keprotokolan. Diperlukan asesmen lebih lanjut untuk menyimpulkan kecukupan jumlah formasi pejabat/staf apabila pelayanan adminduk akan diberikan secara rutin/harian (*on daily basis*).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam pencapaian IK Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI KBRI London mencakup:

- Terhentinya proses penempatan PMI pekerja musiman akibat temuan dugaan *overcharging* pada tahap rekrutmen, turut mengakibatkan beberapa PMI melarikan diri akibat tidak adanya kepastian pekerjaan yang sama di tahun 2025;
- Belum adanya pembahasan bilateral perihal penempatan skema PMI pekerja musiman ke Inggris, utamanya mekanisme yang menitikberatkan pada kesejahteraan/ kepentingan PMI;
- Belum adanya perjanjian pertukaran informasi antara RI – Inggris (*Mandatory Consular Notification*), sehingga Pemerintah Inggris tidak memiliki kewajiban memberitahukan KBRI London sekiranya ada WNI yang membutuhkan pendampingan;

- Terbatasnya akses atas data pribadi (*data protection act*), sehingga informasi terkait WNI terkadang tidak dapat didapatkan dengan utuh.
- Terbatasnya pemahaman WNI terhadap aturan hukum di Inggris dan/atau Irlandia, khususnya terkait hak dan kewajiban terkait ketenagakerjaan.
- Kurangnya pemahaman antar budaya sehingga terjadi gegar budaya maupun kendala bahasa dalam interaksi WNI dengan warga setempat.
- Berakhirnya masa tugas *runner* KBRI London di Irlandia, sehingga upaya perlindungan belum optimal diberikan khususnya kepada para Anak Buah Kapal (ABK) di Irlandia.

Upaya Perbaikan

Adapun saran dan perbaikan ke depan guna terus mencapai target IK dan meningkatkan layanan perlindungan WNI antara lain:

- Intensifikasi koordinasi dengan Pusat terkait upaya penempatan PMI Pekerja Musiman serta para ABK ke Inggris atau Irlandia;
- Intensifikasi upaya peninjauan *Mandatory Consular Notification* dengan pihak Inggris;
- Intensifikasi upaya sosialisasi dan diseminasi informasi kepada para WNI khususnya terkait hak dan kewajiban ketenagakerjaan maupun terkait kawin campur;
- Identifikasi calon *runner* baru untuk mendukung tugas Konhor RI di Irlandia, terutama guna memberikan dukungan upaya perlindungan WNI;
- Peningkatan kapasitas staf Konsuler khususnya terkait pemahaman aspek hukum di Inggris.

Analisis Program Pendukung Capaian

Guna mendukung pencapaian penanganan kasus perlindungan WNI, KBRI London pada 2024 melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Mempererat koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat untuk mendukung perlindungan WNI, termasuk dengan GLAA/*Gangmasters and Labour Abuse Authority* untuk bantuan perlindungan WNI yang bekerja di sektor pertanian, dengan ITF/*International Transport Workers Federation, Unite the Union* dan *Seafarers Centre* untuk perlindungan ABK WNI.
2. Memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat Indonesia di Inggris maupun Irlandia. Melalui kerja sama tersebut, KBRI London terus mendorong upaya sosialisasi dan diseminasi informasi berkaitan dengan upaya perlindungan WNI. Organisasi masyarakat turut memberikan bantuan dalam penanganan kasus-kasus perlindungan WNI.
3. Upaya sosialisasi dan diseminasi informasi terkait perlindungan WNI juga dilakukan dalam setiap agenda layanan Warung Konsuler sepanjang 2024. Kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah temu masyarakat serta memaparkan informasi terkait layanan perlindungan WNI.
4. Pada tahun 2024, KBRI London bekerja sama dengan Direktorat PWNI telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI bagi

seluruh Perwakilan RI di wilayah Eropa. Melalui kegiatan tersebut, KBRI London turut menerima informasi mengenai *best practices* upaya Pelindungan WNI yang dilaksanakan Perwakilan RI lainnya.

Proyeksi Ke Depan

Pada tahun 2025, Pemerintah Inggris diperkirakan akan semakin memperketat arus migrasi khususnya guna menanggulangi permasalahan yang dihasilkan dari *illegal migration*. Di saat bersamaan, tingkat kepercayaan masyarakat Inggris terhadap kabinet pemerintahan *Labour* semakin menurun karena beberapa kebijakan non-populis. Peningkatan persyaratan untuk mendapatkan visa serta peralihan bentuk izin tinggal menjadi bentuk digital juga akan menjadi isu tersendiri bagi WNI yang berencana menetap maupun bepergian ke Inggris. Kriminalitas yang kian meningkat juga patut selalu diwaspadai.

Dalam kaitan ini, kedepannya KBRI London berencana melaksanakan:

- Koordinasi lanjutan dengan Pusat/Kementerian teknis terkait potensi penempatan PMI pekerja musiman pada 2025;
- Penggiatan sosialisasi terkait upaya pelindungan WNI kepada organisasi masyarakat di Inggris maupun Irlandia;
- Penguatan kemitraan dengan *stakeholders* setempat seperti kepolisian, *Home Office*, unsur pemerintahan lainnya;
- *Consular Dialogue* RI-Inggris ke-5, dapat dikaitkan dengan perayaan 75 tahun hubungan bilateral, guna mendorong komitmen Pemerintah Inggris dalam mendukung pelindungan WNI.

Dokumentasi





1. *Pertemuan dengan representatif ITF terkait penanganan kasus ABK*
2. *Konsultasi kekonsuleran dan perlindungan WNI bersama ABK di Irlandia*
3. *Pertemuan dengan Queen Victoria Seamen's Rest (QVSR) Seafarer's Centre*

C2 Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI London

Dukungan adalah sokongan/bantuan. Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak. Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

Kesepakatan bilateral adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh dua negara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional dan multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara mitra KBRI London. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh berbagai pihak.

Analisis IK C2.1 – Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI London

IK ini bertujuan untuk mengukur kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London yang ditindaklanjuti.

Tindak lanjut/implementasi: Tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan, penerapan oleh stakeholder terkait, baik di negara Indonesia maupun di negara akreditasi KBRI London.

Kesepakatan kerja sama bilateral: perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh 2 negara antara Pemerintah Republik

Indonesia dengan negara lain, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Negara akreditasi/wilayah kerja: tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara/wilayah kerja rangkaian dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.

Rencana kesempatan yang akan ditindaklanjuti terdapat pada Dokumen Pemetaan. Dokumen pemetaan adalah rekapitulasi rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dan disusun di awal tahun.

Informasi Kinerja

Tabel III.C2.1.a
Capaian IK C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI London	Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan	4	100%
	Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja beserta negara rangkaian yang akan ditindaklanjuti sesuai dokumen pemetaan	4	
Realisasi		100%	
Target		90%	
Capaian		111%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Sepanjang tahun 2024, KBRI London telah berperan aktif dalam memfasilitasi berbagai kunjungan Kementerian/Lembaga ke Inggris dalam rangka pertemuan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya. KBRI London telah memfasilitasi 4 tindak lanjut kesepakatan bilateral dari 4 rencana tindak lanjut kesepakatan bilateral sehingga diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 100%.

Perbandingan Kinerja

Target IK C2.1 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 90%, dan terealisasi sebesar 100%, dengan capaian IK sebesar 111%. Capaian IK tahun 2024 menunjukkan nilai persentase yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel III.C2.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi
Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
C2.1 Target	86%	80%	86%	87%	90%
Realisasi	100%	100%	100%	166,67%	100%
Capaian	116,2%	116,2%	116,2%	120%	111%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI London mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh penghapusan restriksi Covid-19 di Inggris yang menyebabkan peningkatan intensitas kunjungan pejabat Indonesia ke Inggris.

Dalam empat tahun terakhir, capaian dari realisasi IK C2.1 relatif stabil di mana pada tahun 2021 – 2024 capaian realisasi berada di atas 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Selama tahun 2024, Indonesia telah memfasilitasi berbagai kunjungan delegasi RI ke Inggris sebagai tindak lanjut kesepakatan terkait elevasi kerja sama bilateral Indonesia - Inggris di tahun 2022 serta implementasi dari kesepakatan *Indonesia – UK Partnership Roadmap 2022-2024*.

Indonesia – UK Partnership Roadmap 2022-2024 menggarisbawahi kolaborasi strategis antara kedua negara di berbagai sektor. Rencana kerja sama ini menekankan kerjasama ekonomi, ekspansi perdagangan, dan investasi. Indonesia dan Inggris juga bertujuan untuk memperkuat ikatan diplomatik dan mendorong pertukaran budaya antar kedua negara. Perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama, dengan upaya bersama dalam mengatasi tantangan global. Tujuan utamanya adalah memperdalam kemitraan jangka panjang, memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk keuntungan kedua negara.

Setelah disepakati pada bulan April 2022, baik Indonesia maupun Inggris menjadikan implementasi *Partnership Roadmap* sebagai salah satu fokus. Hal ini diperkuat juga dengan strategi *Indo-Pacific tilt* yang dianut oleh Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian dokumen *Partnership Roadmap* ini berakhir masa berlakunya pada tahun 2024 ini dan seiring juga dengan pergantian pemerintahan Inggris dari Partai Konservatif ke Partai Buruh pada Juli 2024. Pergantian kepemimpinan di kedua negara yaitu terpilihnya PM Inggris Keir Starmer pada Juli 2024 dan dilantiknya Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober 2024 merupakan momentum untuk memperbaharui komitmen kedua negara. Pada kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Inggris pada 20 - 22 November 2024, Presiden Prabowo dan PM Starmer sepakat untuk meluncurkan dokumen Kemitraan Strategis yang baru pada

tahun 2025 mendatang dan termuat dalam *Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom by Prime Minister Keir Starmer and President Prabowo Subianto*, tanggal 21 November 2024.

Sebagai tindak lanjut *Partnership Roadmap* maupun hasil Kunjungan Presiden RI, KBRI London telah memfasilitasi beberapa pertemuan di tingkat Eksekutif maupun Yudikatif antara lain:

- Fasilitasi kunjungan Delegasi Kemenkopolkam RI dan Polri pada 30 April - 3 Mei 2024;
- Kunjungan Delegasi Kejaksaan Agung RI pada 5 - 11 Juni 2024;
- Kunjungan Delegasi Mahkamah Konstitusi RI pada 24 - 26 Juni 2024;
- Fasilitasi kunjungan delegasi Bappenas RI pada 9 - 14 Juli 2024;
- Kunjungan delegasi Kemenkopolkam RI, bulan September 2024. KBRI London mendampingi delegasi RI bertemu dengan *UK Ministry of Justice* dan *UK Crown Prosecution Service* pada 16 September 2024 dan dengan *UK Supreme Court* 17 September 2024;
- Kunjungan Komisi Yudisial RI ke Dublin, Irlandia, September 2024;
- Kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI pada 1 - 4 Oktober 2024
- Kunjungan Delegasi Mabes Polri pada 28 - 31 Oktober 2024;
- Kunjungan delegasi Bareskrim POLRI untuk menghadiri pertemuan INTERPOL pada 31 Oktober - 9 November 2024;
- Kunjungan delegasi Ditjen Strahan Kemenhan terkait isu kedaulatan pada 7-12 November 2024;
- Kunjungan delegasi FISIP Universitas Indonesia dalam rangka kerja sama dengan *University of Leeds* pada 25 November - 1 Desember 2024;
- Kunjungan Wakil Ketua BPK RI pada 15-16 Desember 2024.

Luasnya sektor kerja sama yang diatur dalam *Partnership Roadmap* sebelumnya juga menjadi peluang bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang khususnya terkait bidang ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya. Hal ini akan diperkuat dalam penyusunan *New Strategic Partnership* Indonesia-UK mendatang mengacu pada *Joint Statement* antara Presiden RI dan PM Inggris pada 21 November 2024.

Dengan adanya *New Strategic Partnership*, diharapkan akan semakin meningkatkan koordinasi dan kolaborasi serta intensitas pertemuan antara kedua negara untuk membahas tindak lanjut kerja sama berbagai bidang yang tercantum pada *New Strategic Partnership*.

Selain itu, kondisi *new normal* berarti tidak ada lagi restriksi perjalanan ke Inggris pasca Covid-19 juga memberikan kemudahan dan menjadi dorongan tersendiri bagi delegasi RI untuk mengadakan pertemuan dengan *counterpart* di Inggris. Namun demikian perlu diantisipasi adanya kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah RI.

Kendala dan Tantangan

Meskipun Indonesia dan Inggris telah sepakat untuk menjalin kerja sama yang erat, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dapat menghambat kelancaran implementasi kesepakatan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan regulasi dan kebijakan di kedua negara, yang mungkin memerlukan harmonisasi untuk memastikan konsistensi pelaksanaan. Perubahan kebijakan politik khususnya dengan pergantian kabinet Inggris juga mempengaruhi implementasi kesepakatan kerja sama. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemahaman yang cermat terhadap semua variabel ini menjadi kunci untuk mengatasi kendala dan memastikan kesuksesan dari kerja sama bilateral Indonesia dan Inggris. Selain itu, perbedaan budaya dan pemahaman atas aspek tertentu dalam kesepakatan dapat menjadi hambatan komunikasi dan kolaborasi efektif antara kedua belah pihak.

Faktor internal pada tahun 2024 adalah baik Inggris, Irlandia dan Indonesia sama - sama melaksanakan pemilu pada tahun ini (Indonesia pada Februari 2024, Inggris pada Juli 2024 dan Irlandia pada November 2024) yang menyebabkan fokus pemerintahan masing-masing negara adalah pada penyelenggaraan pemilu dan pergantian pemerintahan.

Selain itu, kendala lain yang cukup signifikan adalah kesulitan untuk mencari jadwal pertemuan khususnya di tingkat Menteri. Sebagai contoh, kegiatan *Partnership Forum* RI-UK yang semula dijadwalkan untuk diadakan di tahun 2024 belum dapat terlaksana karena kendala penjadwalan kedua Menlu (yang juga disebabkan tahun politik).

Perlu dipertimbangkan juga adanya isu kedaulatan yang terkadang masih sedikit mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Inggris walaupun tidak signifikan.

Upaya Perbaikan

Dalam mengatasi hambatan dalam pemantauan tindak lanjut kesepakatan bilateral ke depan, secara internal Pemri akan dilakukan konsolidasi posisi yang lebih intensif guna mewujudkan *New Strategic Partnership* dengan Inggris maupun Mekanisme Konsultasi Bilateral dengan Irlandia dalam meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang melalui kerangka *New Strategic Partnership* dan Mekanisme Konsultasi Bilateral. Beberapa langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi seluruh pihak antara lain:

- Adanya pertemuan sela dalam bentuk *Senior Official Meeting* menjadi salah satu solusi utama baik secara internal maupun eksternal.
- Memperkuat koordinasi dengan *stakeholders* baik di Pusat maupun di negara akreditasi salah satunya dengan pertemuan koordinasi setidaknya satu bulan sekali dengan Direktorat Eropa I dan dengan Kemlu Inggris dan Kemlu Irlandia.
- Lebih aktif dalam melibatkan berbagai pihak untuk mendukung kepentingan KBRI melalui pemanfaatan peran Konhor di Irlandia Martin Murray, forum APPGI, ISME, dan *Friends of Indonesia* dalam berbagai isu fokus KBRI London.

Analisis Program Pendukung Capaian

Untuk mendukung pertemuan-pertemuan tindak lanjut dari kesepakatan bilateral, di tahun 2024 telah diselenggarakan beberapa pertemuan koordinasi bilateral antara perwakilan dari Kementerian/Lembaga di Pusat dengan *counterparts* di Inggris dan Irlandia. Beberapa program pendukung tindak lanjut kesepakatan bilateral antara lain:

Pertemuan di Tingkat Kepala Negara

Atas undangan PM Inggris, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Inggris pada 20 - 22 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Subianto diagendakan untuk melakukan sejumlah pertemuan, diantaranya adalah audiensi dengan Raja Charles III, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, hingga Wakil PM Inggris Angela Rayner. Selain itu, Presiden Prabowo juga menghadiri acara *CEO Roundtable Forum*.

Pada audiensi dengan Raja Charles III, 21 November 2024, Presiden RI menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi Raja Charles III terhadap lingkungan hidup termasuk upaya preservasi dan restorasi kawasan hutan dalam rangka pencapaian target *net-zero emission*. Presiden RI juga mendiskusikan peluang dukungan Inggris terhadap pengembangan SDM di Indonesia melalui program makan bergizi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keahlian generasi muda.

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Keir Starmer, 21 November 2024 Presiden RI telah mendiskusikan beberapa hal yaitu: apresiasi 75 tahun hubungan diplomatik dan sepakat tegaskan Kemitraan Strategis baru yang lebih erat dan mendalam; peningkatan nilai perdagangan bilateral dan hindari pendekatan diskriminatif yang menghalangi perdagangan; peningkatan kolaborasi di bidang industri pertahanan dan dukungan Inggris untuk pengembangan Sistem Keamanan Maritim Nasional; keprihatinan terkait memburuknya situasi Gaza, Timur Tengah, dan Ukraina; serta kolaborasi dan peluang dukungan Inggris untuk program prioritas seperti penguatan pendidikan dan riset, pengembangan SDM, dan makan bergizi.

Pertemuan di Tingkat Menteri Luar Negeri

Dengan Irlandia telah dicapai 1 (satu) kesepakatan yaitu MoU Konsultasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani saat pertemuan bilateral Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Irlandia Micheál Martin di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, 24 September 2024. Kedua Menlu juga membicarakan sejumlah isu bilateral dan multilateral yang menjadi perhatian kedua negara.

Pada 21 November 2024 telah pula dilakukan pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Inggris, The Rt. Hon. David Lammy. Pada pertemuan dimaksud, telah dibahas Kemitraan Strategis yang baru, program prioritas nasional dan ajakan kerja sama terkait ketahanan pangan, energi terbarukan, serta mekanisme 2+2 *Dialogue* untuk memperkuat kemitraan di bidang politik dan pertahanan. Kedua Menlu juga membahas situasi global terkait konflik di Ukraina, Palestina, Laut China Selatan dan Timur Tengah.

Pertemuan di Tingkat Menteri Lainnya

Minister of State for Development Inggris, The Rt Hon Anneliese Dodds, MP telah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury pada 17 September 2024. Kedua pihak membicarakan kerja sama kemitraan strategis Indonesia-Inggris untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedua negara. Kedua negara juga pandang perlunya mengoptimalkan *partnership roadmap* dan mekanisme yang telah ada (termasuk JETCO/*Joint Economic and Trade Committee* RI-Inggris) untuk eksplorasi penyusunan *Free Trade Area* Inggris-Indonesia. Minister Dodds juga bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan tanda tangani MoU Kerja Sama Pembangunan.

Menlu Inggris (*Foreign Secretary*) David Lammy berkunjung ke Indonesia pada 20 Oktober 2024 untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI sekaligus melakukan *courtesy call* dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Menlu Lammy berkesempatan diterima Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan. Dalam pertemuan tersebut sejumlah hal yang diangkat adalah sebagai berikut: penguatan kemitraan strategis kedua negara; kerja sama di bidang *green innovation* dan *sustainable energy transition*; memperkuat kerja sama keamanan di kawasan. Selain itu Menlu Lammy berkesempatan melakukan sejumlah kegiatan lainnya antara lain: melakukan pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub sekaligus meninjau stasiun LRT. Menlu Lammy tegaskan komitmen kerja sama UK-Indonesia di bidang transportasi berkelanjutan, termasuk melalui rencana *feasibility studies/investasi*. Menlu Lammy juga menghadiri jamuan kenegaraan serta *private event* dengan Kedubes Inggris di Jakarta;

Pertemuan di Tingkat Senior Official

Dilakukan pertemuan antara Dirjen Amerika dan Eropa Umar Hadi dengan Dirjen Indo-Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara FCDO Owen Jenkins pada 21 November 2024 dan antara Dirjen Amerika dan Eropa dengan Direktur FCDO Bridget Brind pada 22 November 2024 di

London sebagai bagian dari Kunjungan Kerja Presiden RI ke Inggris. Beberapa narasi utama yang turut dibahas pada kedua pertemuan dimaksud adalah: diplomasi Indonesia terhadap China dan Laut China Selatan; program prioritas pemerintahan baru Indonesia; dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait perang di Ukraina.

Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Inggris dan 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Irlandia

Pada 21 Oktober 2024 telah diselenggarakan Resepsi Diplomatik di *National Concert Hall*, Dublin Irlandia dalam rangka peringatan 40 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Irlandia dan pada 29 Oktober 2024 telah dilaksanakan Resepsi Diplomatik di *Lancaster House* London, Inggris dalam rangka peringatan 75 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Inggris.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Inggris juga telah dilaksanakan rangkaian kegiatan sepanjang tahun 2024 antara lain penganugerahan *Ambassador's Award* berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan penyelenggaraan sejumlah diskusi panel antara lain pada bulan November 2024, KBRI London menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain diskusi bertema *Indonesia-UK Partnership for People, Planet, Prosperity and Peace* yang dihadiri sejumlah anggota parlemen Inggris (MPs) pada 27 November 2024 menghadirkan sejumlah pembicara dari Universitas Indonesia, Lemhanas, University of Leeds dan University of York. Selain itu juga dilaksanakan diskusi serupa di University of Leeds pada 29 November 2024.

Sementara rangkaian kegiatan lainnya dalam rangka peringatan 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Irlandia sepanjang 2024 yang terdiri dari: Peluncuran Logo dengan tema "*Our Peoples, Our Connection, Our Future*" dalam format *IG Live* Dubes RI - Dubes Irlandia Pdraig Francis di Jakarta, Mei 2024; Penampilan bersama Dubes RI - *National Concert Hall Gamelan Orchestra* di Dublin, Mei 2024; Penyelenggaraan *Indonesia - Ireland Financial Services and Investment Partnership Roundtable* (21 Oktober 2024); dan diskusi panel di *Royal College of Surgeons in Ireland* Dublin (22 Oktober 2024).

Kunjungan Parlemen Indonesia ke Inggris

Sepanjang 2024 tercatat sejumlah kunjungan parlemen Indonesia ke Inggris antara lain:

- Kunjungan Delegasi Komisi VIII DPR RI pada 8 - 13 Mei 2024;
- Kunjungan delegasi DPR RI Komisi II pada 7 -13 Juli 2024;
- Pertemuan delegasi GKSB DPR RI dengan *Department Business and Trade UK*, BGIPU, dan *Deputy Speaker of Parliament* Nusrat Ghani pada 11 September, pertemuan dengan *Westminster Foundation for Democracy* dan *Parliamentary Under Secretary for Indo-Pacific* Catherine West, pada 12 September 2024;
- Kunjungan delegasi Fraksi PKS DPR RI pada 10 - 16 Desember 2024 untuk melakukan pertemuan terkait isu Palestina dengan komunitas muslim Inggris dan Wakil Wali Kota Muslim di Inggris;
- Kunjungan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bersama Komisi XI DPR RI pada 15 - 21 Desember 2024;

Selain itu Parlemen Inggris juga berencana berkunjung ke Indonesia pada Februari 2025 dalam kerangka *British Group Inter-Parliamentary Union* (BGIPU).

Dengan fasilitasi KBRI London untuk mensukseskan pertemuan-pertemuan pejabat Indonesia dengan *counterpart* mereka di Inggris dan Irlandia, semakin memperlancar koordinasi sehingga dapat tercapainya peningkatan kerja sama bilateral sebagai implementasi dari *Indonesia - UK Partnership Roadmap 2022-2024, Joint Statement on New Strategic*

Partnership Indonesia-UK serta Mekanisme Konsultasi Bilateral yang telah disepakati Indonesia dengan Irlandia.

Proyeksi Ke Depan

Dalam proyeksi tahun 2025, terlihat adanya komitmen kuat dari Indonesia dan Inggris untuk melanjutkan dan mengimplementasikan kesepakatan kerja sama, terutama terkait penyusunan *Indonesia - UK New Strategic Partnership*. Selain itu landasan polugri Irlandia berdasarkan *Global Ireland 2025* juga akan mengalami penyesuaian seiring berakhirnya masa berlaku dokumen tersebut.

Proyeksi ini menyoroti upaya bersama dalam meningkatkan kerja sama politik, keamanan dan maritim, dengan fokus pada isu keamanan, pertahanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pembangunan manusia, energi terbarukan dan politik luar negeri yang saling menguntungkan. Selain itu, terdapat langkah-langkah konkret dalam mengatasi kendala regulasi dan perbedaan kebijakan antar negara, dengan tujuan untuk mencapai konsistensi pelaksanaan.

Proyeksi ini juga menitikberatkan pada kolaborasi dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim komitmen bersama untuk keamanan global. Melalui penguatan hubungan diplomatik dan pertukaran budaya, kedua negara berkomitmen untuk membangun fondasi yang kokoh bagi perkembangan positif dalam kemitraan ini. Dengan demikian, proyeksi tahun 2025 menjanjikan langkah-langkah konkret dan kolaboratif yang mendukung visi kesepakatan kerja sama bilateral, khususnya dalam menindaklanjuti momentum perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Inggris dan 40 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Irlandia di tahun 2024.

Di Inggris dan Irlandia, hasil pemilu dapat membawa perubahan dalam struktur pemerintahan dan orientasi kebijakan di mana saat ini Partai Buruh berkuasa di Inggris secara mayoritas walaupun kebijakannya cenderung tidak populer, dan akan terjadi peralihan kekuasaan antara Fine Gael dengan Fianna Fail di Irlandia. Implikasinya terhadap implementasi arah *New Strategic Partnership* dengan Inggris ataupun Mekanisme Konsultasi Bilateral dengan Irlandia dapat berkisar dari penyesuaian kebijakan ekonomi hingga perubahan fokus dalam kerja sama internasional. Oleh karena itu, pemantauan yang cermat terhadap perubahan politik di Inggris menjadi esensial untuk menyesuaikan strategi implementasi.

Di Indonesia, pemerintahan baru juga dapat memengaruhi dinamika kebijakan dan arah kebijakan luar negeri. Hasil pemilihan dapat memunculkan prioritas baru atau perubahan dalam pendekatan terhadap mitra internasional. Oleh karena itu, perlu adanya fleksibilitas dalam penyusunan *New Strategic Partnership* agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi.

Pentingnya pemahaman konteks politik di kedua negara sebagai faktor penting dalam mengantisipasi dan menanggapi perubahan yang mungkin terjadi dalam penyusunan *New Strategic Partnership Indonesia-UK*. Selain itu, Indonesia dan Irlandia juga telah menyepakati mekanisme konsultasi bilateral dan diharapkan di tahun 2025 sudah akan terlaksana pertemuan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

Dokumentasi



Pertemuan Delegasi GKSBR DPR RI dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) September 2024



Pertemuan Delegasi Komisi II DPR RI dengan *Ministry of Justice UK*, Juli 2024



Kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra, Oktober 2024



Kunjungan Delegasi Kemenkopolhukam RI, September 2024



Kunjungan Delegasi Bappenas RI bertemu *Department of Business and Trade UK*, Juli 2024



Penyelenggaraan Diskusi Panel bertajuk "Reading the UK Election" pada hari Pemilu Inggris 4 Juli 2024 dihadiri komunitas *think tank* dan perwakilan diplomatik

Internal Business Process Perspective

Internal Business Process Perspective yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi. Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

B1 Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI London yang Kuat

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersebut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan assurance terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara. Sasaran strategis ini mencerminkan prioritas strategis yang mesti dicapai oleh Perwakilan RI dalam rangka relasi bilateral dengan negara akreditasi yang menjadi naungan Perwakilan.

Analisis IK B1.1 – Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London

Deskripsi IK

IK ini dihitung dari jumlah kesepakatan yang dicapai pada setiap proses perundingan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi merupakan kesepakatan yang disepakati dalam negosiasi atau perundingan yang bersifat landasan/payung hukum dan tidak memiliki monetary value. Kesepakatan ini meliputi namun tidak terbatas pada: bidang perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik.

Ruang lingkup kesepakatan bidang sosial meliputi namun tidak terbatas pada: kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Ruang lingkup kesepakatan bidang budaya meliputi namun tidak terbatas pada: pertukaran budaya, pelestarian aset-aset budaya.

Batas waktu: Jumlah kesepakatan yang disepakati selama satu periode anggaran.

Ruang lingkup: Kesepakatan kerja sama bilateral juga termasuk dalam kerangka kerjasama yang dibentuk antara Pemerintah nasional/negara bagian/wilayah kerja dengan stakeholders terkait di Indonesia (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Parlemen, lembaga think tank, lembaga pendidikan, dan badan usaha).

Informasi Kinerja

Tabel III.B1.1.a
Capaian IK B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London	10	28,57%
Realisasi		120%	
Target		7	
Capaian		120%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London adalah sebesar 10 kesepakatan dari target sebesar 7, sehingga capaian IK sebesar 120% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Target IK B1.1 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 7 kesepakatan, dan terealisasi sebesar 10, dengan capaian IK sebesar 120%. Capaian IK tahun 2024 menunjukkan nilai

persentase yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel III.B1.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK		2020	2021	2022	2023	2024
B1.1	Target	1	5	5	7	7
	Realisasi	4	8	18	9	10
	Capaian	120%	120%	120%	120%	120%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI London mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya intensitas kerja sama bilateral Indonesia-Inggris yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Selaras dengan hal tersebut, nilai investasi bilateral Indonesia-Inggris dari tahun 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Perkembangan ini juga berdampak positif akan tetapi potensi kerja sama dan kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya terus mencapai target.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya di Inggris merupakan dampak positif dari kinerja diplomasi ekonomi yang dilakukan selama periode 2022-2024. Penyelenggaraan KTT G-20 tahun 2022 dan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 menjadi pemicu penguatan postur hubungan bilateral dengan negara akreditasi, utamanya Inggris. Dalam hal ini, Inggris dan Irlandia menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik.

Kunjungan Presiden Prabowo juga menjadi pendorong bagi pemangku kepentingan di dalam negeri dan mitra di Inggris untuk menyelesaikan kesepakatan bidang ekonomi, sosial, budaya di tahun 2024. Selain itu, koordinasi erat yang dilakukan oleh KBRI London dengan K/L pusat dan juga mitra kerja di negara akreditasi mendorong adanya kesepakatan bilateral yang mendorong kerja sama mulai dari dukungan pendanaan, teknis hingga *capacity building*.

Kendala dan Tantangan

Perubahan pemerintahan dan dinamika politik baik di Inggris, Irlandia maupun Indonesia menjadi salah satu alasan penundaan pembahasan beberapa kesepakatan bidang ekonomi,

sosial, dan budaya. Perubahan fokus dan prioritas pemerintah Inggris juga menjadi faktor dalam pembahasan rancangan kesepakatan bidang ekonomi, budaya, dan sosial.

Upaya Perbaikan

Koordinasi yang lebih erat dengan stakeholders di dalam negeri dan Kedubes Inggris untuk tindak lanjut serta pencatatan perkembangan kesepakatan. Upaya penguatan kerja sama dengan Irlandia juga akan kembali dilakukan pada periode 2025-2026.

Analisis Program Pendukung Capaian

Realisasi IK jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di Inggris dan Irlandia dicapai atas kerjasama KBRI London dengan K/L pusat, dan mitra kerja utama di negara akreditasi.

Secara umum, KBRI London mencapai 10 kesepakatan ekonomi, sosial dan budaya, diantaranya:

1. Kesepakatan Mardel dengan [REDACTED]
2. MoU Kerja Sama antara RS Kesehatan Jiwa Marzoeeki Mahdi dengan [REDACTED]
3. *Non-Disclosure Agreement* antara RS PON [REDACTED]
4. MoU Kerja Sama Mineral Kritis Indonesia-Inggris.
5. Kesepakatan MRA Sertifikasi Halal BPJPH dengan UK Halal Food Authority.
6. Kesepakatan MRA Sertifikasi Halal BPJPH dengan Halal Certification Organization Limited.
7. Kesepakatan MRA Sertifikasi Halal BPJPH dengan Halal Certification Europe.
8. Kesepakatan MRA Sertifikasi Halal BPJPH dengan Islamic Chamber for Halal Services.
9. MoU Saling Pengertian tentang Kerja Sama Kesehatan antara Kementerian Kesehatan RI dengan Departemen Kesehatan dan Layanan Sosial Inggris.
10. MoU Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan RI dengan Cancer Research UK.

Beberapa pencapaian kesepakatan diatas merupakan deliverables dari kunjungan delegasi RI ke negara akreditasi KBRI London. [REDACTED]

[REDACTED] Sementara, MoU Kerja Sama Mineral Kritis terwujud pada kunjungan Anneliese Dodds, Menteri Negara Bidang Pembangunan ke Indonesia.

Di tahun 2024, Indonesia juga merampungkan kesepakatan pengakuan bersama sertifikasi halal dengan empat lembaga halal di Inggris. Empat kesepakatan ini menambah referensi penguatan hubungan bilateral dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Proyeksi Ke Depan

Upaya menghadirkan kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara akreditasi KBRI London diperkirakan akan tetap menantang di tahun 2025 dan 2026. Hal ini

mempertimbangkan beberapa tantangan yang dihadapi di Inggris dan Indonesia. Perkembangan politik-ekonomi global dan dinamika politik internal diperkirakan mendorong negara akreditasi melakukan penyesuaian fokus hubungan bilateral dengan Indonesia.

Area kerjasama lain yang berpotensi dapat terealisasi selama periode 2025-202 antara lain: transportasi, kesehatan, pariwisata ekonomi kreatif, pendidikan, dan investasi. Selain itu, peluang kerja sama dengan Irlandia masih terbuka luas untuk dijajaki melalui pelibatan pemangku kepentingan di Indonesia. KBRI London cukup optimis dapat menyerupai capaian jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Dokumentasi



Penandatanganan MRA BPJPH dengan 4 Badan Sertifikasi Halal Inggris



MoU Kerja Sama Mineral Kritis Indonesia-Inggris

Analisis IK B1.2 – Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI London

Deskripsi IK

IK ini dihitung dari jumlah kesepakatan yang dicapai di bidang politik, keamanan dan maritim.

Diplomasi Maritim adalah pelaksanaan polugri yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan antar negara di bidang kelautan dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman. Ruang lingkup bidang maritim meliputi namun tidak terbatas pada: keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman.

Diplomasi Politik dan Keamanan adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih mengenai hubungan politik antara dua negara atau lebih, juga mengenai keamanan pada masing-masing negara.

Ruang lingkup bidang politik dan keamanan meliputi namun tidak terbatas pada: hubungan politik antara dua negara atau lebih, juga mengenai keamanan pada masing-masing negara.

Jumlah kesepakatan yang disepakati selama satu periode anggaran. Kesepakatan kerja sama bilateral juga termasuk dalam kerangka kerjasama yang dibentuk antara Pemerintah nasional/negara bagian/wilayah kerja dengan Pemerintah pusat/daerah di Indonesia.

Informasi Kinerja

Tabel III.B1.2.a
Capaian IK B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI London	Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI London	5	28,57%
Realisasi		5	
Target		6	
Capaian		83,33%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI London adalah sebesar 5 kesepakatan dari target sebesar 6 kesepakatan, sehingga capaian IK sebesar []% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Target IK B1.2 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 6 kesepakatan, dan terealisasi sebesar 5 kesepakatan, dengan capaian IK sebesar 83,33 %. Capaian IK tahun 2024 menunjukkan nilai persentase yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel III.B1.2.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
B1.1					
Target	2	5	3	6	6
Realisasi	5	6	3	7	5
Capaian	120%	120%	100%	116,67%	83,3%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI London mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan intensitas kunjungan baik pejabat Indonesia ke Inggris maupun pejabat Inggris ke Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir, capaian dari realisasi IK B1.2 konsisten berada kisaran 100% atau lebih. Meskipun demikian, capaian di tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 83,3%.

Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian IK

Di tahun 2024, Inggris mengalami perubahan politik mendasar pasca Pemilu Juli 2024 yang menandai pergantian pemerintahan dari Partai Konservatif kepada Partai Buruh. Indonesia sendiri baru membentuk pemerintahan dan kabinet baru bulan Oktober 2024 yang ditandai perubahan struktur pemerintahan antara lain penambahan dan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi negosiasi kesepakatan antar kedua negara khususnya dalam hal mengatur pertemuan antar kedua negara. Irlandia sendiri baru melaksanakan Pemilu pada akhir November 2024 dan pemerintahan baru diperkirakan baru akan terbentuk pada awal tahun 2025.

Selain itu kesepakatan *Partnership Roadmap* yang telah disepakati di tahun 2022, juga berakhir berlakunya pada tahun 2024. Namun terdapat dorongan bagi kedua negara untuk memperbaharui komitmen untuk membentuk Kemitraan Strategis yang baru di tahun 2025 dalam kerja sama yang lebih konkret.

Di tahun 2024 juga terdapat peningkatan intensitas kunjungan pejabat baik dari Indonesia ke Inggris maupun sebaliknya. Kunjungan-kunjungan ini menghasilkan beberapa kesepakatan

konkret untuk peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim antara kedua negara.

Di tingkat teknis, koordinasi yang kuat antara KBRI London, Pusat, dan Kemlu Inggris serta Kemlu Irlandia secara daring juga sangat membantu tercapainya kesepakatan. Pertemuan koordinasi intensif secara daring memberikan platform bagi seluruh *stakeholders* untuk melakukan pembahasan sehingga isu-isu *contentious* dapat dicari jalan tengah yang dapat disepakati kedua belah pihak.

Komitmen Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik juga menjadi kunci keberhasilan pencapaian jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim. Menuju tahun politik Inggris di tahun 2024, Pemerintahan baru Partai Buruh semakin semangat dalam meningkatkan jumlah kesepakatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Indonesia yang menjadi salah satu pemain kunci di kawasan. Hal ini ditandai dengan kunjungan sejumlah pejabat tinggi ke kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia antara lain Menlu David Lammy bulan Oktober 2024 dan Menteri Pembangunan Anneliese Dodds bulan September 2024. Selain itu jabatan Menteri Indo-Pasifik juga dipertahankan dengan ditunjuknya *Parliamentary Under-Secretary* Catherine West oleh pemerintahan PM Keir Starmer.

Untuk Irlandia, KBRI London terus aktif melakukan upaya-upaya untuk *engage* para pemangku kepentingan baik di Pusat maupun di Irlandia untuk mendorong kerja sama di bidang politik dan keamanan antara kedua negara. Masih banyak potensi kerja sama khususnya di bidang politik dan keamanan yang dapat digali oleh Indonesia dan Irlandia terutama pasca peringatan 40 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Irlandia di tahun 2024 dan ditandatanganinya Memorandum tentang Mekanisme Konsultasi Bilateral pada bulan September 2024.

Kendala dan Tantangan

Pemenuhan target jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim antara Indonesia dengan Inggris dan Irlandia dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- Faktor internal pada tahun 2024 adalah baik Inggris, Irlandia dan Indonesia sama - sama melaksanakan pemilu pada tahun ini (Indonesia pada Februari 2024, Inggris pada Juli 2024 dan Irlandia pada November 2024) yang menyebabkan fokus pemerintahan masing-masing negara adalah pada penyelenggaraan pemilu dan pergantian pemerintahan.
- Perbedaan pendekatan politik dan keamanan antara kedua negara memerlukan negosiasi yang intens untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama terkait kerja sama pertahanan.
- Di bidang maritim, perbedaan interpretasi hak dan kewajiban maritim dapat menimbulkan ketidaksepakatan.
- Isu kedaulatan [REDACTED]

[REDACTED] Hal ini sedikit banyak mempengaruhi relasi Indonesia dengan Inggris.

- Birokrasi Inggris saat ini tengah mencari bentuk terutama dengan restrukturisasi dan efisiensi termasuk SDM pegawai negeri yang dipangkas dapat memperlambat proses negosiasi dan implementasi kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif dan mekanisme koordinasi yang baik untuk mencapai target kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim antara ketiga negara ini.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan kendala yang mungkin muncul dalam pemenuhan jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim, KBRI London dapat melakukan beberapa langkah perbaikan ke depan antara lain:

- Mempererat koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan *stakeholders* terkait di negara akreditasi antara lain: *Desk* Indonesia di FCDO UK dan DFA Irlandia (pemerintah), BGIPU UK (parlemen), Konhor RI di Irlandia, kalangan *think tank* (seperti *Chatham House*), akademisi dan perwakilan negara-negara anggota ASEAN *London Committee* (ALC) dengan dukungan anggaran representasi yang memadai.
- Mempererat komunikasi dengan perwakilan negara akreditasi di Indonesia yaitu Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan Kedutaan Besar Irlandia di Jakarta.
- Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi di Pusat, baik di Kementerian Luar Negeri (dhi. Ditjen Amerika dan Eropa) ataupun Kementerian/Lembaga terkait serta pihak parlemen (DPR/DPD) terutama terkait rencana kunjungan delegasi yang perlu disinkronkan dengan jadwal dan agenda pemerintah dan parlemen di negara akreditasi.
- Dialog rutin antara perwakilan Indonesia dengan Inggris dan Irlandia melalui pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan tingkat teknis untuk membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang posisi masing-masing negara terkait berbagai isu.
- Koordinasi pasca-pemerintahan baru di kedua negara akreditasi. Tahun 2025 akan menjadi tahun awal pemerintahan kedua negara akreditasi di mana Indonesia dan Inggris baru membentuk pemerintahan baru di tahun 2024 sementara Irlandia akan membentuk pemerintahan baru pada awal tahun 2025. Setelah pemilu di kedua negara, perlu adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan kelangsungan kebijakan luar negeri yang konsisten dan mendukung kerjasama bilateral.
- Peningkatan kerja sama bidang keamanan untuk membangun kemitraan lebih erat termasuk kerjasama dalam menanggulangi terorisme, kejahatan terorganisir, dan keamanan maritim. Kerja sama dapat melibatkan pertukaran intelijen, pelatihan bersama, dan patroli maritim bersama.
- Inisiatif bersama untuk membangun proyek-proyek konkret bersama dalam berbagai bidang, seperti penelitian dan pengembangan, energi terbarukan, atau investasi infrastruktur. Hal ini dapat menciptakan iklim positif untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan politik.
- Diplomasi publik melalui pertukaran budaya, pendidikan, dan pariwisata untuk membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat kedua negara, mendukung kesepakatan di tingkat politik.

Upaya-upaya ini perlu disertai dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan bersedia menanggapi dinamika politik yang mungkin muncul, menjadikan hubungan bilateral lebih adaptif dan produktif.

Analisis Program Pendukung Capaian

Secara umum, keberhasilan pencapaian kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim tidak lepas dari berbagai kegiatan pendukung sebagai platform untuk negosiasi maupun *confidence building* antara kedua negara.

Selama tahun 2024, telah dicapai 5 kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim antara lain yaitu:

- Kesepakatan Memorandum Saling Pengertian tentang Mekanisme Konsultasi Bilateral RI - Irlandia yang ditandatangani Menlu RI dan Menlu Irlandia di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, 24 September 2024 di New York, AS.
- Kesepakatan Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Pembangunan yang ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Anneliese Dodds dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bulan September 2024 di Jakarta.
- Kesepakatan untuk meluncurkan Kemitraan Strategis Baru RI - UK yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan PM Inggris Keir Starmer di London pada 21 November 2024 tertuang dalam *Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom by Prime Minister Keir Starmer and President Prabowo Subianto*, .
- Kesepakatan penguatan kerja sama di bidang militer antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Inggris yang tertuang dalam [REDACTED]
- Kesepakatan kerja sama antara [REDACTED]



Pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu Irlandia Micheal Martin di New York, September 2024

Beberapa program dan pertemuan yang membantu untuk mendukung diperolehnya kesepakatan-kesepakatan di atas sepanjang tahun 2024 antara lain yaitu:

- Pertemuan Dubes RI London dengan Dubes Inggris di Jakarta, Pertemuan dengan *Team Leader* Indonesia FCDO, dan pertemuan dengan Chris Alden dari LSE pada bulan Januari 2024;
- Pertemuan Dubes RI dengan Catherine West MP dari Partai Buruh pada bulan Februari 2024;
- Pertemuan Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN dengan Dirjen Indo Pasifik FCDO dan pertemuan KBRI London dengan KCL SEA SOC pada bulan Maret 2024;
- Pertemuan Dubes RI dengan Prof John Bew, pertemuan Fungsi Politik dengan APU Kemlu Irlandia, pertemuan delegasi Kemenko Polhukam dengan *GCSI Cabinet Office*, dan pertemuan delegasi Kemenko Polhukam dengan *Metropolitan Police*, serta pertemuan Dubes RI dengan Menlu Bayangan Inggris dari Partai Buruh, David Lammy pada bulan April 2024;
- Pertemuan dengan Desk Indonesia FCDO, pertemuan dengan Desk Ukraina-Rusia FCDO, pertemuan dengan Partai Buruh Inggris, menghadiri kegiatan *MIKTA Breakfast*

Meeting di kediaman Dubes Australia yang dihadiri Sekjen IMO Arsenio Dominguez pada bulan Mei 2024;

- Pertemuan dengan *UK Foreign Secretary Special Representative for Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian Territory*, Mr. Mark Bryson-Richardson terkait isu Palestina, pertemuan dengan Indonesian Desk FCDO serta pertemuan dengan perwakilan *Asia-Pacific Desk Officer, Team East & South East Asia, International Strategy, Engagement & Devolution Directorate, Home Office* (Kementerian Dalam Negeri) Inggris pada bulan Juni 2024;
- Pertemuan Dubes RI dengan Mantan Utusan Khusus PM Inggris di bidang perdagangan Richard Graham pada 10 Juli 2024, pertemuan DCM KBRI London dengan pejabat *desk* Indonesia FCDO pada 23 Juli 2024, pertemuan Dubes RI dan DCM RI dengan *Parliamentary Under Secretary* Catherine West MP pada 31 Juli 2024, pertemuan DCM RI dengan Direktur Asia Pasifik *Chatham House*, Ben Bland pada 24 Juli 2024, serta pertemuan Fungsi Politik dengan *International Secretary* Partai Buruh Inggris pada 29 Juli 2024.
- Selain itu KBRI London juga menyelenggarakan diskusi panel bertajuk "*Reading the UK Election*" pada hari Pemilu Inggris 4 Juli 2024 yang dihadiri komunitas diplomatik asing.
- Duta Besar RI juga menghadiri *State Opening of the Parliament* (Pelantikan Parlemen Inggris baru) pada 17 Juli 2024 dan *National Day of Commemoration Ceremony* di Dublin Irlandia pada 14 Juli 2024;
- Pertemuan DCM London dengan Deputi Direktur dan *Project Manager for Asia Pacific, British Group Inter Parliamentary Union* (BGIPU) Dominique Rees, pada 15 Agustus 2024, pertemuan dengan *Indonesian Desk* FCDO pada 14 Agustus 2024 dan Duta Besar RI juga bertemu Utusan Khusus Pemerintah Inggris untuk isu Afghanistan;
- Pada bulan September, KBRI London berpartisipasi pada sejumlah pertemuan bilateral politik antara lain Duta Besar RI menghadiri resepsi yang diselenggarakan Menlu Inggris David Lammy, 10 September 2024. Duta Besar RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Indo Pasifik FCDO Joelle Jenny pada 20 September 2024;
- Duta Besar RI juga menghadiri Konferensi Partai Buruh di Liverpool pada 23-25 September 2024 dan bertemu dengan sejumlah anggota parlemen kunci dari Partai Buruh antara lain Catherine West MP;
- Dengan Irlandia telah dicapai 1 (satu) kesepakatan yaitu MoU Konsultasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani saat pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Irlandia Micheál Martin di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, 23 September 2024;
- Kehadiran Wakeppri pada Konferensi Partai Konservatif, 30 September - 2 Oktober 2024 di Birmingham dan bertemu dengan anggota senior Partai Konservatif, Mr Richard Graham (mantan *UK Trade Envoy* untuk Indonesia);
- KBRI London juga menyelenggarakan kegiatan Resepsi Diplomati di Dublin, Irlandia pada 21 Oktober 2024 sebagai bagian dari rangkaian Peringatan 40 Tahun Hubungan Diplomati Indonesia - Irlandia, yang dihadiri Charles Flanagan TD (anggota parlemen Irlandia/Mantan Menlu Irlandia) sebagai *Guest of Honour*;
- Selain itu diselenggarakan juga *Indonesia - Ireland Financial Services and Investment Partnership Roundtable* di Hotel Conrad Dublin pada 21 Oktober dan *Ambassador's Lecture di Royal College of Surgeon Ireland* (RCSI) Dublin pada 22 Oktober 2024;
- KBRI London juga melakukan pertemuan dengan DFA Irlandia pada 23 Oktober 2024;
- Di tingkat *senior official*, dilakukan pertemuan antara Dirjen Amerika dan Eropa Umar Hadi dengan Dirjen Indo-Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara FCDO Owen Jenkins pada 21 November 2024 dan antara Dirjen Amerika dan Eropa dengan Direktur FCDO Bridget Brind pada 22 November 2024;
- Pada bulan November, KBRI London menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain diskusi bertema *Indonesia-UK Partnership for People, Planet, Prosperity and Peace* yang dihadiri sejumlah anggota parlemen Inggris (MPs) pada 27 November

2024 menghadirkan sejumlah pembicara dari Universitas Indonesia, Lemhanas, University of Leeds dan University of York.

- Duta Besar RI berkesempatan diterima oleh *the Duke of Edinburgh* Pangeran Edward di St. James' Palace pada 9 Desember 2024.

Kunjungan Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds ke Indonesia

Minister of State for Development Inggris, The Rt Hon Anneliese Dodds, MP telah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri pada 17 September 2024. Kedua pihak membicarakan kerja sama kemitraan strategis Indonesia-Inggris untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedua negara. Kedua negara juga pandang perlunya mengoptimalkan *partnership roadmap* dan mekanisme yang telah ada (termasuk JETCO/*Joint Economic and Trade Committee* RI-Inggris) untuk eksplorasi penyusunan *Free Trade Area* Inggris-Indonesia. Minister Dodds juga bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan tanda tangani MoU Kerja Sama Pembangunan.



Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI, 17 September 2024 di Jakarta.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy ke Indonesia

Menlu Inggris (*Foreign Secretary*) David Lammy berkunjung ke Indonesia pada 20 Oktober 2024 untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI sekaligus melakukan *courtesy call* dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Menlu Lammy berkesempatan diterima Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan. Dalam pertemuan tersebut sejumlah hal yang diangkat adalah sebagai berikut: penguatan kemitraan strategis kedua negara; kerja sama di bidang *green innovation* dan *sustainable energy transition*; memperkuat kerja sama keamanan di kawasan.

Selain itu Menlu Lammy berkesempatan melakukan sejumlah kegiatan lainnya antara lain: melakukan pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub sekaligus meninjau stasiun LRT. Menlu Lammy tegaskan komitmen kerja sama UK-Indonesia di bidang transportasi berkelanjutan, termasuk melalui rencana *feasibility studies*/investasi. Menlu Lammy juga menghadiri jamuan kenegaraan serta *private event* dengan Kedubes Inggris di Jakarta.



Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menlu Inggris David Lammy di Jakarta, Oktober 2024

Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Inggris

Rangkaian perayaan 75 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia dan Inggris ditandai dengan peluncuran logo perayaan oleh Dubes Desra dan Dubes Inggris untuk Indonesia Bapak Dominic Jermey pada awal 2024. Tema yang diangkat pada perayaan kali ini adalah: “*People. Planet. Prosperity. Peace.*” yang dituangkan melalui simbol batik, padi, ikon Inggris Tower Bridge dan ikon Indonesia Candi Borobudur.

Resepsi Diplomatik London

Pada 29 Oktober 2024 bertempat di Lancaster House London diselenggarakan Resepsi Diplomatik dalam rangka Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Inggris yang dihadiri *Minister of State for Indo-Pacific*, Catherine West MP sebagai *Guest of Honour*. Menteri West sampaikan apresiasi atas hubungan baik Indonesia dan Inggris serta optimismenya bahwa hubungannya dapat semakin dikembangkan oleh pemerintahan baru masing-masing negara, Disampaikan Menteri West bahwa Indonesia adalah mitra jangka panjang yang dapat diandalkan di Indo-Pasifik yang berakar pada penghormatan terhadap kepemimpinan dan sentralitas ASEAN.

Resepsi Diplomatik London dihadiri 150 tamu undangan dari kalangan pemerintahan dan anggota parlemen, korps diplomatik, wakil organisasi internasional dan tokoh diaspora Indonesia di Inggris, Dubes RI menggarisbawahi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Dubes sampaikan bahwa investasi sebagai kunci untuk menciptakan SDM berkualitas, talenta-talenta baru, untuk membentuk pemimpin serta duta persahabatan masa depan. Resepsi diplomatik dimeriahkan penampilan eksklusif pianis George Harliono, tampilan tari Pendet serta promosi kuliner khas Indonesia dari restoran Indonesia di London, serta produk kopi Indonesia.



Duta Besar RI dan Menteri Indo Pasifik Inggris Catherine West menghadiri Resepsi Diplomatik Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Inggris, 29 Oktober 2024 di Lancaster House.



Duta Besar RI sampaikan sambutan pada Resepsi Diplomatik di Lancaster House, 29 Oktober 2024

Penganugerahan *Ambassador's Awards*

Masih dalam rangkaian Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Inggris, KBRI London bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menganugerahkan *Ambassador's Award* kepada 75 tokoh yang dinilai berperan penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia - Inggris. Penerima penghargaan dibagi untuk empat kategori yaitu *Peace, Prosperity, Planet and People* dengan mempertimbangkan juga keterwakilan gender dan wilayah. Adapun acara penganugerahan bagi para tokoh penerima penghargaan yang berdomisili di Indonesia telah dilaksanakan pada bulan Desember 2024 oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta sementara

penganugerahan award bagi para tokoh yang berdomisili di Inggris dilaksanakan pada 5 Februari 2025 di London.

Penyelenggaraan Diskusi Panel

Pada bulan November 2024, KBRI London menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain diskusi bertema *Indonesia-UK Partnership for People, Planet, Prosperity and Peace* yang dihadiri sejumlah anggota parlemen Inggris (MPs) pada 27 November 2024 menghadirkan sejumlah pembicara dari Universitas Indonesia, Lemhanas, University of Leeds dan University of York. Selain itu juga dilaksanakan diskusi serupa di University of Leeds pada 29 November 2024. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Oxford pada 11 November dan London pada 12 November bertema "*Oxford-Indonesia Development Roundtable: Progress and Opportunities in Eastern Indonesia*", menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan dan Pemrov Papua, bertema kedaulatan.

Peringatan 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Irlandia

Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Irlandia sepanjang 2024 yang terdiri dari: Peluncuran Logo dengan tema "*Our Peoples, Our Connection, Our Future*" dalam format *IG Live* Dubes RI - Dubes Irlandia Pdraig Francis di Jakarta, Mei 2024; Penampilan bersama Dubes RI - *National Concert Hall Gamelan Orchestra* di Dublin, Mei 2024; Penyelenggaraan *Indonesia - Ireland Financial Services and Investment Partnership Roundtable* (21 Oktober 2024); Resepsi Diplomatik pada 21 Oktober 2024 bertempat di *National Concert Hall* Dublin; dan diskusi panel di *Royal College of Surgeons in Ireland* Dublin (22 Oktober 2024).



Penyelenggaraan Diskusi Panel di Royal College of Surgeon, Dublin, 22 November 2024

Resepsi Diplomatik di Dublin, 21 Oktober 2024

Pada Resepsi Diplomatik yang dihadiri oleh *Guest of Honour (GoH)* Mr. Charles Flanagan TD (*Chair of the Committee on Foreign Affairs and Defence, House of the Oireachtas* dan mantan Menlu Irlandia 2014-2017, saat Irlandia membuka Kedubesnya di Indonesia) menampilkan berbagai aspek budaya Indonesia, antara lain penampilan *NCH Gamelan Orchestra* di bawah pimpinan Peter Moran berkolaborasi dengan 2 (dua) orang Abdi Dalem Keraton Yogyakarta memanfaatkan kunjungan kerja mereka ke Dublin dalam rangka peringatan 10 tahun penyerahan gamelan sumbangan Sri Sultan Hamengkubowono X kepada NCH, menandai

upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama di antara kedua negara, membuka jalan bagi lebih banyak kolaborasi di masa depan.

GoH Irlandia sampaikan antara lain: mengakui saling pemahaman dan kerja sama kedua negara jauh meningkat dibandingkan tahun 1984 saat pembukaan hubungan diplomatik, kedua negara dan bangsa lebih terkoneksi meski secara geografis terpisah jauh, kerja sama pendidikan, budaya dan pariwisata perlu semakin ditingkatkan untuk terus hasilkan agen persahabatan, kesamaan nilai menggerakkan upaya bersama kedua negara di berbagai forum multilateral khususnya pada bidang perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan dan pendidikan, serta MoU Konsultasi Bilateral kiranya jadi momentum penguatan hubungan bilateral ke depan.



Duta Besar RI bersama *Guest of Honour* Mr. Charles Flanagan TD melakukan pemotongan tumpeng pada Resepsi Diplomatik di Dublin, 21 Oktober 2024



Duta Besar RI sampaikan sambutan pada Resepsi Diplomatik di Dublin, 21 Oktober 2024

Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris pada 20 - 22 November 2024

Atas undangan Pemerintah Inggris, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Inggris pada 20 - 22 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Subianto diagendakan untuk melakukan sejumlah pertemuan, diantaranya adalah audiensi dengan Raja Charles III, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, hingga Wakil PM Inggris Angela Rayner. Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan untuk menghadiri acara *CEO Roundtable Forum*.

Pada audiensi dengan Raja Charles III, 21 November 2024, Presiden RI menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi Raja Charles III terhadap lingkungan hidup termasuk upaya preservasi dan restorasi kawasan hutan dalam rangka pencapaian target *net-zero emission*. Presiden RI juga mendiskusikan peluang dukungan Inggris terhadap pengembangan SDM di Indonesia melalui program makan bergizi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keahlian generasi muda.

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Keir Starmer, 21 November 2024 Presiden RI telah mendiskusikan beberapa hal [REDACTED]

Pada sesi jamuan makan siang dengan Wakil Perdana Menteri Angela Rayner, Presiden RI menyampaikan:

- a. Perkembangan demokrasi di Indonesia dan pengalaman pemilu Februari lalu; b. Program prioritas Presiden RI dalam rangka kemandirian pangan dan makanan bergizi [REDACTED]
- c. Rencana pembangunan rumah tinggal yang terjangkau dan ramah lingkungan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah; d. Keharmonisan umat beragama di Indonesia dan bahwasanya masyarakat Indonesia terbuka untuk lakukan dialog lintas agama dengan masyarakat Inggris.

Kunjungan resmi Presiden telah menghasilkan dokumen utama berupa *Joint Statement*, yang memuat:

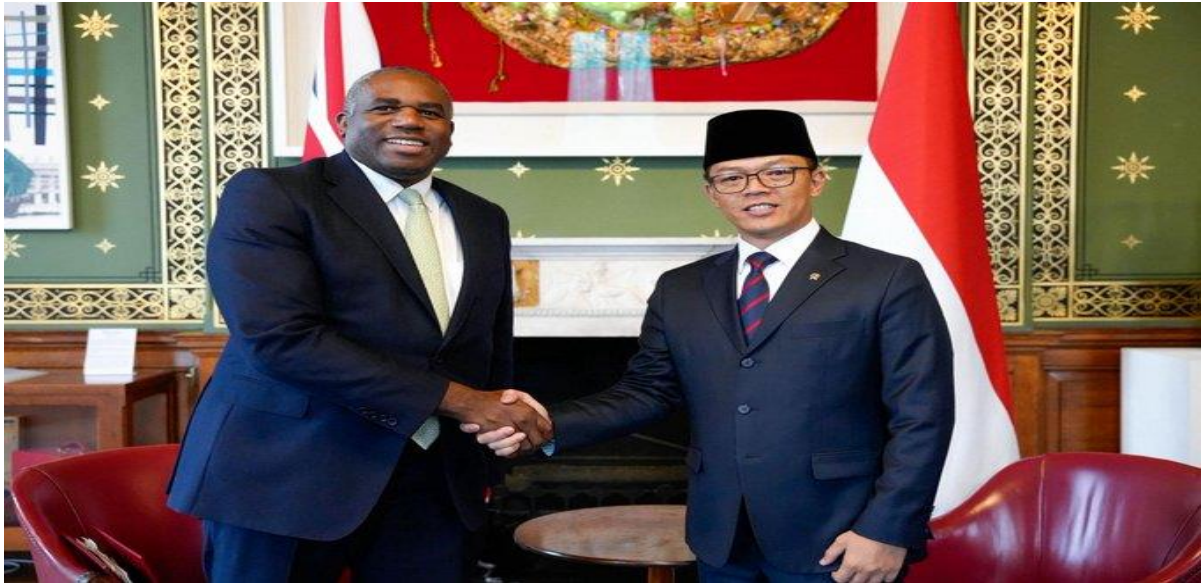
- a. Penegasan kembali Kemitraan Strategis kedua negara, khususnya untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan SDM, pertahanan dan kebijakan luar negeri, perubahan iklim, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan; b. Dukungan Inggris atas aplikasi Indonesia untuk bergabung dalam OECD dan CPTPP; c. Kesepakatan untuk menyelenggarakan Dialog 2+2 antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara; d. Komitmen kolaborasi untuk transisi energi, infrastruktur berkelanjutan, *carbon market*, serta pencapaian *NDCs* dan *SDGs*; e. Dukungan bagi program prioritas Presiden RI.

Selain itu, juga telah diumumkan 2 (dua) *deliverables* di bidang kesehatan, yaitu:

- a. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Kesehatan; b. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan dengan *Cancer Research UK*.

Selain agenda Presiden RI, pada 21 November 2024 telah pula dilakukan pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Inggris, The Rt. Hon. David Lammy. Pada pertemuan dimaksud, telah dibahas Kemitraan Strategis yang baru, program prioritas nasional dan ajakan kerja sama terkait ketahanan pangan, energi terbarukan, serta mekanisme *2+2 Dialogue* untuk memperkuat kemitraan di bidang politik dan

pertahanan. Kedua Menlu juga membahas situasi global terkait konflik di Ukraina, Palestina, Laut China Selatan dan Timur Tengah.



Pertemuan Menlu RI Sugiono dengan Menlu Inggris David Lammy, di FCDO, 21 November 2024

Kegiatan Dalam Kerangka *ASEAN London Committee (ALC)*

Dalam kerangka ALC, Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN aktif menghadiri pertemuan-pertemuan ALC yang diketuai Thailand (Semester I 2024) dan Singapura (Semester II 2024). Adapun sejumlah pertemuan dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- *ASEAN London Committee Breakfast Meeting* dengan *Shadow Foreign Secretary*, David Lammy dan *Shadow Asia Pacific Minister* Catherine West pada bulan Juni 2024;
- Pertemuan *ASEAN London Committee* diikuti Dubes RI dengan *Parliamentary Under Secretary of State for Indo Pacific*, Catherine West MP bersama dengan *ASEAN Head of Mission* pada 1 Agustus 2024;
- Pertemuan KBRI London dengan perwakilan *ASEAN London Committee* pada 6 Agustus 2024;
- Partisipasi Dubes RI dalam *ASEAN London Committee Meeting* pada 8 Oktober 2024;
- Pada 26 - 28 November 2024, Dubes RI berpartisipasi dalam *ASEAN London Committee (ALC) Head of Missions Visit* ke Skotlandia dan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak antara lain pemerintah Skotlandia (*First Minister John Swinney*), kalangan bisnis dan akademisi;
- Pada 11 Desember 2024 bersama *ASEAN London Committee*, dilakukan pertemuan dengan Dirjen Indo Pasifik FCDO UK Owen Jenkins;
- Kehadiran Dubes RI, Wakeppri dan staf KBRI London pada Resepsi Diplomatik yang diselenggarakan oleh Kedubes Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Rencananya pada Semester I 2025, Indonesia akan menerima keketuaan *ASEAN London Committee* dari Singapura hingga Juli 2025.



Pertemuan ASEAN London Committee Head of Missions dengan First Minister Skotlandia John Swinney, di Edinburgh, November 2024

Selain program-program pendukung di atas, KBRI London juga secara rutin mengirimkan berita terkait analisis perkembangan situasi dan kebijakan politik di Inggris dan Irlandia sebagai bahan pertimbangan pusat dalam menegosiasikan kesepakatan bidang politik, keamanan, dan maritim dengan Inggris maupun dengan Irlandia.

Proyeksi Ke Depan

Pasca perayaan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Inggris serta perayaan 40 tahun hubungan diplomatik dengan Irlandia pada tahun 2024, merupakan momentum bagi Indonesia, Inggris, dan Irlandia agar semakin gencar mengadakan kegiatan yang dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London.

Meskipun begitu, di tahun 2025 baik Inggris maupun Irlandia masih akan mengalami banyak dinamika baik di bidang politik maupun ekonomi di mana situasi politik dalam negeri dapat mempengaruhi dan menciptakan ketidakpastian dan perubahan dalam prioritas diplomasi. Di Inggris, kebijakan pasca-pemilu dan tahun pertama pemerintahan PM Keir Starmer yang dianggap kurang memuaskan dapat menunda proses kesepakatan. Selain itu dinamika geopolitik global juga akan berpengaruh seperti kelanjutan konflik di Timur Tengah, perang Ukraina-Rusia dan implikasi terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS.

Untuk Irlandia, akan terjadi pergantian Perdana Menteri dan kabinet sebagai hasil Pemilu bulan November 2024, walau komposisi pemerintahan tetap akan dipegang dua partai Irlandia terbesar saat ini. Isu Palestina juga akan berpengaruh pada polugri Irlandia, dan mengingat Indonesia dan Irlandia memiliki kesamaan posisi di forum internasional khususnya terkait dukungan terhadap Palestina, kiranya hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara di forum internasional.

Hasil positif dari Kunjungan Presiden RI November 2024, khususnya terkait rencana pembentukan Kemitraan Strategis Baru RI - Inggris pada 2025 menjadi momentum penguatan kerja sama dan identifikasi bidang-bidang prioritas kedua negara. Penguatan kerja sama parlemen Indonesia - Inggris juga tampak dari rencana kunjungan delegasi BGIPU ke Indonesia di awal tahun 2025. Terkait Irlandia, penandatanganan Memorandum Mekanisme Konsultasi Bilateral Indonesia - Irlandia pada 2024 dapat menjadi sarana untuk menjajaki peningkatan interaksi antar pejabat tinggi kedua negara di tahun 2025 (diupayakan di tingkat Menteri Luar Negeri). Terdapat peluang yang timbul dari terbentuknya pemerintahan baru baik di Inggris maupun Irlandia untuk mendukung kerjasama bilateral, membuka jalan untuk inisiatif bersama dalam keamanan regional atau kerjasama maritim. Selain itu, momentum politik baru dapat diambil sebagai kesempatan untuk meningkatkan dialog dan memperkuat hubungan bilateral.

Dalam hal keamanan, upaya bersama dalam menanggulangi isu terorisme atau keamanan maritim dapat menjadi peluang besar. Kendala mungkin timbul dari perbedaan dalam pendekatan atau prioritas keamanan nasional masing-masing negara.

Penting untuk mengidentifikasi potensi kendala dan peluang ini agar strategi diplomasi dapat disesuaikan secara efektif untuk mencapai tujuan kesepakatan yang diinginkan.

Dokumentasi



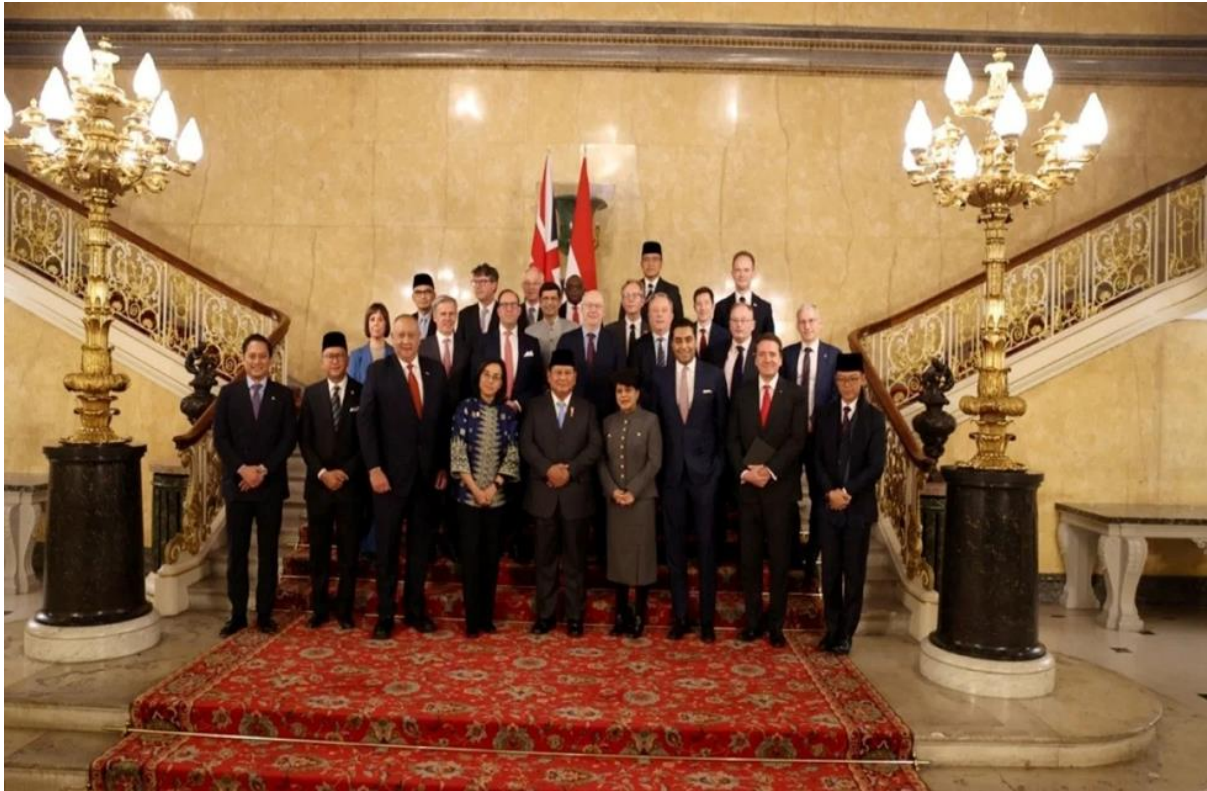
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Charles III di Istana Buckingham, 21 November 2024



Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Inggris Sir Keir Starmer di Downing Street pada 21 November 2024.



Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Deputy Perdana Menteri Angela Rayner pada 21 Oktober 2024 di Lancaster House.



Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di *CEO Roundtable*, Lancaster House, 21 November 2024

Analisis IK B1.7 – Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI London

Deskripsi IK

Intensitas saling kunjung adalah tingkat kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja pejabat pemerintah Indonesia ke negara akreditasi atau sebaliknya. Pejabat pemerintah Indonesia adalah pejabat setingkat Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya.

Pejabat pemerintah di negara akreditasi adalah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya.

Kegiatan saling kunjung diharapkan menjadi salah satu sarana dalam mengukuhkan hubungan baik dan kerja sama saling menghargai dan menguntungkan dengan negara mitra. Kegiatan saling kunjung juga dapat merefleksikan tingkat layanan keprotokolan yang diberikan oleh Perwakilan RI. Jumlah kunjungan meliputi kunjungan pejabat pemerintah Indonesia ke negara akreditasi, dan kunjungan pejabat pemerintah negara akreditasi ke Indonesia.

Informasi Kinerja

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi	Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi	10	42,86%
Realisasi		10	
Target		5	
Capaian		120%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Pada periode Januari-Desember 2024, KBRI London mencatat telah terdapat 10 kunjungan pejabat tinggi dari Indonesia dan negara akreditasi.

IK B1.7 merupakan indikator baru yang diadopsi KBRI London di tahun 2024. Untuk itu, IK B1.7 belum memiliki pembandingan yang setara dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
B1.7					
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	5
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	10
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	120%

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Berdasarkan penelaahan mandiri KBRI London, faktor yang mendukung keberhasilan pemenuhan target IK Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi, yaitu:

1. Keinginan kuat dari pemangku kepentingan di dalam negeri dan negara akreditasi dalam mendukung peningkatan hubungan luar negeri cukup tinggi.
2. Peringatan hubungan diplomatik Indonesia dengan Inggris ke-70 dan dengan Irlandia ke-40 mendorong pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti berbagai kegiatan prioritas.
3. Peran strategis Indonesia dan Inggris dalam berbagai isu global menjadikan kegiatan saling kunjung sebagai prioritas bagi pejabat tinggi di kedua negara.

Kendala dan Tantangan

Tantangan yang dihadapi KBRI London dalam memenuhi target IK B1.7, antara lain:

1. Dinamika perkembangan politik di dalam negeri yang mempengaruhi perubahan jadwal rencana kunjungan dari pejabat tinggi tertentu di negara akreditasi.
2. Masih belum adanya mekanisme pertukaran informasi terkait rencana kunjungan antara KBRI London dengan Perwakilan Inggris dan Irlandia di Jakarta untuk memastikan kegiatan kunjungan dapat terencana dengan baik.
3. Keterbatasan KBRI London untuk dapat memfasilitasi delegasi untuk hal-hal terkait transportasi akibat anggaran dan jumlah juru mudi yang terbatas.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan pada periode 2025-2026, yaitu:

1. Menyesuaikan target jumlah saling kunjung pejabat tinggi dari Indonesia dan negara akreditasi. Hal ini dilakukan dengan melihat intensitas selama 3 tahun terakhir serta perkembangan kebijakan nasional.
2. Mempererat koordinasi KBRI London dengan Perwakilan dari negara akreditasi di Jakarta untuk dapat memperoleh informasi rencana kunjungan pejabat tinggi lebih awal.
3. Meningkatkan layanan pendataan fasilitasi kunjungan dan informasi dasar agar delegasi dapat mengatur pergerakan secara mandiri.
4. Mendorong adanya saling kunjungan antara pejabat tinggi Indonesia dengan Irlandia secara lebih intensif.

Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian IK

Selama tahun 2024, KBRI London telah mencatat sejumlah kunjungan yang dilakukan pejabat Indonesia dan negara akreditasi, utamanya Inggris, antara lain:

1. Menteri negara Asia Pasifik Inggris, Anne-Marie Trevelyan.
2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
3. Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
4. Presiden Prabowo Subianto.
5. Menteri Investasi RI, Rosan Roeslani.
6. Menpan Reformasi dan Birokrasi, Azwar Anas.
7. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.
8. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.
9. Menteri Negara Urusan Pembangunan Inggris, Anneliese Dodds.
10. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lamy.

Di luar kunjungan pejabat tinggi di atas, KBRI London juga telah memfasilitasi pejabat lain dari berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia.

Proyeksi ke Depan

Komitmen Indonesia dengan Inggris dan Irlandia untuk memperkuat hubungan bilateral diperkirakan akan mendorong intensitas saling kunjung pejabat tinggi yang melibatkan ketiga

negara. Dengan adanya MoU Pembentukan Konsultasi Bilateral antara Indonesia dengan Irlandia dan rencana pembahasan *New Strategic Partnership* dengan Inggris akan mendorong peningkatan saling kunjung di tahun 2025.

Dokumentasi



Kunjungan Presiden RI ke Inggris



Kunjungan Menlu & Wamenlu RI ke Inggris

B2 Diplomasi Multilateral di Negara Akreditasi KBRI London yang Kuat

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi multilateral. Relasi multilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Hubungan multilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Kepentingan Indonesia di bidang tersebut dapat diperjuangkan melalui diplomasi multilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui forum kerja sama di tingkat multilateral. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan assurance terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan multilateral.

KBRI London menangani kerja sama multilateral dengan sejumlah organisasi internasional yang berkedudukan di London yaitu *International Maritime Organization (IMO)*, *International Mobile Satellite Organization (IMSO)*, dan *International Coffee Organization (ICO)*. Sebelumnya KBRI London juga menangani kerja sama multilateral dengan *International Sugar Organization (ISO)*, namun pada tahun 2023, Pemerintah RI secara resmi mundur dari keanggotaan ISO.

Penguatan diplomasi multilateral di KBRI London diwujudkan dengan pembentukan Fungsi Multilateral yang mulai efektif bertugas pada bulan Mei 2023, yang sebelumnya kerja sama multilateral ditangani oleh Fungsi Politik dan Fungsi Ekonomi. Saat ini Fungsi Multilateral KBRI London memiliki formasi 2 (dua) orang *Home Staff* dan 1 orang Pegawai Setempat. Fungsi Multilateral KBRI London bersinergi dan berkoordinasi secara erat dengan Atase Perhubungan London (terkait kerja sama dengan IMO dan IMSO) dan Atase Perdagangan London (terkait kerja sama dengan ICO) dalam pelaksanaan tugasnya.

Analisis IK B2.1 – Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Deskripsi IK

Posisi: Penentuan sikap

Prakarsa adalah gagasan atau inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral.

Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu tertentu yang dibahas dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral.

Diterima adalah dicatatnya prakarsa/rekomendasi di dalam dokumen sidang/pertemuan, yang mencerminkan penerimaan dari pihak lain atas prakarsa atau rekomendasi Indonesia yang dinilai bermanfaat dalam sidang/pertemuan forum regional dan multilateral.

Prakarsa/rekomendasi yang dihitung adalah yang diterima dalam tahun berjalan periode Januari-Desember*).

Forum multilateral merupakan pertemuan pada lembaga atau badan untuk membahas kerja sama regional dan multilateral yang diikuti oleh pejabat setingkat Senior Officer.

Lingkup forum regional dan multilateral dapat merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang ekonomi meliputi namun tidak terbatas pada: bidang perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang sosial meliputi namun tidak terbatas pada: kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang budaya meliputi namun tidak terbatas pada: seni dan budaya, pelestarian aset-aset budaya.

Informasi Kinerja

International Coffee Organization (ICO)

Indonesia, sebagai negara penghasil kopi terkemuka di dunia dan anggota aktif *International Coffee Organization (ICO)*, memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan industri kopi global. Keanggotaan di ICO memberikan Indonesia kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan aturan yang mempengaruhi pasar kopi internasional. Dengan memiliki suara dalam perumusan kebijakan, Indonesia dapat memastikan bahwa kepentingan nasional dan keberlanjutan industri kopi domestik diperhatikan, termasuk aspek perdagangan, regulasi, dan standar kualitas.

Selain itu, keanggotaan Indonesia di ICO juga memfasilitasi akses ke pasar baru dan memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara pengimpor kopi utama, khususnya di Eropa dan Amerika. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan ekspor kopi Indonesia, yang terkenal dengan keanekaragaman jenis dan cita rasa uniknya. Indonesia dapat memanfaatkan platform ICO untuk mempromosikan kopi premiumnya, seperti kopi arabika dari Aceh dan kopi robusta dari Sumatera, serta meningkatkan reputasi kopi Indonesia di pasar global.

Di sisi riset dan pengembangan, keanggotaan di ICO memberikan Indonesia akses ke kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan tentang teknik produksi kopi yang berkelanjutan dan inovatif. Melalui kerjasama dengan negara-negara anggota lain, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi kopi. Kerja sama ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkan tapi juga mendukung upaya Indonesia dalam konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan para petani kopi.

Sepanjang 2024, KBRI London menghadiri dan memfasilitasi partisipasi Delegasi RI Pusat untuk pertemuan-pertemuan ICO sebagai berikut:

- a. Pertemuan Dewan ICO (ICC) ke-137 pada 19 Maret 2024);
- b. Pertemuan Dewan ICO (ICC) ke-138 pada 12 September 2024);
- c. *CEO and Global Leaders Forum (CGLF)* ke-6 pada 11 September 2024; dan
- d. *Panel Discussion on Sustainability in Coffee by Switzerland* pada 10 September 2024.

Tabel III.B2.1.a
Capaian IK B2.1 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	2	50%
	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang diajukan	2	
Realisasi		100%	
Target		91%	
Capaian		109,89%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK B2.1 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya adalah sebesar 100% dari target sebesar 91%, sehingga capaian IK sebesar 109,89% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.B2.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK B2.1 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
B2.1 Target	N/A	N/A	90%	90%	91%
Realisasi	N/A	N/A	100%	100%	100%
Capaian	N/A	N/A	111,11%	111,11%	109,89%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK B2.1 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya stabil pada 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Kehadiran Delegasi RI dalam forum ICO telah mencerminkan prioritas kepentingan Pemerintah RI, terutama dalam upaya meningkatkan ekspor serta memperbarui pemahaman tentang regulasi yang berlaku di negara-negara tujuan utama, seperti negara-negara Eropa. Partisipasi ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Pemerintah RI dalam memperjuangkan kepentingan nasional di organisasi internasional.

Kendala dan Tantangan

Pendampingan KBRI London untuk substansi pertemuan forum ICO masih belum optimal dikarenakan kendala koordinasi antara KBRI London dengan instansi penjuror masih mengalami berbagai kendala hasil dari pertemuan-pertemuan ICO yang tidak dilakukan di wilayah akreditasi dan dihadiri oleh Delegasi RI, tidak pernah dilaporkan kepada KBRI London.

Upaya Perbaikan

Untuk memaksimalkan keanggotaan Indonesia di ICO, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian disarankan untuk lebih aktif melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, negara mitra, LSM, dan sektor swasta yang terlibat dalam ICO. Dengan melibatkan delegasi dari instansi terkait secara konsisten, Indonesia diharapkan dapat menyampaikan pandangan dan intervensi yang lebih berbobot terhadap isu-isu teknis yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan lingkungan.

Selain itu, koordinasi antara KBRI London dan instansi penjuror juga masih perlu ditingkatkan misalnya dengan mengadakan pertemuan berkala untuk pembahasan isu yang menjadi kepentingan Indonesia di forum ICO.

Analisis Program Pendukung Capaian

Partisipasi aktif dan kehadiran Delegasi RI pada pertemuan-pertemuan reguler yang diselenggarakan ICO sangat menunjang keberhasilan pemenuhan capaian, terkait diterimanya posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di forum ICO. Di samping itu pendekatan secara langsung dengan mitra dan *stakeholders* terkait juga mendukung keberhasilan pemenuhan capaian.

Proyeksi Ke Depan

Dengan statusnya sebagai anggota ICO, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk memanfaatkan keanggotaan tersebut dalam berbagai cara yang strategis. Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan dan aturan yang mempengaruhi pasar kopi global dan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kepentingan nasional. Sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, keikutsertaan dalam pembahasan kebijakan ini memberi Indonesia kesempatan untuk mengadvokasi kepentingan para petani kopi lokal dan industri kopi nasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akses pasar dan menjamin keberlanjutan harga kopi yang stabil.

Keanggotaan di ICO juga memperkuat kapasitas Indonesia untuk membangun dan memperluas jaringan dengan negara-negara pengimpor utama. Ini termasuk membuka dialog dan kerjasama dengan negara lain untuk mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi industri kopi, seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, dan keberlanjutan. Kolaborasi ini dapat melahirkan inisiatif bersama atau kesepakatan perdagangan yang menguntungkan, memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

Perlunya koordinasi lebih erat antara KBRI London dengan instansi penjurur yang menaungi ICO dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI, sehingga dukungan KBRI London dapat lebih optimal. Selain itu pentingnya KBRI London untuk dapat memperoleh laporan-laporan pertemuan ICO yang dihadiri oleh Delegasi RI Pusat guna pelaksanaan tugasnya memantau perkembangan pembahasan isu-isu terkini di ICO.

KBRI London juga mencatat adanya keperluan bagi Pemerintah RI untuk meratifikasi Konvensi ICO yang baru ditandatangani pada tahun 2021 lalu. Ratifikasi Konvensi ICO 2021 penting apabila Indonesia hendak melanjutkan keanggotaannya di dalam ICO.

Dokumentasi



Pertemuan Dewan ICO ke-138



Delegasi RI menghadiri *Panel Discussion on Sustainability in Coffee* yang diselenggarakan oleh Dubes Swis

Analisis IK B2.2 – Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Deskripsi IK

Posisi adalah penentuan sikap. Prakarsa adalah gagasan atau inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral.

Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu tertentu yang dibahas dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral.

Diterima adalah dicatatnya prakarsa/rekomendasi di dalam dokumen sidang/pertemuan, yang mencerminkan penerimaan dari pihak lain atas prakarsa atau rekomendasi Indonesia yang dinilai bermanfaat dalam sidang/pertemuan forum regional dan multilateral.

Prakarsa/rekomendasi yang dihitung adalah yang diterima dalam tahun berjalan periode Januari - Desember 2024.

Forum multilateral merupakan pertemuan pada lembaga atau badan untuk membahas kerja sama regional, ASEAN dan multilateral yang diikuti oleh pejabat setingkat *Senior Officer*.

Adapun lingkup forum regional dan multilateral dapat dilihat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang politik dan keamanan meliputi, namun tidak terbatas pada isu perdamaian dan keamanan internasional, perlucutan senjata, terorisme, kejahatan lintas negara, keamanan siber, hak asasi manusia, migrasi, dan pengungsi.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang maritim meliputi, namun tidak terbatas pada keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman.

Informasi Kinerja

International Maritime Organization (IMO)

Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan anggota yang senantiasa berkontribusi aktif di IMO, sebagai satu-satunya organisasi internasional yang bertanggung jawab terhadap rezim keselamatan dan keamanan navigasi serta menjadi platform strategis dalam diplomasi maritim Indonesia. Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan IMO Kategori C, dan oleh karenanya memiliki tanggung jawab memainkan peran kepemimpinan serta fungsi strategis di bidang transportasi laut. Indonesia juga dapat memainkan peran menentukan arah kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional. Keanggotaan Indonesia di forum IMO memberikan manfaat konkrit bagi posisi Indonesia sebagai negara maritim, yaitu sebagai wadah bagi kontribusi aktif Indonesia dalam setiap proses penyusunan norma dan standar (*norm and standard setting*) terkait bidang pelayaran komersial internasional.

Keanggotaan Indonesia di IMO memberikan peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara maritim terkemuka dunia. Hal ini meliputi kerjasama teknis, peningkatan kapabilitas, perlindungan hak-hak pelaut, pemberdayaan perempuan dalam industri maritim, transfer teknologi dalam sektor maritim, serta partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perkapalan.

Sepanjang 2024, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan di pertemuan-pertemuan IMO antara lain isu multilingualisme dan reformasi organisasi IMO, penguatan transparansi IMO, dekarbonisasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor perkapalan, isu perlindungan pelaut (seafarer), serta pembentukan *non-mandatory code untuk Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)*. Beberapa prakarsa atau usulan Indonesia yang diterima sepanjang tahun 2024 antara lain yaitu:

- Pada pertemuan *Technical Cooperation Committee ke-74 (TC-74)*. Indonesia bersama dengan Korea Selatan, Fiji, Kenya, Filipina, Tanzania dan Vietnam telah menyampaikan usulan terkait *Global On-Board Training Programme for Fostering Competent Young Seafarers*. Proposal Indonesia tersebut telah diterima menjadi bagian dari agenda pembahasan TC-74 dan mendapatkan apresiasi dari Negara Anggota IMO lainnya.
- Pada pertemuan Dewan IMO ke-132, Indonesia bersama dengan Singapura dan Malaysia juga menyampaikan proposal terkait perlindungan jalur pelayaran vital khususnya terkait kerja sama keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura yang mendapatkan apresiasi dari Dewan IMO.
- Pada pertemuan *1st International Forum on Education and Training for Advanced Seafarers on High-Tech Maritime Mobility* telah disepakati *Letter of Intent* terkait kerja sama untuk mendukung *Global Maritime Mobility Industry* melalui program pendidikan dan pelatihan dengan Filipina dan Republik Korea.
- Pada Pertemuan *Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-82*, telah disepakati penetapan Nusa penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai salah satu *Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)*.
- Pada pertemuan MSC ke-109, Indonesia menjadi penggagas dua dokumen yang dibahas pada pertemuan yaitu terkait distribusi data untuk realisasi *S-100 capable Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)* dan terkait peninjauan kembali *Casualty Investigation Code*. Kedua dokumen tersebut mendapatkan respon positif dan disetujui untuk dijadikan salah satu output pembahasan sesi MSC selanjutnya.

International Mobile Satellite Organization (IMSO)

International Mobile Satellite Organization (IMSO) merupakan organisasi turunan IMO yang memiliki peran untuk memastikan operasionalisasi sistem *Long Range Identification and Tracking (LRIT)* dan *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* berjalan dengan baik dan biaya layanannya tetap terjangkau oleh semua pihak pengguna laut. Partisipasi Delegasi Indonesia di dalam IMSO selama ini dipandang sudah tepat sasaran dan proporsional

Sepanjang 2024, KBRI London menghadiri dan memfasilitasi partisipasi Delegasi RI Pusat untuk pertemuan-pertemuan sebagai berikut:

- a. Pertemuan ke-50 *Advisory Committee (AC) IMSO*, 15 – 18 Juli 2024
- b. Pertemuan ke-29 Majelis IMSO, 9 - 13 Desember 2024

Indonesia sebagai anggota *IMSO Advisory Committee* terus mengikuti pembahasan isu-isu yang terkait dengan GMDSS Satelit dan LRIT serta menyikapi penambahan satelit baru sebagai penyedia layanan GMDSS dan LRIT yaitu *BeiDou Message Service System*

(BDMSS). Hal tersebut untuk memastikan agar diskusi mengenai perkembangan regulasi terkait dengan GMDSS Satelit dan LRIT dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Indonesia terus mengikuti pelaksanaan pembahasan regulasi terkait lainnya di IMSO, mencermati pengaruh akuisisi Inmarsat oleh Viasat terhadap layanan GMDSS satelit saat ini dan pelaksanaan *SES Conference*.

Indonesia kembali terpilih menjadi anggota *Advisory Committee* IMSO pada Pertemuan ke-29 Majelis IMSO untuk periode hingga pertemuan Majelis IMSO berikutnya di tahun 2026.

Tabel III.B2.2.a
Capaian IK B2.2 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang politik, keamanan, dan maritim	7	50%
	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang politik, keamanan, dan maritim yang diajukan	7	
Realisasi		100%	
Target		95%	
Capaian		105,26%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK B2.2 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim adalah sebesar 7 diterima dari 7 yang direncanakan dari target sebesar 95%, sehingga capaian IK sebesar 105,26% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.B2.2.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK B2.2 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
B2.2 Target	N/A	N/A	94%	94%	95%

Realisasi	N/A	N/A	100%	137,50%	100%
Capaian	N/A	N/A	106,38%	120%	105,26%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK B2.2 Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim mengalami penurunan realisasi dan capaian namun masih di atas target yang ditentukan.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Sebagai anggota Dewan IMO Kategori C, Indonesia terus menunjukkan peran aktif dalam berbagai pertemuan di forum IMO khususnya yang terkait isu-isu keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, kerja sama teknis, dan kesejahteraan pelaut. Delegasi RI aktif terlibat dalam berbagai pembahasan penting, baik dalam bentuk penyampaian posisi Indonesia melalui *statement* dan intervensi, maupun diskusi informal dengan Negara Anggota IMO lainnya.

Delegasi Indonesia juga aktif dalam melakukan berbagai langkah diplomasi dan pendekatan informal dengan Negara Anggota IMO sehingga kesepakatan dapat lebih mudah tercapai. Partisipasi aktif Indonesia pada forum IMO juga didukung oleh kolaborasi erat antara KBRI London dan delegasi Pusat yang hadir pada setiap pertemuan IMO, baik secara fisik maupun secara virtual.

Keberhasilan pencapaian IK juga tidak lepas dari hubungan baik yang dibina antara Delegasi RI dengan Perwakilan Delegasi lainnya sehingga Indonesia terus dilibatkan dan menjadi salah satu negara penting dalam pembahasan berbagai isu di forum IMO.

Selain di bidang kemaritiman, Indonesia juga mendukung penyelenggaraan organisasi IMO yang transparan dan akuntabel di mana BPK RI terpilih menjadi Auditor Eksternal IMO periode 2021- 2024 dan kemudian terpilih kembali untuk periode 2024 - 2027.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang seringkali dialami dalam diterimanya prakarsa Indonesia pada pertemuan IMO sering kali berkaitan dengan persiapan yang kurang memadai dan koordinasi yang tidak optimal antar instansi terkait. Inisiatif yang diajukan oleh Indonesia kadang kala tidak sepenuhnya mendapat dukungan karena kurangnya substansi yang mendalam dan analisis yang tajam sebelum diajukan.

Sering kali, dokumen-dokumen penting disiapkan terlalu mendekati batas waktu pengajuan, mengurangi kesempatan untuk melakukan konsultasi yang memadai atau untuk membangun dukungan dari delegasi lain. Hal ini juga menghambat kemampuan Indonesia untuk merumuskan argumentasi yang persuasif dan menggali dukungan internasional.

Upaya Perbaikan

Dalam konteks keanggotaan Indonesia di IMO, sangat penting bagi Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi keanggotaan di IMO dengan cara memperkuat hubungan dengan berbagai pihak terkait, termasuk negara mitra, organisasi internasional, organisasi non-

pemerintah, dan industri melalui partisipasi aktif dalam pertemuan IMO dan dalam penyusunan dokumen seperti proposal, tanggapan, dan *info paper* untuk Sekretariat IMO.

Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat perannya di IMO dengan mendukung dan menyelenggarakan kegiatan kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas di sektor kemaritiman, yang secara berkala melibatkan partisipasi dari berbagai negara, khususnya negara-negara SIDS dan LDCs.

Partisipasi Delegasi RI di pertemuan IMO juga perlu dipersiapkan secara matang, baik dari persiapan administrasi seperti penyusunan *Letter of Credentials* dan persiapan substansi seperti penyusunan posisi Delegasi RI dan butir wicara.

Analisis Program Pendukung Capaian

Partisipasi aktif Delegasi RI pada hampir seluruh pertemuan reguler IMO baik di tingkat Majelis IMO, Dewan IMO, Komite, Sub Komite dan Kelompok Kerja sangat mendukung penerimaan terhadap inisiatif, prakarsa atau rekomendasi yang disampaikan Indonesia dalam proses pembentukan norma dan standar pelayaran internasional.

KBRI London juga telah menyelenggarakan pelatihan negosiasi pada forum IMO untuk meningkatkan kapasitas dan penyiapan sumber daya manusia di level teknis yang memiliki keahlian untuk berperan aktif dalam proses diskusi dan negosiasi di forum-forum IMO.

Selain itu, berbagai program kerja sama teknis untuk peningkatan kapasitas di sektor perkapalan yang telah diinisiasi oleh Indonesia juga memperkuat kontribusi negara ini dalam bidang kemaritiman. Penting untuk terus memperluas cakupan penerima manfaat dari program-program ini untuk memaksimalkan dampak positifnya dalam skala yang lebih luas.

Proyeksi Ke Depan

Indonesia kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2026-2027 yang pemilihannya akan dilakukan pada pertemuan Majelis IMO di bulan Desember 2025. Oleh karena itu, di tahun 2025 Indonesia akan mulai kampanye agar dapat terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO. Indonesia akan terus memenuhi komitmen untuk kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas bagi *Small Island Developing States* (SIDS) dan *Least Developed Countries* (LDCs) terutama dalam upaya mendukung kepatuhan negara-negara tersebut dalam implementasi aturan-aturan yang ditetapkan oleh IMO.

Dari segi substansi, tahun 2025 akan diadakan serangkaian pertemuan untuk membahas *mid-term measures* upaya pengurangan Emisi GRK dari sektor perkapalan. Indonesia akan terus terlibat aktif dalam pembahasan tersebut untuk memastikan upaya yang dipilih adil dan tidak terlalu memberatkan negara-negara berkembang.

Sejumlah kegiatan di luar pertemuan-pertemuan rutin IMO direncanakan akan diselenggarakan dalam mendukung kontribusi Indonesia di forum IMO, antara lain:

1. Partisipasi pada Pertemuan *Joint Working Group ILO/IMO* di : pembahasan isu human element penting untuk terus diikuti perkembangannya sehingga dipandang perlu kehadiran Delegasi RI pada pertemuan terkait yang diselenggarakan di IMO.
2. Partisipasi pada *World Maritime Day Parallel Event* di Uni Emirat Arab: merupakan event tahunan perayaan Hari Maritim Sedunia yang diselenggarakan secara paralel, dapat menjadi sarana mempromosikan peran Indonesia di sektor maritim.

Dokumentasi



Delegasi RI menyampaikan apresiasi kepada Negara Anggota IMO atas dukungan terhadap penetapan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)



Deputy Chief of Mission Indonesia menyampaikan intervensi pada Pertemuan Maritime Safety Committee ke

B3 Basis Data KBRI London yang Akurat

Analisis IK B3.1 – Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI

Deskripsi IK

Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan dan perlindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri (SIAK); Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemenkumham (SIMKIM); Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN) serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya.

Selain mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", jumlah WNI yang terdaftar pada Portal Peduli WNI dapat mempermudah proses pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri secara lebih baik dan akurat.

Status "Terverifikasi" menggambarkan data WNI yang sudah terdaftar pada Portal Peduli WNI disertai dengan dokumen WNI yang diunggah oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang telah mencukupi dan lolos verifikasi sesuai aturan berlaku.

Database WNI di Luar Negeri pada portal peduli WNI dilakukan berdasarkan penginputan data WNI secara online yang dilakukan oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang. Portal peduli WNI secara berkala dilakukan *update* dan *back-up* data WNI atau master data oleh staf Perwakilan RI dan update portal peduli WNI.

Informasi Kinerja

Sebagaimana tahun sebelumnya, KBRI London terus melakukan pendataan dan verifikasi data WNI di Inggris dan Irlandia pada 2024. Sebagaimana arahan Pusat yang dimandatkan dalam Sasaran Strategis basis data WNI KBRI London yang akurat, maka telah ditetapkan target sebesar 100 % persentase WNI di Negara akreditasi KBRI London yang terverifikasi di Portal Peduli WNI untuk tahun 2024, yaitu sejumlah 3.084 orang.

Tabel III.B3.1.a
Capaian IK B3.1 – Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI	Jumlah WNI Pendaftar	3,084	65,63%
	Jumlah WNI Terverifikasi	3,084	
Realisasi		100%	
Target		100%	
Capaian		100%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK B3.1 – Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI adalah sebesar 3.084 dari 3.084 data WNI yang masuk pada tahun 2024, atau 100% dari target 100%, sehingga capaian IK sebesar 100% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.B2.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK B3.1 – Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
B3.1 Target	20%	50%	80%	90%	100%
Realisasi	44%	75,15%	97,62%	89,10%	100%
Capaian	120%	120%	120%	99,00%	100%

Dalam periode 2023-2024 realisasi IK B3.1 – Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI London yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI mengalami kenaikan dari 89,10% menjadi 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Proses verifikasi melalui fitur “Verifikasi tanpa NIK” memudahkan administrator untuk melakukan verifikasi data WNI yang telah menetap lama di Inggris dan tidak pernah memiliki KTP sebelumnya. Hal ini membantu percepatan proses verifikasi. Di sisi lain, petugas konsuler KBRI London juga terus melaksanakan verifikasi secara cepat dan melakukan tinjauan berkala untuk memastikan tidak ada input data baru yang belum terverifikasi.

Verifikasi data juga secara rutin dilaksanakan melalui program Warung Konsuler sepanjang tahun 2024. Pada tahun ini, telah dilaksanakan 6 (enam) Warung Konsuler di beberapa kota dengan jumlah WNI yang signifikan yaitu Bristol (Maret), Dublin (Mei), Manchester (Mei), Edinburgh (Juni), Belfast (Oktober) dan York (Desember).

Kendala dan Tantangan

Kendala utama upaya pengelolaan data untuk dapat memiliki basis data WNI yang akurat adalah tidak tersedianya sumber data WNI yang tidak lagi berdomisili di Inggris dan Irlandia. Seiring berjalannya waktu, data jumlah WNI tidak akan lagi mencerminkan jumlah nyata di lapangan.. Data yang terus menerus terakumulasi seiring masuknya input data baru,

sementara tidak tercatatnya WNI yang meninggalkan Inggris akan menyebabkan diskrepansi data yang semakin membesar.

Di sisi lain, pelaksanaan verifikasi oleh petugas administrator Portal Peduli WNI sejauh ini dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Beberapa WNI dengan pemahaman teknologi informasi terbatas mengalami kesulitan untuk melakukan lapor diri;
- Terdapat kebingungan yang disampaikan beberapa WNI terkait proses lapor diri di Portal Peduli WNI dengan pendaftaran layanan konsuler KBRI London melalui platform e-Konsuler.

Upaya Perbaikan

Ke depannya, diusulkan perbaikan antara lain:

- Mengimbuu masyarakat untuk Lapor Diri pada Portal Peduli WNI serta *follow up* data *pending* pada Portal;
- Terus melakukan kegiatan pendataan dan/atau verifikasi data WNI *back-to-back* dengan layanan konsuler lainnya pada kegiatan Warung Konsuler;
- Melakukan koordinasi erat dengan Pusat terkait sinkronisasi Portal Peduli WNI dan platform E-Konsuler KBRI London.

Analisis Program Pendukung Capaian

KBRI London melakukan kegiatan pendataan dan/atau verifikasi data WNI *back-to-back* dengan layanan konsuler lainnya pada saat layanan Warung Konsuler kekonsuleran ke beberapa kota di negara akreditasi, serta dengan terus menyampaikan imbuuan kepada masyarakat untuk melakukan Lapor Diri pada Portal Peduli WNI.

Dokumentasi



Layanan Warung Konsuler

Analisis IK B3.2 – Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI London

Data economic intelligence (DEI) adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) termasuk informasi peluang produk spesifik yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara akreditasi/wilayah kerja. DEI disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing negara akreditasi/wilayah kerja.

DEI antara lain mencakup Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi, Potensi Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Negara Akreditasi, dan Kiat Mengembangkan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Negara Akreditasi, dan Kalender Kegiatan. Format DEI Perwakilan RI merujuk pada Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan DEI Kemenlu.

Nilai DEI adalah:

- 0 - 30 : Tidak sesuai
- 30,01-50 : Belum sesuai
- 50,01-70 : Cukup sesuai
- 70,01-90 : Sesuai
- >90 : Sangat sesuai

Penilaian dilakukan oleh Ditjen Amerop untuk Perwakilan RI di kawasan Amerop dan Ditjen Aspasaf untuk Perwakilan RI di kawasan Aspasaf.

DEI periode observasi tahun sebelumnya disampaikan ke Pusat pada Triwulan I tahun berjalan.

Penilaian DEI diperoleh Perwakilan RI dari Pusat pada Triwulan III tahun berjalan.

Informasi Kinerja

Tabel III.B1.3.a
Capaian IK B1.3 Indeks Respon Positif Terhadap Informasi Data *Economic Intelligence/Market Intelligence* Tentang Negara Akreditasi KBRI London

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai	Nilai Bobot
Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI London	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI London	98	34,38%
Realisasi		98	
Target		88	
Capaian		111.36%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, terdapat perubahan mekanisme penentuan target dan penilaian untuk penyusunan Data Economic Intelligence/Market Intelligence. Dari sebelumnya menggunakan indeks (skala 4) menjadi berbasis angka (score). Adapun perubahan ini juga menjadikan IK terkait Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi baru pertama kali diadopsi di tahun 2024.

Perbandingan Kinerja

Target IK B1.3 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan nilai laporan data Economic Intelligence/ Market Intelligence tentang negara akreditasi sebesar 88 dari, dan terealisasi sebesar 98 poin, dengan capaian IK sebesar 111,36%. Capaian IK tahun 2024 baru diadopsi tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan menggunakan mekanisme penilaian dan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.B1.3.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK B3.2 Indeks Respon Positif Terhadap Informasi Data Economic Intelligence/Market Intelligence Tentang Negara Akreditasi KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
B3.2					
Target	2	5	3	5	88
Realisasi	5	6	3	5	98*
Capaian	120%	120%	100%	100%	113,36%

Catatan: *Penilaian dengan mekanisme baru di tahun 2024

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Pada tahun 2024, KBRI London telah menyusun *Economic Intelligence* dengan baik dan memperoleh nilai 98 dari nilai maksimum 100. Keberhasilan pencapaian IK tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antara KBRI London, Atase Perdagangan, dan IIPC London utamanya terkait penyelarasan dan akurasi data perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London. Sementara dari sisi eksternal, *Economic Intelligence* tahun 2024 juga diperkaya dengan data dan indikator resmi yang dapat diperoleh dari sumber terbuka serta tidak terlepas dari faktor transparansi data dari badan resmi negara akreditasi.

KBRI London selama tahun 2024, KBRI London secara aktif menjangkau informasi terkait perkembangan ekonomi terkini di negara akreditasi kepada stakeholders terkait di negara akreditasi. Informasi tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik terkait nuansa perkembangan ekonomi di Inggris dan Irlandia.

Selain itu, KBRI London secara perlahan juga telah memperbaiki *database* stakeholders bidang ekonomi melalui penggunaan aplikasi pengelola kegiatan berbasis website. Penguatan *database stakeholders* sangat berguna untuk menggali informasi dan masukan dari perusahaan-perusahaan di Inggris dan Irlandia.

Kendala dan Tantangan

Kendala yang dihadapi selama penyusunan Economic Intelligence tahun 2024 yaitu:

- Keterlambatan penerbitan data statistik terbaru dari negara akreditasi maupun Indonesia. Hal ini menjadi kendala mengingat periode penerbitan (tahunan, triwulanan, bulanan) antara badan statistik nasional/ pusat data internasional tidak sama.
- Diskrepansi data perdagangan/ investasi antara K/L dan badan statistik resmi di negara akreditasi.

Upaya Perbaikan

Langkah solutif guna menanggulangi hambatan pada perolehan data *economic intelligence* yaitu:

- Memaksimalkan jejaring asosiasi bisnis seperti *UK ASEAN Business Council*, *Asia House*, serta *British Chamber of Commerce*.
- Melakukan pendekatan kepada badan pusat statistik negara akreditasi. Dalam hal ini, KBRI London akan berupaya melakukan diskusi terkait diskrepansi data perdagangan/ investasi dengan *Office of National Statistic* (Inggris) dan *Central Statistics Office* (Irlandia).
- KBRI London akan tetap melanjutkan langganan jasa analisis, aplikasi pengelola data, dan berpotensi menambah jasa langganan lainnya yang relevan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Penyusunan *economic intelligence* KBRI London dapat berjalan dengan baik dikarenakan mengoptimalkan beberapa kegiatan di tahun 2024:

- Pemanfaatan penyelenggaraan business forum dan *outreach* oleh KBRI London untuk menjaring informasi potensi investasi, perdagangan, dan kerja sama yang memiliki aspek ekonomi.
- Penyusunan analisis perkembangan ekonomi yang terjadi di Inggris dan Irlandia di tahun 2024.
- Fasilitasi KBRI London pada penyelenggaraan *roundtable*, *business meeting*, dan seminar yang menghadirkan narasumber terkemuka ikut memperkuat penyusunan informasi di dalam *Economic Intelligence*.

Proyeksi Ke Depan

Paradigma penyusunan Economic Intelligence yang ditetapkan oleh Pusat diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi pemangku kepentingan di dalam negeri. *Economic Intelligence* diharapkan dapat terus menjadi acuan potensi ekspor dan impor untuk mendukung ekspansi perdagangan antara Indonesia dan negara akreditasi.

Tantangan perekonomian global yang semakin pelik menjadikan penyusunan economic intelligence semakin relevan sebagai panduan awal bagi pemangku kepentingan di dalam negeri. Selain menjadi panduan, Economic Intelligence juga berfungsi sebagai medium pengelolaan informasi untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi di masa mendatang.

Dokumentasi



Kunjungan Dubes RI ke importir kelapa sawit Inggris guna membahas dampak *due diligence* Inggris

Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya internal (SDM, Sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi dan Anggaran) organisasi agar mampu menjalankan proses bisnis utama organisasi.

Learning and Growth Perspective terdiri dari 3 IK yaitu:

1. IK L.1.1: Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London
2. IK L.2.1: Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri
3. IK L.3.1: Nilai Kinerja Anggaran KBRI London

L1 Tata Kelola Organisasi KBRI London yang Baik

Sasaran strategis ini berfokus pada tata kelola yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih.

Sasaran Strategis (SS) L1 diukur berdasarkan capaian pada Indikator Kinerja (IK) Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London.

Analisis IK L1.1 – Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London

Deskripsi IK

Nilai evaluasi AKIP KBRI London merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan guna mencapai misi organisasi. Akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan secara rinci dalam laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Evaluasi AKIP di Kemenlu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merujuk pada Keputusan Irjen Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Juknis Evaluasi AKIP di Lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI, yang mengacu pada Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan meliputi 5 (lima) komponen dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Hasil perhitungan dari komponen tersebut menghasilkan nilai akhir AKIP Satker yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
- (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan
- (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
- (4) B (Skor > 60-70); Baik

- (5) CC (>50-60); Cukup
- (6) C (>30-50); Kurang
- (7) D (0-30); Sangat Kurang

Pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. Mengukur implementasi SAKIP pada Satker dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
2. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Satker.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Untuk tahun 2023, klaim realisasi nilai AKIP menggunakan nilai yang tertuang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Jenderal Kemenlu atas implementasi SAKIP Satker tahun sebelumnya (2022).

Informasi Kinerja

Tabel III.L1.1.a
Capaian IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London	Nilai evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu	79,50 (BB)	-
Realisasi		79,50 (BB)	
Target		77,50 (BB)	
Capaian		102,58%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London tahun 2022 adalah sebesar 79,50 (BB) dari target sebesar 77,50 (BB), sehingga capaian IK sebesar 102,58% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar: manajemen kinerja meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. KBRI London telah berupaya mengimplementasikan rekomendasi evaluasi pusat dalam penyusunan dokumen AKIP, utamanya dalam hal keselarasan informasi yang tertuang pada Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Matriks Realisasi Renaksi; memastikan akurasi narasi dan data kuantitatif; serta serta pemenuhan kaidah penyusunan LKj sesuai Permenlu nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.L1.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
L1.1 Target	78 (BB)	79% (BB)	79,5% (BB)	77,50 (BB)	77,50 (BB)
Realisasi	74,31 (BB)	74,99% (BB)	76,02 (BB)	76,60 (BB)	79,50 (BB)
Capaian	95,27%	94,92%	95,62%	96,35%	102,58

Dalam periode 2021-2024 realisasi IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London terus mengalami peningkatan. Peningkatan nilai evaluasi didukung oleh adanya peningkatan kualitas pelaporan kinerja yakni dalam pemenuhan pelaporan dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel III.L1.1.c
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London

IK	2021		2022		2023		2024	
	Nilai KBRI	Rata ² Nasional	Nilai KBRI	Rata ² Nasional	Nilai KBRI	Rata ² Nasional	Nilai KBRI	Rata ² Nasional
L1.1	74,99	67,93	76,02	67,93*	76,60	67,93*	79,50	67,93*

Sumber: Laporan Kinerja KemenPANRB 2022

*menggunakan nilai 2022

Realisasi IK L1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London tercatat di atas rata-rata nasional K/L tahun 2020-2023. Tren nilai evaluasi AKIP tahun 2021 - 2024 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai evaluasi AKIP KBRI London telah mencapai target dan berada di atas rata-rata nasional.

Kendala dan Tantangan

Dalam penyusunan dokumen AKIP, terdapat beberapa kendala, di antaranya:

- Kompleksitas mekanisme dan prosedur penyusunan dokumen AKIP serta sistem aplikasi terkait.
- *Overlapping* data di antara berbagai aplikasi pelaporan lintas K/L, dinamika perubahan, serta proses pengisian aplikasi yang cenderung rumit.

Selain itu, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan pengukuran kinerja, yaitu kesesuaian perhitungan capaian IK dan Sub IK pada Laporan Kinerja dengan matriks NCKO, serta mendokumentasikan dialog kinerja yang dilakukan.

Upaya Perbaikan

Adapun sebagai saran perbaikan evaluasi dokumen AKIP ke depan, KBRI London merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan *awareness*, pemahaman dan pelatihan kepada seluruh unsur Perwakilan RI untuk penyusunan dokumen AKIP dan input pada aplikasi.

KBRI London juga akan tetap melakukan dialog kinerja secara periodik (triwulan atau semester) untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, serta mendokumentasikan kegiatan dialog kinerja dalam suatu laporan dialog kinerja dengan lampiran meliputi diantaranya daftar hadir peserta dialog kinerja, dan dokumentasi kegiatan.

L2 Pengelolaan Aset KBRI London yang Optimal

Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berdasar dari perolehan lainnya yang sah.

Cakupan aset yang diukur dalam indeks ini adalah aset lancar berupa barang milik negara (BMN). Pengelolaan Aset dimaksud dalam sasaran strategis ini adalah proses perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN yang berada di lingkungan Kemenlu. Proses ini diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dari Kementerian Keuangan (sesuai Permen PANRB No. 26 Tahun 2022).

Analisis IK L2.1 – Indeks Pengelolaan BMN KBRI London

Deskripsi IK

Indeks Pengelolaan BMN adalah alat ukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh satker perwakilan sebagai pendukung pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Implementasi Indeks Pengelolaan BMN merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata kelola BMN.

Indeks Pengelolaan BMN mencakup rata-rata tertimbang (weighted average) parameter-parameter pengelolaan BMN yang terdapat pada Perwakilan RI.

Indeks Pengelolaan BMN mencakup penghitungan dari 8 (delapan) parameter pengelolaan BMN, yaitu:

1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian LBKP
3. Tingkat penyelesaian temuan BPK terkait BMN
4. Tingkat BMN (tanah) mempunyai dokumen kepemilikan
5. Tingkat BMN (gedung dan bangunan) pada perwakilan RI yang diasuransikan
6. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal)
7. Tingkat BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan (PSP)
8. Tingkat BMN dengan status Rusak Berat yang sudah dihapuskan

Parameter tersebut merujuk komponen penilaian dalam Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang disesuaikan dengan implementasi pengelolaan BMN pada Perwakilan RI. Dalam penghitungan akhir, parameter yang tidak applicable dengan kondisi perwakilan RI dapat tidak diperhitungkan. Sebagai contoh, jika suatu perwakilan RI tidak mempunyai kepemilikan tanah, maka parameter nomor 4 yaitu Tingkat BMN (tanah) yang mempunyai dokumen kepemilikan, tidak diperhitungkan.

Penghitungan Parameter poin 1; 2; dan 6 (ketepatan waktu penyampaian) adalah sebagai berikut:

- Penyampaian laporan kurang atau sama dengan H-1 = nilai sama dengan 4
- Penyampaian laporan H+0 = nilai sama dengan 3
- Penyampaian laporan H+1 s.d. H+2 = nilai sama dengan 2
- Penyampaian laporan lebih atau sama dengan H+3 = nilai sama dengan 1

Penghitungan Parameter poin 3; 4; 5; dan 7 adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian/pemenuhan parameter sebesar 100% = nilai sama dengan 4
- Penyelesaian/pemenuhan parameter sebesar 75% s.d. kurang dari 100% = nilai sama dengan 3 sampai <4
- Penyelesaian/pemenuhan parameter sebesar 50% s.d. kurang dari 75% = nilai sama dengan 2 sampai <3
- Penyelesaian/pemenuhan parameter di bawah 50% = nilai sama dengan 1 sampai <2
- Pada penghitungan parameter poin 3 dan 5 ini dilakukan konversi dari persentase yang diperoleh menjadi nilai dengan mengkalikan persentase dengan nilai maksimal 4 [$p\% \times 4$]. Sebagai contoh, apabila penyelesaian temuan BPK diselesaikan 70%, maka nilai yang diperoleh adalah $70\% \times 4 = 28$).

Informasi Kinerja

Tabel III.L2.1.a
Capaian IK L2.1 Indeks Pengelolaan BMN KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Indeks Pengelolaan BMN KBRI London	Indeks Pengelolaan BMN KBRI London	3,35 (skala 4)	100%
Realisasi		3,35 (skala 4)	
Target		3,2 (skala 4)	
Capaian		104,69%	
Batas Toleransi		120%	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri adalah sebesar 3,58 (skala 4) dari target sebesar 3,20 (skala 4), sehingga capaian IK sebesar 104,69% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.L2.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK L2.1 Indeks Pengelolaan BMN KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
L2.1 Target	N/A	N/A	2,7 (skala 4)	2,0 (skala 4)	3,2 (skala 4)
Realisasi	N/A	N/A	2,86	2,91	3,35
Capaian	N/A	N/A	105,93%	100,34	104,68%

IK L2.1 baru diadopsi pada tahun 2022 sehingga capaian IK di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK di tahun 2022. Dalam periode 2022 s.d. 2024 realisasi IK L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri mengalami peningkatan. Pada TA 2024 KBRI London telah mengoptimalkan kinerja pengelolaan aset melalui pencapaian target kinerja dengan pelaksanaan program-program yang mendukung terselenggaranya tata kelola manajemen aset yang transparan dan akuntabel.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi IK L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri dengan perbandingan kinerja dengan realisasi nasional sebagai berikut:

Tabel III.L2.1.c
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

IK	2023		2024	
	Kementerian Luar Negeri	Rata-Rata Nasional	Kementerian Luar Negeri	Rata-Rata Nasional
L2.1	2,91	2,87*	3,20	2,87*

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu 2021

*menggunakan nilai 2021, rata-rata nasional 2022 belum rilis

Realisasi IK L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri tercatat di di bawah rata-rata nasional K/L tahun 2022, namun telah di atas rata-rata nasional pada 2023 dan 2024. Tren Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri tahun 2022-2024 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai KBRI London sudah mencapai target, dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai pada rata-rata nasional. Berdasarkan tabel dimaksud, dapat dilihat bahwa IK L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri berada di atas rata-rata nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Penyelenggaraan pengelolaan aset terus diupayakan untuk terealisasi secara optimal pada tahun 2023 dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Capaian pengelolaan aset pada tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

Kendala dan Tantangan

Tidak terdapat kendala dan tantangan dalam pencapaian target/tujuan pengelolaan aset di KBRI London TA 2024.

Upaya Perbaikan

KBRI London terus berupaya dalam pencapaian target/tujuan pengelolaan aset yang optimal pada Tahun 2024 khususnya dalam penyampaian Laporan-Laporan terkait Pengelolaan Aset secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Analisis Program Pendukung Capaian

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Negara TA 2024

KBRI London telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas dari sumber dana PNPB dan juga telah merealisasikan pengadaan belanja modal perangkat pengolahan data dan peralatan kantor sesuai dengan mekanisme pengadaan dan target yang ditetapkan.

2. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Aset Tetap KBRI London Semester I dan II TA 2024.

KBRI London telah menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Aset Tetap pada Semester I Tahun 2024 melalui Berita No.B-03986/London/240627 dan Laporan Wasdal Semester II Tahun 2023 melalui Berita No.B-00032/London/240130

3. Pelaksanaan Usulan Penghapusan 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional KBRI London TA 2024 No. Plat 180 D419 melalui Mekanisme Pemusnahan melalui Berita No. B-00313/London/241010.

Selain itu, KBRI London telah melaporkan pelaksanaan penghapusan 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional dengan merek Mercedes Benz nomor plat 180 D 400 melalui mekanisme pemusnahan melalui Brafaks No.B00462/London/23122 dan telah mendapatkan Persetujuan Penghapusan melalui Salinan Kepmenlu No.02/B/PL/03/2024/03 Tahun 2024 yang diterima melalui Brafaks No.B-01656/Kemlu/240314.

4. Penyusunan Laporan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Aset Tetap KBRI London sebagai dasar pemutakhiran data aset pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

KBRI London telah menyusun Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) hasil PDDT BPK atas pengadaan BMN melalui Brafaks pada tanggal 30 Mei 2024.

5. Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)

KBRI London telah menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Periode Semester TA 2023 *Unaudited* melalui Berita No. B-00060/London/240216 dan telah menyusun LBKP Periode Semester I 2024 dan telah disampaikan melalui Berita tanggal 26 Juli 2024..

6. Pemutakhiran Data Aplikasi SAKTI terhadap pengelolaan persediaan dan aset tetap periode pengadaan TA 2024.

KBRI London telah melakukan pemutakhiran data pengadaan dan pemakaian persediaan dan aset tetap TA 2024 secara berkala setiap bulan melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

7. Penyampaian Laporan RKBMN

KBRI London telah menyampaikan Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2026 melalui Berita No. B-00333/London/241028.

8. Pengadaan Barang Milik Negara Tahun 2024

Dari alokasi Anggaran Belanja Modal Pengolah Data Fasilitas Perkantoran sebesar [REDACTED] terealisasi sebesar [REDACTED] atau sebesar 99,16%; dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi:

1. CCTV Wisma Wakepri 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.47.029.485,-
2. Laptop 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.22.039.575,-
3. Firewall fortigate 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.64.922.609,-
4. Network probe/tracer 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.6.468.374,-
5. Personal computer 2 unit, dengan realisasi Rp.29.012.693,-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor:

1. Soundsystem Loudspeaker dan Subwoofer Stereo System 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.91.221.806,-
2. Kursi Kerja 4 unit, dengan realisasi anggaran Rp.10.051.174,-
3. Rice Cooker 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.13.766.239,-
4. Blender 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.5.382.084,-
5. Setrika 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.4.606.673,-
6. Meja Setrika: 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.4.020.796,-
7. Paper shredder 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.20.480.929,-
8. Kettle air 3 unit, dengan realisasi anggaran Rp.4.661.269,-
9. Toaster 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.2.052.280,-
10. Microwave 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.5.986.969,-
11. Food warmer 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.11.520.837,-
12. Microwave 1 unit, dengan realisasi sebesar Rp.1.820.708,-
13. Air Fryer 1 Unit, dengan realisasi anggaran Rp.2.019.417,-

Adapun anggaran belanja kendaraan dinas operasional sebesar Rp.1.102.570.000,- telah terealisasi pada bulan Desember TA 2024 sebesar Rp.1.091.299.227 atau 98,98%

L3 Pengelolaan Anggaran KBRI London yang Optimal dan Akuntabel

Infrastruktur diplomasi yang kuat ditopang oleh pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel. Pengelolaan anggaran merujuk pada rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyusunan rencana kerja, penuangan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasi anggaran, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, hingga penyusunan Laporan Keuangan. Anggaran yang optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis IK L3.1 – Nilai Kinerja Anggaran KBRI London

Deskripsi IK

Berisi uraian IK dengan merujuk Manual IK dengan narasi singkat dan infografis, dan dapat didukung dengan informasi substantif yang diperlukan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga. NKA menjadi salah satu instrumen dalam penerapan mekanisme Penganggaran Berbasis Kinerja, yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. NKA memantau 2 komponen, yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang dihasilkan oleh Aplikasi Monev Anggaran (SMART); dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui aplikasi OMSPAN.

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai EKA dan Nilai IKPA dengan bobot yang seimbang, masing-masing sebesar 50%. Pembobotan tersebut terus dievaluasi setiap tahun dan terus disesuaikan mempertimbangkan ketentuan yang terbaru. Komponen pembentuk pada masing-masing nilai adalah sebagai berikut:

Kriteria Pengukuran EKA SMART	Pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tusi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Kriteria Pengukuran IKPA	Terdapat 4 (empat) aspek pelaksanaan anggaran, yaitu Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan; Kepatuhan terhadap regulasi; Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan; serta Efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Keempat aspek tersebut diukur melalui 12 (dua belas) indikator, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.

Informasi Kinerja

Tabel III.L3.1.a
Capaian IK L3.1 Nilai IKPA KBRI London

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai Bobot
Nilai IKPA KBRI London	Nilai IKPA	99,59	100%
Realisasi		99,59	

Target	93,49
Capaian	106,52%
Batas Toleransi	120%

Sumber: Aplikasi SMART dan Aplikasi OMSPAN per 15 Januari 2024

Pada tahun 2023, realisasi IK L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI London adalah sebesar 89,97 dari target sebesar 93, sehingga capaian IK sebesar 96,74% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%. NKA diperoleh dari nilai EKA sebesar 86,45 dan nilai IKPA sebesar 93,94 dengan pembobotan masing-masing 50%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.L3.1.b
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK L3.1 Nilai IKPA KBRI London

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
L3.1 Target	N/A	91	92	93	93,49
Realisasi	N/A	92,55	96,71	89,27	99,59
Capaian	96,67%	102%	105,12%	96,74%	105,52

Dalam periode 2020-2023 realisasi IK L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI London mengalami peningkatan/penurunan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target IK L3.1 mengalami peningkatan target menjadi 93 pada tahun 2023 dari 92 pada tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi IK L3.1 mengalami penurunan menjadi 89,97 dari 96,71 pada tahun 2022.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi IK L3.1 Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai EKA SMART dan Nilai IKPA. Berikut perbandingan kinerja dengan realisasi nasional masing-masing komponen.

Tabel III.L3.1.c
Nilai Kinerja Anggaran KBRI London

IK	2021		2022		2023		2024	
	KBRI London	Rata ² K/L	KBRI London	Rata ² K/L	KBRI London	Rata ² K/L	KBRI London	Rata ² K/L
IKPA	-	94,5	94,46	91,32	93,49	91,32*	99,59	91,32*

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu 2022

*menggunakan nilai 2022

Realisasi IKPA KBRI London tercatat di atas rata-rata nasional K/L tahun 2020-2023. Tren nilai IKPA tahun 2020 - 2022 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai KBRI sudah mencapai target, dan masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai pada rata-rata nasional.

Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian IK

Realisasi IK L3.1 mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 99,59, dari 93,49 pada tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh terdapat perubahan IK NKA yang saat ini menetapkan perhitungan hanya berdasarkan nilai IKPA. KBRI London juga terus berusaha untuk dapat seakurat mungkin melakukan pelaporan yang dilakukan pada SMART yang ditunjukkan dengan pencatatan Realisasi Volume Rincian Output (RVO) yang tercapai sesuai target, tidak adanya capaian RO yang tercatat sebagai anomali. Secara keseluruhan implementasi pemanfaatan anggaran KBRI London telah sesuai dengan prinsip *budget follow function* dalam rangka membangun sebuah organisasi yang berorientasi pada hasil.

Berbagai penyesuaian akibat dari *refocusing* program, *self blocking*, dan anggaran dari Pusat yang terjadi sepanjang tahun mengakibatkan banyaknya revisi informasi kinerja, termasuk revisi anggaran, sehingga mempengaruhi komponen penilaian dalam SMART dan IKPA.

Kendala dan Tantangan

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan realisasi anggaran KBRI London antara lain mencakup (i) Selisih kurs yang terjadi akibat perbedaan asumsi kurs perhitungan ABT Belanja Pegawai dengan kurs SP2D, dan (ii) Selisih kurs pengajuan TUP akhir tahun sebesar Rp 16.000 dengan kurs SP2D sebesar Rp 15.416.

Selain itu, juga terpantau terdapat pemutakhiran sistem/aplikasi pengelolaan keuangan yang terjadi berkali-kali mengakibatkan keterlambatan proses pertanggungjawaban keuangan, serta terdapat pengaruh variabel eksternal yang sulit dikendalikan atas penilaian IKPA pada deviasi halaman III DIPA, dimana jumlah rencana penarikan dana bulanan yang telah ditentukan sebelum tahun anggaran berjalan pada praktiknya akan sangat berbeda dengan pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.

Upaya Perbaikan

KBRI London terus memperkuat penggunaan anggaran dengan prinsip *budget follow function*, mengintensifkan upaya sinkronisasi perencanaan dan evaluasi program melalui dialog kinerja organisasi secara berkala, serta memastikan pengisian aplikasi monitoring dan evaluasi secara tepat guna dan berkesinambungan.

Analisis Program Pendukung Capaian

KBRI London melaksanakan 3 program, yaitu (i) Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional / 011.01.AA, (ii) Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik / 011.01.AL, dan (iii) Program Dukungan Manajemen / 011.01.WA. Kegiatan pengelolaan keuangan untuk menunjang pencapaian kinerja anggaran tahun 2024 diantaranya yaitu rapat sinkronisasi kegiatan yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2024, penyampaian briefing perkembangan serapan dan pengelolaan anggaran per bulan, serta rapat evaluasi kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada bulan Desember. Selain itu, secara rutin setiap fungsi selalu berkoordinasi dengan pengelola keuangan terkait ketersediaan anggaran dan penyesuaian alokasi anggaran jika terdapat perubahan pelaksanaan kegiatan yang berbeda dengan rencana yang telah disusun.

Proyeksi Ke Depan

KBRI London akan selalu meningkatkan Kinerja Anggaran serta terobosan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan demi terselenggaranya berbagai kegiatan dan kelancaran operasional KBRI London.

III.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran KBRI London pada tahun 2024 berdasarkan DIPA KBRI London TA 2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp. 96.220.135.000,-. Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan 18 kali revisi pagu anggaran diantaranya revisi pemindahan belanja pegawai tunjangan sewa rumah ke belanja barang fasilitas sewa rumah, rencana penarikan dana triwulanan, buka blokir kendaraan dinas, penambahan pagu fasilitasi sewa rumah, pemenuhan belanja pegawai, *self blocking* anggaran belanja perjalanan dinas, dan pemotongan pagu anggaran Pelindungan WNI. Pagu akhir tahun 2024, pagu akhir KBRI London adalah sebesar **Rp. 108.179.430.000.**

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Sumber Pendanaan
Belanja Pegawai	██████████	██████████	██████████	RM
Belanja Barang	██████████	██████████	██████████	RM
Belanja Modal	██████████	██████████	██████████	PNP
Total	██████████	██████████	██████████	

KBRI London telah mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2024 dengan realisasi mencapai 99.84% ██████████. Persentase realisasi tersebut naik sebanyak 1.07% jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran pada tahun 2023, yaitu sebesar 98,77%.

Kendala dan Tantangan:

1. Pemutakhiran sistem/aplikasi pengelolaan keuangan yang terjadi berkali-kali mengakibatkan keterlambatan proses pertanggungjawaban keuangan.
2. Izin pencairan dana PNPB untuk kendaraan dinas baru diperoleh pada akhir November 2024 sehingga proses pengadaan kendaraan dinas sangat terbatas mengingat proses pertanggungjawaban keuangan dilakukan kurang dari satu bulan.
3. *Self blocking* anggaran perjalanan dinas mengakibatkan pembatalan rencana kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan sehingga optimalisasi anggaran/pengalihan kegiatan perlu dilakukan.

4. Persetujuan proses ABT Belanja Pegawai baru terbit di minggu terakhir Desember 2024, sehingga proses pengajuan persetujuan TUP menjadi tergesa-gesa karena jumlah hari kerja di Pusat dan proses pertanggungjawaban di KPPN yang hanya bisa dilakukan pada jam kerja (*weekday*) banyak terpotong libur akhir tahun.
5. ABT Belanja Pegawai yang diajukan untuk kebutuhan anggaran TPLN dan Gaji LS, hanya disetujui untuk akun TPLN, sehingga perlu dilakukan *manuver* revisi pada hari-hari terakhir untuk mengakomodir kekurangan belanja gaji LS.
6. Penerimaan SP2D TUP atas ABT Belanja Pegawai baru diterima BNI London pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga proses pengembalian kas besi baru bisa diselesaikan pada tanggal tersebut.

III.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari total 18 Indikator Kinerja (IK), sebanyak 12 IK telah dicapai 100% atau lebih dalam rangka mendukung pelaksanaan 3 program dengan metode pengelolaan kinerja berbasis anggaran. Secara umum, capaian kinerja KBRI London adalah 106,52 dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 95,98% dari target, serta penggunaan anggaran sebesar **99.84%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional			
2.	Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik			
3.	Program Dukungan Manajemen			
Total				

Catatan: Data realisasi anggaran menggunakan data SIMKEU Per tanggal 8 Januari 2025.

Sebagai catatan, pada tahun 2024, nilai anggaran blokir perjalanan dinas KBRI London adalah sebesar **Rp 470,757,000**.

Dengan nilai capaian kinerja organisasi 106,22 serta serapan anggaran sebesar 99.84%, upaya KBRI London dalam memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya telah menghasilkan capaian realisasi kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil dari pengalokasian sumber daya ke program-program prioritas yang mendukung capaian IK, serta kolaborasi erat lintas Fungsi dalam melaksanakan program prioritas secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai seberapa efektif Kemenlu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja yang terukur. Tingkat efisiensi digambarkan dalam kuadran yang mengelompokkan capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

Tabel III

Kuadran Efisiensi Kinerja dan Anggaran



Penilaian kriteria tinggi rendahnya capaian kinerja dan anggaran per triwulan didasarkan pada batasan angka/persentase sebagai berikut:

Tabel III

Kriteria Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran per Triwulan

	Rendah	Tinggi
TW I	Di bawah 25%	Di atas 25%
TW II	Di bawah 50%	Di atas 50%
TW III	Di bawah 75%	Di atas 75%
TW IV	Di bawah 90%	Di atas 90%

Berdasarkan Renja KBRI London TA 2024 dan metode pengelolaan anggaran berbasis kinerja, KBRI London menetapkan [Jumlah RO pada Renja] Rincian Output untuk mendukung 11 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja. Capaian kinerja KBRI London pada tahun 2024 telah didukung oleh serapan anggaran sebesar 99,84%. Rincian anggaran per RO dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Capaian IK	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI London yang Optimal	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI London	110%	5640.AEH.001 Promosi Perdagangan, Investasi dan Pariwisata			98%
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI London	120%				
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI London	119%	5640.BDD.001 Pembinaan dan Penggalangan Masyarakat di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja			
Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI London	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI London	106%				
Basis Data KBRI London yang Akurat	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI London	111.36%				100%
Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI London yang Prima	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI London yang diselesaikan	108,70%	4439.QAA.001 Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri			87,9%
	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI London	100%				
Basis Data KBRI London yang Akurat	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI London yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%				
Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran	100%	4439.BAA.001 Pelayanan Kekonsuleran			99,9%

London yang Prima	KBRI London		di Perwakilan RI			
Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI London	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London	100%	5640.AEC.001 Kerja Sama Bilateral			99,7%
Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI London yang kuat	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI London	120%				
	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI London	83,33%				
Tata kelola organisasi KBRI London yang baik	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI London	102,58%				
Pengelolaan aset KBRI London yang optimal	Indeks Pengelolaan BMN KBRI London	104,69%	6023.EBB.951 Layanan Sarana Internal			99%
Pengelolaan anggaran KBRI London yang optimal dan akuntabel	Nilai IKPA KBRI London	99,59%	6023.EBA.994 Layanan Perkantoran			99,8%
	NCKO 2024	107,30	Total			99,84 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja dan anggaran KBRI London telah mencapai lebih dari 90%, sehingga KBRI London berada pada Kuadran I atau ideal. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

Faktor-faktor utama yang mendukung tercapainya efisiensi penggunaan anggaran di KBRI London, antara lain adalah:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk Berbagai Kegiatan. Salah satu faktor yang mendukung efisiensi penggunaan anggaran adalah pemanfaatan anggaran secara optimal untuk berbagai

kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Dalam hal ini, KBRI London senantiasa berkolaborasi dengan BI, perwakilan BUMN, dan unsur diaspora untuk memaksimalkan berbagai kegiatan utamanya yang berkaitan dengan promosi perdagangan, investasi, pariwisata dan budaya. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, KBRI London dapat mencapai tujuan strategis tanpa adanya pemborosan sumber daya.

2. Koordinasi dan Sinergi Antar Unit Kerja Efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta anggaran sangat bergantung pada koordinasi yang solid di antara seluruh pegawai di KBRI London. Komitmen tinggi untuk menjalankan tugas secara terintegrasi menciptakan sinergi yang optimal, mendukung pencapaian target kinerja dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi lintas Fungsi dalam merencanakan program dapat menghasilkan inovasi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan KBRI London sepanjang tahun 2023 guna menghasilkan capaian sesuai dengan ketentuan. Capaian anggaran termasuk efisien dengan realisasi anggaran. Dengan kekuatan SDM serta porsi anggaran yang tersedia, KBRI London dipandang telah dapat melakukan efisiensi dan optimalisasi dalam penggunaan sumber daya anggaran dan SDM untuk meraih nilai capaian kinerja organisasi sebesar 106,22.

Optimalisasi capaian kinerja diperoleh dari dukungan sumber daya manusia melalui antara lain: (i) Pembentukan Fungsi baru, yaitu Fungsi Multilateral, pada Mei 2023, tanpa mengubah formasi jumlah SDM KBRI London, dalam rangka memfokuskan capaian diplomasi Indonesia pada forum multilateral termasuk IMO, (ii) Mekanisme pertemuan secara *hybrid* tetap dilaksanakan guna memastikan penyelenggaraan kegiatan di tengah tantangan pertemuan fisik, (iii) Kuatnya komitmen dan dialog antara seluruh unsur KBRI London, baik level tertinggi hingga level teknis, menghasilkan pelaksanaan berbagai program prioritas dengan tepat, (iv) Integritas dan profesionalisme dari seluruh unsur KBRI London.

Dokumentasi



Penyelenggaraan Dialog Kinerja Organisasi



Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Gabungan KBRI London

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dari alokasi Anggaran Belanja Modal Pengolah Data Fasilitas Perkantoran sebesar [REDACTED] 99,16%; dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi:

1. CCTV Wisma Wakeppri 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.47.029.485,-
2. Laptop 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.22.039.575,-
3. Firewall fortigate 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.64.922.609,-
4. Network probe/tracer 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.6.468.374,-
5. Personal computer 2 unit, dengan realisasi Rp.29.012.693,-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor:

1. Soundsystem Loudspeaker dan Subwoofer Stereo System 1 unit, dengan realisasi anggaran Rp.91.221.806,-
2. Kursi Kerja 4 unit, dengan realisasi anggaran Rp.10.051.174,-
3. Rice Cooker 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.13.766.239,-
4. Blender 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.5.382.084,-
5. Setrika 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.4.606.673,-
6. Meja Setrika: 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.4.020.796,-
7. Paper shredder 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.20.480.929,-
8. Kettle air 3 unit, dengan realisasi anggaran Rp.4.661.269,-
9. Toaster 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.2.052.280,-
10. Microwave 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.5.986.969,-
11. Food warmer 2 unit, dengan realisasi anggaran Rp.11.520.837,-
12. Microwave 1 unit, dengan realisasi sebesar Rp.1.820.708,-
13. Air Fryer 1 Unit, dengan realisasi anggaran Rp.2.019.417,-

Adapun anggaran belanja kendaraan dinas [REDACTED] telah terealisasi pada bulan Desember TA 2024 sebesar [REDACTED] 98,98%

PENUTUP

IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja

KBRI London selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan hubungan dan kerja sama antara Indonesia dengan negara akreditasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan warga negara Indonesia. Pencapaian target kinerja KBRI London tidak terlepas dari faktor-faktor penentu baik dari kondisi domestik negara-negara akreditasi maupun kondisi di tanah air.

Pada tahun 2024, KBRI London telah berhasil memfasilitasi 8 kesepakatan dagang dengan nilai total USD 135,81 juta, khususnya di sektor produk kayu, kertas, baja, dan pariwisata yang memperkuat posisi Indonesia di pasar Inggris. Penyelenggaraan CEO Roundtable Forum dan Indonesia Investment Forum (IIF) 2023 di Inggris juga mendapatkan sambutan positif, mencerminkan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dengan kondisi ekonomi dan politik yang kondusif. Selanjutnya, kunjungan wisatawan dari Inggris dan Irlandia ke Indonesia mencapai 393,461 orang pada tahun 2024, menunjukkan minat yang tinggi dari wisatawan pasca-pandemi.

Dari segi politik, momentum peringatan 75 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Inggris dan 40 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Irlandia pada tahun 2024 ditunjukkan dengan tingginya intensitas kunjungan delegasi kedua negara. Terkait Inggris, hal ini menunjukkan komitmen kuat atas tindak lanjut kesepakatan Indonesia–UK Partnership Roadmap 2022-2024. Indonesia dan Inggris juga sepakat untuk menyusun Kemitraan Strategis Baru pada tahun 2025 menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Keir Starmer pada bulan November 2025. Indonesia dan Irlandia juga sepakat menandatangani Memorandum Saling Pengertian tentang Mekanisme Konsultasi Bilateral yang menjadi landasan penguatan interaksi pejabat tinggi kedua negara.

Dalam konteks kerja sama multilateral, Indonesia berhasil kembali terpilih sebagai anggota Advisory Committee IMSO untuk tahun 2025. Salah satu capaian besar Indonesia dalam forum IMO yaitu diterimanya usulan Indonesia untuk menetapkan Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai salah satu Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) sehingga kedua wilayah tersebut dapat lebih terjaga dari dampak negatif pelayaran Internasional. Kegiatan promosi di London dan Dublin berhasil meningkatkan citra positif Indonesia dalam diplomasi budaya, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan promosi pariwisata. KBRI London juga berhasil menyelesaikan 24 dari 24 kasus perlindungan WNI umum dan seluruh 8 kasus khusus pada tahun 2024.

IV.2. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi KBRI London dalam upaya mencapai IK sepanjang tahun 2024 antara lain:

- Instabilitas politik akibat penyelenggaraan pemilu serta tekanan terhadap kebijakan luar negeri Inggris dalam isu global seperti konflik Israel-Palestina, Suriah dan Ukraina di tahun 2024;
- Pergantian pemerintahan dan perubahan fokus di Inggris dan Irlandia yang cenderung mendahulukan konsolidasi di dalam negeri.

- Dinamika politik-ekonomi yang kompleks telah memberikan gambaran proyeksi perkembangan ekonomi di Inggris dan Irlandia tidak menentu. Kondisi ini menjadi tantangan bagi KBRI London dalam membaca perkembangan yang berubah sangat cepat.
- Kompleksitas perizinan investasi di Indonesia membingungkan calon investor dari negara akreditasi. Beberapa calon investor yang telah melakukan kunjungan lapangan ke Indonesia menyampaikan perlu melakukan penelaahan kembali terkait rencana investasi mereka di Indonesia.
- Berbagai penyesuaian akibat dari refocusing program dan anggaran yang terjadi sepanjang tahun mengakibatkan banyaknya revisi informasi kinerja.
- Mekanisme layanan konsuler dalam hal layanan pembuatan paspor masih perlu belum mengakomodir WNI yang berdomisili di beberapa British Overseas Territories (BoT).

IV.3. Proyeksi Ke Depan

Tahun 2025 menyimpan kesempatan dalam upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris dan Irlandia. Meski di tengah berbagai tantangan mulai dari konflik geo-ekonomi, ketidakpastian politik global, dinamika politik-ekonomi di berbagai negara emerging market, hubungan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI London dibekali modalitas yang cukup solid. Dalam hal ini, tahun 2025 menjadi momentum tepat untuk memperluas jaringan diplomasi ekonomi, menjaga kepercayaan stakeholders, dan tetap terbuka terhadap berbagai peluang.

Tahun 2025 akan menjadi momentum untuk memaksimalkan capaian diplomasi dalam berbagai bidang prioritas, termasuk dalam rangka menindaklanjuti perayaan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Inggris, perayaan 40 tahun hubungan bilateral Indonesia-Irlandia, hasil Kunjungan Presiden RI ke Inggris. Rencana pembentukan Kemitraan Strategis Baru Indonesia-Inggris, serta pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori 'C'. Tahun 2025 juga akan dimanfaatkan untuk mendorong prioritas kerja sama sebagaimana komitmen bilateral melalui penyusunan *New Strategic Partnership Indonesia-Inggris*, serta mekanisme konsultasi bilateral Indonesia-Irlandia, maupun dalam konteks multilateral mewakili suara negara-negara berkembang pada forum-forum IMO, IMSO, dan ICO.

Kegiatan KBRI London 2025 diarahkan untuk selaras dengan prioritas politik luar negeri untuk mendukung visi Presiden RI yang tertuang dalam Asta Cita sebagaimana ditekankan kembali oleh Menteri Luar Negeri RI pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu Tahun 2025, yakni:

1. Penguatan diplomasi ekonomi, termasuk fokus pada pencapaian target, memperkuat *engagement* kepada mitra di Inggris dan Irlandia untuk menjaring komitmen kerja sama ekonomi utamanya di bidang pangan, kesehatan, transisi energi, ekonomi digital, dan hilirisasi industri yang dilakukan melalui kolaborasi erat dengan diaspora dalam kegiatan promosi Indonesia.
2. Penguatan pendekatan kepada *stakeholders* strategis di negara akreditasi untuk mendukung prioritas dalam mewujudkan kedaulatan di bidang pangan, energi, kesehatan, pertahanan, dan perikanan.
3. Diplomasi perlindungan WNI, termasuk memperkuat kerja sama kekonsuleran dengan pemerintah setempat dan meningkatkan *alert system* untuk memastikan layanan yang optimal bagi WNI di negara akreditasi.
4. Diplomasi kedaulatan, termasuk kolaborasi erat dengan diaspora dan pelajar di Oxford serta intensifikasi pendekatan kepada Pemerintah Inggris untuk diseminasi informasi yang berimbang terkait pembangunan di Papua.

5. Peningkatan pemanfaatan partisipasi Indonesia dalam IMO untuk mendukung prioritas ekonomi, keamanan maritim, dan pelayaran nasional.
6. Penguatan infrastruktur diplomasi, termasuk penguatan reformasi birokrasi dan prinsip *good governance*, serta pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.

Dari sisi perencanaan, monitoring, dan evaluasi, untuk tahun 2025, KBRI London mendorong perumusan target yang lebih terukur dan fleksibel terhadap perubahan, dengan memperhatikan peluang eksternal. KBRI London juga akan lebih memperkuat sinkronisasi pelaksanaan program yang lintas Fungsi dan dengan melibatkan Atase Teknis, serta memperkuat koordinasi agar tercapai efektivitas pencapaian kinerja maupun efisiensi penggunaan sumber daya.